



# LAPORAN KINERJA

## DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

**TAHUN ANGGARAN 2023**

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2023” dapat diselesaikan dengan baik. LAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Bina Konstruksi atas penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR.

Pada Tahun Anggaran 2023, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang terdiri atas 48 (empat puluh delapan) satuan kerja telah menggunakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sebesar 98,50% atau Rp 579,89 Miliar dari pagu anggaran Rp 588,71 Miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi target Sasaran Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan indikator “Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional” sebesar 100% dari target sebesar 85%, dan Sasaran Program Dukungan Manajemen dengan indikator “Tingkat kualitas sumber daya konstruksi” sebesar 78,55% dari target 69%. Pencapaian kinerja ini merupakan hasil konsolidasi kinerja seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2023, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga laporan kinerja ini dapat menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PUPR dan peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Jakarta, 19 Januari 2024

**Direktur Jenderal Bina Konstruksi**



**Ir. Rachman Arief Dienaputra M.Eng**  
NIP. 196606271996031001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi periode 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023. Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melaksanakan berbagai program melalui unit kerjanya untuk mencapai sasaran serta mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga turut **mendukung 2 (dua) sasaran strategis** pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu **SS.4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan SS.5 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya**. Kedua indikator dari masing-masing sasaran strategis diatas yaitu IKSS.4 tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan **capaian 2023** sebesar **7,49%** dari target 5,1%; dan IKSS.5 tingkat keandalan sumber daya konstruksi, dengan capaian sebesar **78,55%** dari target 69%.

Dalam mendukung sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi melalui **2 (dua) program** yaitu Program **Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** dan Program **Dukungan Manajemen** pada periode 2020-2024. Kedua Sasaran Program tersebut yaitu (1) Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan (2) Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.

Dalam mewujudkan Program tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7 (tujuh) kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
3. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa;
4. Meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
5. Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;
6. Meningkatkan kinerja kelembagaan, dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi;
7. Meningkatkan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Di Tahun Anggaran 2023, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah **memenuhi target** Sasaran Program dengan indikatornya sebagai berikut: (1) Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional dengan **capaian 100%** dari target 85%; dan (2) Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dengan **capaian 78,55%** dari target 69% dengan Sub-indikator Kinerja Program yaitu (1) Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, (2) Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi, (3) Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi. Capaian ketiga sub-indikator kinerja program tersebut didapatkan dari 6 sasaran kegiatan yang dijalankan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Secara umum tidak ada kendala berarti dalam pencapaian seluruh sasaran kegiatan yang dijalankan DJBK di tahun 2023. Namun jika diturunkan ke indikator kinerja kegiatan yang mendukung keenam sasaran tersebut, terdapat 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yang belum tercapai yaitu pada tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi dan tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi. Hal tersebut disebabkan karena masih perlunya sosialisasi menyeluruh tentang kewenangan jasa konstruksi di daerah baik terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah serta perlunya pendampingan pendekatan ke pimpinan daerah untuk penyelenggaraan sub urusan jasa konstruksi, serta masih kurang maksimalnya hasil survei persepsi layanan Sistem Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT) 2023 kepada seluruh *stakeholder* terkait.

Untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun selanjutnya, berikut beberapa **rekomendasi** sebagai langkah perbaikan serta akan menjadi fokus kegiatan pada tahun anggaran berikutnya, yaitu:

1. Di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi akan dilaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi kualitas paket pekerjaan dengan penawaran dibawah 80% HPS dan Bimbingan Teknis Pra-Konstruksi;
2. Di bidang kinerja kelembagaan dan dukungan Material Peralatan Konstruksi dan Teknologi Konstruksi, akan dilaksanakan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi capaian sasaran nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan peningkatan registrasi Material dan Peralatan Konstruksi melalui Sistem Informasi Material Peralatan Konstruksi (SIMPK);
3. Di bidang pembinaan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi akan dilaksanakan pembaruan SKKNI dan modul, pemenuhan skema sertifikasi, dan pelatihan & sertifikasi 45.190 tenaga kerja konstruksi;
4. Di bidang pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan implementasi e-Katalog PUPR, penerapan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIPBJ); penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengalaman (SIMPAN), peningkatan nilai ITKP, dan operasionalisasi e-HPS/SIPASTI;

5. Pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi paket risiko besar;
6. Interoperabilitas SIJKT-SPSE LKPP;
7. Penyusunan Renstra 2025-2029; dan
8. Revisi Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) dan reposisi kelembagaan.

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1    LATAR BELAKANG .....	1
1.2    TUGAS DAN FUNGSI .....	2
1.3    STRUKTUR ORGANISASI .....	3
1.4    ISU STRATEGIS .....	9
1.5    SISTEMATIKA LAPORAN .....	23
<b>BAB 2 PERENCANAAN KINERJA</b> .....	25
2.1.1    VISI .....	28
2.1.2    MISI .....	29
2.1.3    ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	29
2.1.4    PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN .....	32
2.2    PERJANJIAN KINERJA .....	33
2.2.1    PERJANJIAN KINERJA (PK) AWAL .....	33
2.2.2    PERJANJIAN KINERJA (PK) AKHIR .....	38
2.2.3    KRONOLOGI PERUBAHAN PK .....	43
2.3    TARGET KINERJA TAHUN 2023 MENURUT RENSTRA .....	44
2.3.1    TARGET KINERJA BERDASARKAN RENSTRA .....	44
<b>BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI</b> .....	57
3.1    SUMBER DAYA MANUSIA .....	57
3.1.1    ANALISIS JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN DAN KELOMPOK JABATAN .....	57

3.1.2 ANALISIS JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN USIA.....	59
3.2 SARANA DAN PRASARANA.....	61
3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA).....	66
3.4 ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN.....	70
<b>BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>71</b>
4.1 UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA .....	71
4.2 CAPAIAN KINERJA .....	73
4.2.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	73
4.3 PERBANDINGAN KINERJA.....	123
4.3.1 ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.....	123
4.3.2 ANALISIS PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH.....	133
4.3.3 ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL (BENCHMARKING).....	133
4.4 REALISASI ANGGARAN .....	135
4.4.1 ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN TA 2023.....	135
4.4.2 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA .....	138
4.5 ANALISIS PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA .....	140
4.6 PENGHARGAAN ATAS KINERJA .....	143
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>145</b>
5.1 SIMPULAN UMUM.....	145
5.2 FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN .....	145
5.3 PERMASALAHAN.....	146
5.4 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.....	147
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>148</b>
1. PERJANJIAN KINERJA .....	148
2. PENGHARGAAN.....	150

3. PENGUKURAN KINERJA .....	152
4. BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA (BA SETELAH KONSOLIDASI DENGAN BPIW) .....	155
5. DOKUMENTASI KEGIATAN.....	155

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2023 .....	82
Tabel 4.2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan di Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi TA 2023 .....	84
Tabel 4.3 Capaian Output SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Terbina .....	85
Tabel 4.4 Rincian Capaian DIPA/PK SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Terbina .....	85
Tabel 4.5 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan yang Mendukung Program Dukungan Manajemen TA 2023.....	87
Tabel 4.6 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.....	90
Tabel 4.7 Rangkuman Hasil Survey Daftar SIMAK 2023.....	91
Tabel 4.8 Capaian Output Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi .....	93
Tabel 4.9 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa .....	99
Tabel 4.10 Rincian Hasil Perhitungan Sub indikator yang Mendukung IKK 2 .....	101
Tabel 4.11 Capaian Output Kegiatan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan BP2JK.....	103
Tabel 4.12 Capaian Kinerja SK Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi .....	107
Tabel 4.13 Capaian Output Kegiatan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi.....	108
Tabel 4.14 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi ...	109
Tabel 4.15 Detil Capaian IKK 4.1 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikat.....	112
Tabel 4.16 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan Renstra .....	113
Tabel 4.17 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan PK.....	113
Tabel 4.18 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Khusus IKN Berdasarkan PK.....	113
Tabel 4.19 Capaian Output Kegiatan Laporan Fasilitas Pembinaan Jasa Konstruksi .	114
Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Sub Indikator yang Mendukung IKK 4.2 Persentase Tingkat Dukungan Pelatihan/Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.....	115
Tabel 4.21 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi .....	115

Tabel 4.22 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pembinaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi .....	117
Tabel 4.23 Hasil Perhitungan Sub Indikator yang Mendukung IKK 5.1 Tingkat Kinerja Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Bidang Konstruksi .....	120
Tabel 4.24 Capaian Output Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.1 .....	121
Tabel 4.25 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.2.....	122
Tabel 4.26 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.3.....	122
Tabel 4.27 Capaian Kinerja SK Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya .....	125
Tabel 4.28 Capaian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.1 .....	128
Tabel 4.29 Hasil Perhitungan Sub Indikator IKK 6.2 Tingkat Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi .....	128
Tabel 4.30 Capaian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.2.....	130
Tabel 4.31 Capaian Sasaran Program DJBK TA 2023 terhadap TA 2022.....	131
Tabel 4.32 Capaian Sasaran Kegiatan Program Dukungan Manajemen DJBK TA 2023 terhadap TA 2022 .....	132
Tabel 4.33 Perbandingan Capaian Sasaran Program (Renstra 2020-2023).....	135
Tabel 4.34 Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan (Renstra 2020-2023 .....	137
Tabel 4.35 Tabel Perbandingan Kinerja Dengan Unit Organisasi Terkait .....	141
Tabel 4.36 Realisasi Anggaran Per Unit Organisasi Kementerian PUPR TA 2023.....	142
Tabel 4.37 Rincian Penyerapan Satuan Kerja di Lingkungan DJBK TA 2023 .....	143
Tabel 6.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan yang Mendukung Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi TA 2023 .....	158
Tabel 6.2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan yang Mendukung Program Dukungan Manajemen TA 2023.....	159

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi .....	10
Gambar 2.1 Peta Strategis DJBK.....	35
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Awal TA 2023 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi .....	41
Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Awal TA 2023 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.....	42
Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Awal TA 2023 Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi.....	42
Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja Awal TA 2023 Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi ..	43
Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja Awal TA 2023 Direktorat Keberlanjutan Konstruksi.....	43
Gambar 2.7 Perjanjian Kinerja Awal TA 2023 Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi.....	44
Gambar 2.8 Perjanjian Kinerja Awal TA 2023 Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi.....	44
Gambar 2.9 Perjanjian Kinerja Awal TA 2023 Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.....	45
Gambar 2.10 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2023 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ...	46
Gambar 2.11 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2023 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.....	47
Gambar 2.12 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2023 Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi.....	47
Gambar 2.13 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2023 Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi.....	48
Gambar 2.14 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2023 Direktorat Keberlanjutan Konstruksi ...	48
Gambar 2.15 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2023 Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi.....	49
Gambar 2.16 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2023 Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi .....	49
Gambar 2.17 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2023 Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.....	50
Gambar 3.1 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Status.....	65
Gambar 3.2 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan .....	66
Gambar 3.3 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia.....	67
Gambar 3.4 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	68
Gambar 3.5 Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara .....	69

Gambar 6.1 Perjanjian Kinerja Awal TA 2023 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi .....	154
Gambar 6.2 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2023 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ...	155
Gambar 6.3 Penghargaan Penilaian Kinerja Pokja Terbaik dalam rangka Hari Bakti PUPR ke-77.....	156
Gambar 6.4 Penghargaan Penerapan ISO 37001:2016 SMAP dalam rangka Hari Bakti PUPR ke-77 .....	156
Gambar 6.5 Penghargaan PPK Terbaik Kategori Administrasi Kontrak dalam rangka Hari Bakti PUPR ke-77 .....	157
Gambar 6.6 Penyerahan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 SMAP kepada BP2JK Wilayah Lampung.....	157
Gambar 6.7 Kegiatan Konstruksi Indonesia 2023 .....	161
Gambar 6.8 Rapat Koordinasi PBJ TA 2023 .....	161
Gambar 6.9 Gernas Reaktivasi BBI dan BBWI Jogjakarta 2023 .....	162
Gambar 6.10 Kunjungan Kerja Dirjen ke BJKW II Palembang 2023.....	162

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pengganti Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja, perjanjian kinerja dan rencana tindak yang merupakan bagian dari komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun sistem kinerja dibangun dan dikembangkan bagi penyelenggara manajemen kinerja melalui upaya: merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Hal ini bertujuan untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian tujuan dalam kerangka pemenuhan visi dan misi presiden.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, maka diperlukan adanya evaluasi atas implementasi SAKIP yang salah satu komponen pentingnya adalah informasi evaluasi terkait tingkat kemajuan/perkembangan (progres). Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melakukan monitoring dan evaluasi secara bulanan guna membantu pengawasan agar kegiatan tetap berada dalam alurnya. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR terhadap SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2022, nilai SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah **80,86** dengan interpretasi nilai **A (Memuaskan)**. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari hasil penilaian dan evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2021 dikarenakan terdapat peningkatan nilai pada komponen capaian kinerja di TA 2021. Namun meski nilai evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2022 mengalami peningkatan, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki pada tahun selanjutnya, yaitu:

#### A. Perencanaan Kinerja

1. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja TA 2022 sudah melibatkan pimpinan, namun masukan/koreksi dari pimpinan belum terdokumentasi

#### B. Pengukuran Kinerja

1. Pengukuran kinerja TA 2022 sudah melibatkan pimpinan, namun masukan/koreksi dari pimpinan dalam mengukur capaian kinerja belum terdokumentasikan.

#### C. Pelaporan Kinerja

1. Belum ada rewiu berjenjang dalam penyusunan Laporan Kinerja, misalnya disposisi pimpinan berupa masukan/koreksi pimpinan, atau dapat berupa notulensi rapat terkait penyusunan Laporan Kinerja;
2. Belum ada pembahasan dengan pimpinan terkait pemanfaatan informasi dari Lakin TA 2022 atau Laporan Monev Bulanan TA 2022 untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya;
3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja TA 2022 sudah melibatkan pimpinan, namun masukan/koreksi dari pimpinan belum terdokumentasi sehingga belum ada bukti bahwa Lakin digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

#### D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi);
2. Belum terlihat peningkatan efisiensi anggaran karena Realisasi Anggaran TA 2022 sebesar Rp 622,5 Milyar lebih besar dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp 603,3 Milyar.

Dalam rangka memperbaiki kekurangan yang terjadi pada hasil evaluasi SAKIP di atas, di tahun 2023 ini, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menindaklanjuti hal-hal yang perlu diperbaiki sesuai dengan masukan dari evaluasi SAKIP TA 2022 dan didokumentasikan ke dalam dokumen pendukung SAKIP, yaitu: (1) Rencana Strategis Tahun 2020-2024, (2) Perjanjian Kinerja, (3) Rencana Aksi, (4) Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulanan, dan (5) LAKIP TA 2023.

## 1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

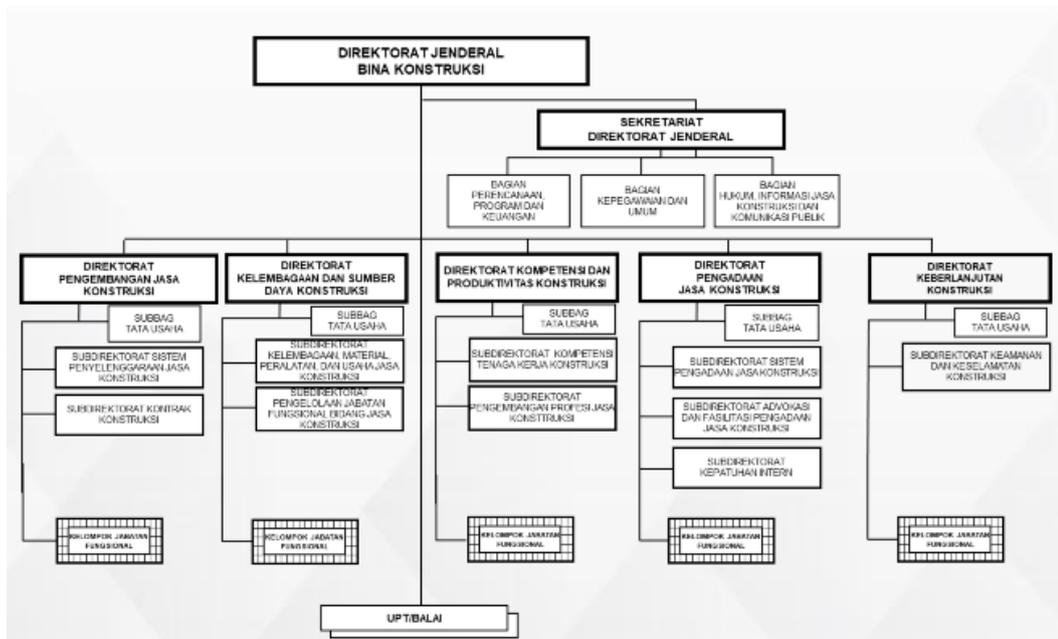
1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
6. Pelaksanaan dan pelayanan pengadaan barang/jasa Kementerian;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk menjalankan program-programnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memberikan pelayanan secara terintegrasi, sinergis, dan terkendali, serta didukung oleh manajemen kepemimpinan yang sangat kuat dalam membangun hubungan kerja yang baik antar staf, hubungan atasan-bawahan serta hubungan eksternal seperti persaingan baik antar maupun inter organisasi, keadaan stabilitas politik, sosial serta politik. Hal tersebut tidak luput dari kinerja pimpinan birokrasi sehingga terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan baik, untuk menyelenggarakan produk dan memberikan pelayanan kepada masyarakat konstruksi.

### 1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terbagi menjadi 5 direktorat dan 1 sekretariat yang dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini:



**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi**  
 Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

Berikut adalah tugas dan fungsi masing-masing Direktorat di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi:

#### 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan program jangka menengah dan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pembinaan jasa konstruksi;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan jasa konstruksi;
- c. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal;
- e. pengelolaan barang milik negara;
- f. pengelolaan urusan mutasi dan pengembangan pegawai;
- g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal;
- h. penataan organisasi, dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal;
- i. koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum;
- j. pelaksanaan administrasi dan legalisasi kerja sama bidang jasa konstruksi; dan
- k. pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, serta penyelenggaraan komunikasi publik di direktorat jenderal dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal.

#### 2. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi serta pengembangan strategi pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi;
- b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi;

- c. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi dan efektivitas penerapan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi;
- d. penyusunan rumusan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama strategis dalam dan luar negeri; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

### 3. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kelembagaan dan sumber daya konstruksi, dan melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi, kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, dan teknologi, serta Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi
- b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi
- c. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi
- d. pengawasan atas pemenuhan komitmen dan/atau kegiatan usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
- e. pengolahan data material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi;
- f. pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

### 4. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kompetensi dan produktivitas tenaga kerja konstruksi. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kompetensi tenaga kerja konstruksi, instruktur, asesor, penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, dan pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (*Continuous Professional Development*);
- b. pemenuhan, penyusunan dan pembaharuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi berdasarkan peta okupasi;
- c. pengolahan data tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor;
- d. pembinaan untuk penyetaraan kompetensi (*Mutual Recognition Arrangement*);
- e. pembinaan pelaksanaan program *link and match* dunia pendidikan dengan industri konstruksi;
- f. pemantauan dan evaluasi penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, modul/materi peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi;
- g. pemantauan dan evaluasi mutu penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi dan pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (*Continuous Professional Development*);
- h. pemantauan dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing di sektor konstruksi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

#### 5. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang pengadaan jasa konstruksi di Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi
- b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi
- d. pengembangan sistem dan pengolahan data pengadaan barang/jasa;
- e. pembinaan dan pengawasan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa;
- f. pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral;
- g. penerapan sistem pengendalian intern pemerintah;

- h. pengelolaan pelaksanaan Unit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal;
- i. pengolahan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

#### 6. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

Direktorat Keberlanjutan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang keberlanjutan konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, penilai ahli dan keberlanjutan konstruksi;
- b. pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada tahap pengkajian, perencanaan, perancangan konstruksi, pelaksanaan pembangunan, pembongkaran serta operasi dan pemeliharaan bangunan konstruksi;
- c. fasilitasi penyusunan rekomendasi teknis keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi serta kegagalan bangunan;
- d. pelaksanaan tugas kesekretariatan Komite Keselamatan Konstruksi meliputi sub-komite keamanan, sub-komite keselamatan dan kesehatan serta subkomite pemanfaatan dan pemeliharaan konstruksi;
- e. fasilitasi investigasi dan rekomendasi teknis kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan;
- f. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan keberlanjutan konstruksi pada tahap pengkajian, perencanaan, perancangan konstruksi, pelaksanaan pembangunan, pembongkaran, operasi dan pemeliharaan bangunan konstruksi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 (dua) UPT yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

##### 1. Balai Jasa Konstruksi

Balai Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran;

- b. penyusunan rencana kerja pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
- c. koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat di wilayahnya;
- d. pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
- e. penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi percontohan di wilayahnya;
- f. penyelenggaraan peningkatan kompetensi instruktur dan asesor konstruksi di wilayahnya
- g. pengumpulan data sumber daya jasa konstruksi di wilayahnya;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi di wilayahnya; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

## 2. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan pendampingan pengadaan barang/jasa;
- d. pelayanan konsultasi proses pengadaan barang/jasa;
- e. pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat No. 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Lembaga ini merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PUPR. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) memiliki tugas melaksanakan registrasi, akreditasi, penetapan penilai ahli, pembentukan LSP, pemberian lisensi, dan penyetaraan di bidang Jasa Konstruksi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPJK menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan registrasi terhadap badan usaha jasa konstruksi, pengalaman badan usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi, lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi, dan penilai ahli;
2. pelaksanaan akreditasi terhadap asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi;
3. pelaksanaan penetapan tim penilai ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi kegagalan bangunan;
4. pelaksanaan pemberian rekomendasi dalam rangka lisensi LSP;
5. pembentukan LSP untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan oleh LSP yang dibentuk asosiasi profesi jasa konstruksi atau lembaga pendidikan dan pelatihan;
6. pelaksanaan pemberian lisensi LSBU;
7. pelaksanaan penyetaraan tenaga kerja konstruksi asing; dan
8. pengelolaan aplikasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, LPJK dibantu oleh Sekretariat LPJK yang berada di Kementerian PUPR yang secara administratif bertanggung jawab kepada direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang jasa konstruksi, yakni Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Pemimpin Sekretariat LPJK adalah sekretaris direktorat jenderal yang menangani tugas dan fungsi di bidang jasa konstruksi, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Sekretariat LPJK memiliki tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada LPJK. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPJK menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan lpjk;
2. pemberian dukungan administratif kepada lpjk;
3. pemberian dukungan teknis operasional kepada lpjk;
4. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian; dan
5. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat LPJK.

#### **1.4 ISU STRATEGIS**

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bersifat strategis serta lebih menuju ke arah perumusan kebijakan dan standardisasi teknis. Harapan masyarakat konstruksi yang besar terhadap Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam melakukan pembinaan tidak hanya pada lingkup PUPR melainkan pada keseluruhan dunia konstruksi Indonesia sehingga memberi

konsekuensi tanggung jawab yang besar pula khususnya terhadap pencapaian target organisasi.

Isu strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang saat ini diperhatikan/dikedepankan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

#### 1. Implementasi Katalog Elektronik Sektoral

Katalog Elektronik Sektoral merupakan salah satu isu dan fokus utama yang menjadi perhatian di Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, dalam upaya untuk melakukan pencegahan korupsi pada bidang keuangan negara. Pelaksanaan Katalog Elektronik Sektoral menjadi perhatian Bapak Menteri PUPR, selaras dengan **arahan Bapak Menteri PUPR bahwa “e-katalog bertujuan untuk mengamankan dan menyamankan PUPR dalam pengadaan barang/jasa**, dengan e-katalog pengadaan barang/jasa bisa lebih cepat dan transparan, tidak hanya untuk pengadaan barang, tapi juga pengadaan jasa. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi menunjukkan komitmennya dalam pelaksanaan katalog elektronik sektoral melalui kegiatan transaksi e-purchasing di sepanjang tahun 2023. Sebagai hasilnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih Juara 1 Nilai Transaksi E-Purchasing Terbesar TA 2023 kategori Kementerian/ Lembaga dalam E-Purchasing Award 2023. Penghargaan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Temu Bisnis Tahap VI Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), di Jakarta pada 3 Agustus 2023.

Selain itu, atas kerja kerasnya di tahun 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga meraih penghargaan Anugerah Pengadaan 2023 untuk kategori Nilai Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Terbesar dan kategori Nilai Transaksi Belanja Usaha Mikro dan Usaha Kecil Terbesar dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP). Kementerian PUPR juga mengoptimalkan proses PBJ melalui katalog elektronik. Sistem ini dapat mempercepat proses pengadaan dan menghemat waktu dan biaya, jika dibandingkan harus melewati proses lelang konvensional, tetapi tetap mengedepankan pengadaan yang transparan dan akuntabel. Kementerian PUPR juga setiap tahunnya melaksanakan lelang dini yang dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran khususnya dalam pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. Lelang dini merupakan inovasi pelaksanaan tender dengan melakukan penayangan paket sebelum DIPA paket tersebut diterbitkan, sebagai upaya untuk percepatan pelaksanaan tender. Data tahun 2021-2023 menunjukkan, rata-rata per tahun tender dini dapat dilaksanakan untuk 2.007 paket atau

sekitar 48,5% dari 4.142 paket kontraktual PUPR. Tahapan pelaksanaan tender/seleksi ini dilakukan pada bulan Oktober hingga Februari dimulai dengan proses pemaketan, penyiapan readiness criteria dan dokumen persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan tender, dan diakhiri dengan tanda tangan kontrak.

## 2. Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja

Isu yang mengemuka di industri konstruksi pada tahun 2023 adalah dengan disahkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan disahkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja berdampak pada berubahnya sebagian isi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 Jasa Konstruksi, perubahan UU Jasa Konstruksi dijabarkan pada poin-poin berikut:

- a. Terdapat 33 ketentuan perubahan pada UUCK, yang terdiri atas 25 pasal yang diubah dan 8 pasal yang dihapuskan dari ketentuan pada UUKJ;
- b. Ketentuan perubahan tersebut antara lain mencakup pengaturan: Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten; Perijinan Berusaha; Kualifikasi Usaha; Usaha Penyediaan Bangunan (penghapusan); dan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka ditetapkan:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi; Pada PP 14 tahun 2021 dijabarkan beberapa pasal-pasal yang mengalami perubahan sebagai berikut:
  1. Tugas manajemen konstruksi;
  2. Kriteria pekerjaan konstruksi terintegrasi;
  3. Kinerja penyedia jasa;
  4. Standar remunerasi minimal;
  5. Ketentuan penerima jasa;
  6. Alih Teknologi;
  7. Tenaga kerja;
  8. Kerjasama Operasional (KSO);
  9. KSO BUJKA dan BUJK Nasional;
  10. Spesifikasi teknis penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
  11. *Detail engineering design*;
  12. Persiapan penyelenggaraan jasa konstruksi;
  13. Rancangan kontrak kerja konstruksi;
  14. Pemilihan penyedia jasa konstruksi;
  15. Kontrak kerja konstruksi.

- b. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah aturan ini menyesuaikan pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha; dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko substansi penyelenggaraan usaha jasa konstruksi regulasi ini mengatur mengenai penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam hal ini Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyusun beberapa NSPK dalam Bentuk Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri PUPR dengan berpedoman pada peraturan-peraturan sebagaimana yang dimaksud diatas, beberapa NSPK yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi meliputi:

1. Penyusunan Rancangan Substansi Pengadaan Jasa Konstruksi pada Rancangan Revisi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Penyusunan SE Nomor 01/SE/Dk/2022 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Penyusunan Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Akibat Pemutusan Kontrak;
4. Penyusunan Surat Edaran Nomor 17/SE/M/2022 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Revisi Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/SE/M/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

6. Penyusunan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi;
7. Penyusunan Model Dokumen Pemilihan (MDP) Pengadaan Jasa Konstruksi Khusus Ibu Kota Negara (IKN);
8. Penyusunan SE Menteri PUPR Nomor 10/SE/M/2022 tentang Panduan Operasional Tertib Penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Penyusunan SE Menteri PUPR Nomor 16/SE/M/2022 tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Penyusunan Rancangan Kontrak untuk Penunjukan Langsung Jasa Konsultansi Konstruksi.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi berharap NSPK terkait Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi akan mampu menjadi acuan sesuai lingkup pengaturan baik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun pada keseluruhan sektor jasa konstruksi Indonesia dan pihak-pihak terkait. Alur proses pembinaan tertib penyelenggaraan ini menjelaskan seluruh kegiatan yang dimulai dari Rencana Strategis Kementerian PUPR, untuk kemudian dijabarkan ke Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan sampai kepada sasaran dan target Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, kemudian dijabarkan secara detail dalam kegiatan di setiap pembinaan.

3. Pengembangan Sistem Perhitungan SIPASTI V.3.0 dan Penggunaan/ Penerapan SIPASTI  
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Instruksi Menteri PUPR No. 4 Tahun 2022 tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022-2024 (Strategi 3: Pemantapan Keandalan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)). Ada beberapa permasalahan HPS, antara lain:
  - a. Potensi terjadinya penyimpangan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (ketidakakuratan data, kesalahan perhitungan, dan atau indikasi *mark-up*)
  - b. Perbedaan signifikan HPS untuk pekerjaan sejenis dalam lokasi yang berdekatan. (Harga Satuan Pokok **tidak akuntabel** dan perhitungan HPS **tidak sesuai dengan kondisi lapangan**)

- c. Pengembangan Sistem Perhitungan SIPASTI V.3.0 dan Penggunaan/Penerapan SIPASTI. (proses bisnis manual/*offline* dan Data, Dokumen, Proses belum terintegrasi dan terekam dengan baik)

Adapun manfaat penggunaan SIPASTI adalah Mempercepat dan mempermudah dari aspek waktu, biaya, serta sumber daya manusia untuk mendapatkan Harga Satuan Pokok Wilayah sebagai basis data penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD). Menyeragamkan Harga Satuan Pokok Wilayah dalam lokasi pekerjaan yang sama yang digunakan oleh PPK sebagai basis data penyusunan HSD. Terjaminnya kesesuaian sistem perhitungan HPS dengan ketentuan dalam Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proses bisnis pembahasan, penetapan, dan reviu HPS lebih cepat, mudah, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik. *Early Warning System* jika terjadi anomali dalam penentuan Harga Satuan Pokok, HSD, dan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) untuk pekerjaan sejenis di lokasi yang berdekatan.

Pengembangan SIPASTI versi 3 memiliki peningkatan kehandalan fitur. Fitur Login menggunakan SSO (*Single Sign Out*), *Dashboard* telah berisi Informasi Umum HPS Data Progres dan Grafik HPS serta *Link* Pedoman dan Video Operasional.

Fitur Katalog Harga Satuan Wilayah telah terintegrasi dengan E-Katalog LKPP serta terdapat data Hasil Survei oleh Balai Teknis. Fitur Perhitungan HPS mengalami perubahan signifikan diantaranya seluruh perhitungan dilakukan menggunakan sistem, tersedia standarisasi bidang Umum, SDA, CK dan Perumahan (normatif), Tersedia *template* perhitungan AHSP (ABCP), Tersedia fitur Analisis produktivitas, Tersedia fitur Analisis HSD material, Tersedia fitur Analisis HSD peralatan, Tersedia *template* tipologi jenis pekerjaan, dan Dapat digunakan untuk penyusunan HPP/EE. Pada proses pembahasan dan Reviu HPS terdapat perubahan Bisnis Proses pembahasan HPS sesuai regulasi dan Revi HPS sesuai regulasi dan terintegrasi dengan LPSE. Database HSD & HSP akan tersedia data seluruh paket penerapan 2024. Di akhir fitur Monitoring HSD dan HSP telah terdapat fitur *Early Warning System* dan Otomasi sistem untuk mengecek anomali HPS.

4. Belum Optimalnya Pembinaan dan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Beberapa Isu strategis yang dihadapi dalam Pembinaan dan Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Masih Ada OPD yang Belum Mempunyai Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sub Urusan Jasa Konstruksi

Pada Tahun 2023 ini, masih terdapat 5 (lima) Provinsi yang belum mempunyai OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi yaitu Provinsi Aceh, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, secara nasional untuk Provinsi sudah terdapat 26 OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi provinsi yang sudah setingkat

eselon 3 (tiga) dengan prosentase 68%, serta 4 (empat) provinsi OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi provinsi setingkat eselon 4 (empat) dengan prosentase 11%, dan 3 (tiga) provinsi OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi provinsi berupa non struktural atau hanya berupa tugas dan fungsi jasa konstruksi dengan presentase 8%.

Untuk kabupaten/Kota terdapat 176 kabupaten/kota (prosentase 34%) yang OPD Sub Urusan Jasa Konstruksinya setingkat eselon 3 (tiga), dan 177 kabupaten/kota yang OPD Sub Urusan Jasa Konstruksinya setingkat eselon 4 (empat) dengan prosentase 35%, serta 27 kabupaten/kota yang OPD Sub Urusan Jasa Konstruksinya merupakan non struktural atau hanya berupa tugas dan fungsi jasa konstruksi dengan prosentase 5%. Namun masih terdapat 135 kabupaten/kota belum ada OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi dengan prosentase 26%.

Isu ini dianggap penting dikarenakan banyaknya pembangunan infrastruktur di daerah yang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasannya dalam rangka meningkatkan kualitas konstruksi di daerah. Belum optimalnya peran OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi dalam pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi di daerah dikarenakan belum adanya Struktur atau unit kerja tersendiri yang menyelenggarakan suburusan Jasa Konstruksi selain itu di daerah seringkali terjadi perpindahan atau mutasi pejabat tanpa ada *handover* atau *sharing* tugas terlebih dahulu sehingga pejabat yang baru belum mendapatkan pengetahuan dalam menyelenggarakan suburusan jasa konstruksi khususnya melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Perlunya peran khusus dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) untuk membantu pendampingan OPD yang belum terbentuk SubUrusan jasa konstruksi nya.

#### b. Terjadinya Perubahan dan Perpindahan Anggota antar Asosiasi

Apabila dilihat dari jumlah asosiasi yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi, jumlahnya masih lebih banyak asosiasi yang belum terakreditasi, yaitu baru sejumlah 35% asosiasi jasa konstruksi yang sudah terakreditasi.

Hal ini dikarenakan masih banyak asosiasi yang belum memenuhi 5 (lima) persyaratan utama yaitu: a. data dan sebaran anggota b. sarana dan prasarana c. pemberdayaan kepada anggota d. pemilihan pengurus secara demokratis e. dan pelaksanaan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Pertambahan asosiasi terakreditasi baik asosiasi badan usaha jasa konstruksi terakreditasi maupun asosiasi profesi jasa konstruksi tidak signifikan dan sangat sedikit. Awal Akreditasi Asosiasi yang pertama kali oleh Menteri PUPR yang menghasilkan Keputusan Menteri PUPR No 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi Dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi yang ditetapkan tanggal 4 September 20230 dengan rincian

hasil 12 Asosiasi Badan Usaha terakreditasi, 25 Asosiasi Profesi terakreditasi dan 1 Asosiasi terkait rantai pasok konstruksi Terakreditasi. Update per Desember 2023 saat ini terdapat 15 Asosiasi Badan Usaha terakreditasi, 33 Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi terakreditasi, dan masih hanya ada 1 Asosiasi terkait Rantai pasok Konstruksi terakreditasi. Artinya hanya terdapat penambahan 3 Asosiasi Badan Usaha terakreditasi, 8 Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi terakreditasi, dan tidak terdapat penambahan Asosiasi terkait Rantai pasok Konstruksi yang terakreditasi. Hal ini disebabkan kurangnya komitmen asosiasi jasa konstruksi khususnya terhadap salah persyaratan akreditasi yaitu pemberdayaan kepada anggotanya. Perlunya ketegasan terkait pengaturan pemberdayaan asosiasi kepada anggotanya atau yang lebih dikenal pengembangan usaha berkelanjutan.

c. Keterbatasan jumlah asesor badan usaha

Saat ini baru tersedia 330 asesor badan usaha jasa konstruksi yang lulus uji kompetensi dan masih dibutuhkan jumlah asesor yang cukup untuk dapat melakukan sertifikasi kepada lebih kurang 140.000 badan usaha jasa konstruksi.

Berdasarkan hasil pelaksanaan uji kompetensi asesor badan usaha jasa konstruksi, terdapat 330 asesor yang telah lulus dan dinyatakan kompeten oleh panitia teknis uji kompetensi (PTUK). Selanjutnya berdasarkan koordinasi PTUK dengan BNSP, masih perlu ada penyesuaian terhadap sertifikat yang telah diterbitkan oleh PTUK berdasarkan SE LPJK Nomor 7. Hal-hal yang perlu disesuaikan sebagai berikut:

1. Jam kerja;
2. Subklasifikasi;
3. Klasifikasi; dan
4. Sertifikat berbentuk digital

Berdasarkan poin di atas, 330 asesor yang telah dinyatakan kompeten oleh PTUK tetap dapat melakukan penilaian kesesuaian terhadap BUJK, karena 330 asesor tersebut sudah tercatat di LPJK.

Adanya tambahan asosiasi badan usaha terakreditasi dari 72 di tahun 2021 menjadi 83 asosiasi badan usaha di tahun 2023 dimana asosiasi badan usaha terakreditasi akan membentuk Lembaga sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan mengajukan lisensi LSBU. Salah satu persyaratan pembentukan LSBU yaitu asesor badan usaha tentu artinya masih diperlukan pelatihan asesor badan usaha.

Permasalahan yang lain sebanyak 242 Sertifikat ABU akan habis masa berlaku tgl 18 Oktober 2024 dan 88 Sertifikat ABU akan habis masa berlaku pada Januari 2025, perlu dilakukan RCC untuk ABU eksisting dan pelatihan ABU baru. Terdapat 3 LSBU yang sudah operasional tidak memiliki ABU internal (GABPEKNAS, GAPKAINDO dan SKM). Dan terdapat 3 Calon LSBU tidak memiliki ABU Internal (PERKONINDO,

PERKOPINDO dan APPEKNAS). ABU Eksternal yang digunakan LSBU sudah melekat pada beberapa LSBU (melebihi kapasitas kemampuan orang/hari). Selain itu belum adanya modul pelatihan untuk calon asesor badan usaha yang baru serta belum updatenya modul RCC asesor badan usaha yang masih perlu dimutakhirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru. SKK ABU sampai dengan saat ini belum ada pembaharuan registrasi SKK maupun perubahan menjadi SKKNI (jika tetap oleh PTUK maka butuh SKK khusus, jika ingin merubah nomenklatur menjadi Auditor maka butuh diskresi Menteri).

d. Penerapan Sanksi LSBU dan SBU yang tidak memenuhi persyaratan

Sehubungan dengan banyaknya Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2021 terkait adanya rangkap jabatan pada badan usaha lain untuk tenaga kerja tetap yang tidak dilaporkan pengantiannya dan terlambat melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama maupun komitmen mengenai penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) perlu pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi, Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, Badan Usaha Asing Berbadan Hukum Indonesia yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal sesuai peraturan undang-undangan.

Selain itu LSBU juga harus memenuhi persyaratannya dan melakukan kewajibannya agar tidak melanggar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154A, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Penerapan Sanksi ini sebelum dilaksanakan perlu dilakukan sosialisasi pelanggaran pelanggaran yang dilakukan dan pengenaan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan agar terdapat penyamaan persepsi terkait pemberlakuan pengenaan sanksi administratif.

Penerapan sanksi administratif perlu dianalisis dan diberikan waktu dalam rangka untuk memberikan informasi pembinaan dan melakukan sosialisasi berkala kepada badan usaha jasa konstruksi terkait adanya penerapan sanksi administratif, mendata seberapa besar dampak apabila sanksi diterapkan utamanya yang mengakibatkan putus kontrak dan dapat mengganggu jalannya dunia konstruksi keseluruhan serta melakukan evaluasi dan internalisasi untuk mencari sumber permasalahannya banyaknya kondisi tidak memenuhi persyaratan perizinan.

- e. Belum Optimal Pengelolaan Rantai Pasok Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi dalam Pelaksanaan Pembangunan IKN dan Nasional

SIMPK belum dimanfaatkan secara optimal dalam Pembangunan IKN dikarenakan SIMPK digunakan secara umum untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR sehingga dibutuhkan fitur khusus untuk mendukung Pembangunan IKN.

Dukungan sistem rantai pasok jasa konstruksi dengan memanfaatkan teknologi informasi menjadi sebuah keniscayaan dalam mendukung keberlanjutan penyelenggaraan infrastruktur yang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan kompleksitas pengelolaan rantai pasok jasa konstruksi khususnya terhadap pengelolaan sumber daya konstruksi berupa material dan peralatan konstruksi (MPK) yang dihadapkan pada ketidakpastian pasokan, permintaan, dan informasi (uncertainty of supply, demand, and information) dan kewenangan pengelolannya lintas K/L/D/I.

Oleh karena itu perlu pendekatan komprehensif melalui suatu manajemen rantai pasok (supply chain management/SCM) yang merupakan suatu usaha koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan guna memadukan aktivitas penciptaan produk dalam suatu rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi operasi, kualitas, dan layanan kepada pengguna dalam rangka mendapatkan keunggulan kompetitif berkelanjutan bagi semua pihak berbasis sistem informasi.

Saat ini, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah mengembangkan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT) yang terdiri dari beberapa aplikasi dalam rangka membangun Big Data terkait sumber daya konstruksi. Salah satu aplikasi yang secara khusus menyediakan layanan data dan informasi supply-demand MPK yaitu SIMPK. Penyediaan data dan informasi supply-demand MPK di SIMPK ditujukan untuk menjadi sumber referensi bagi semua pihak penyelenggara konstruksi mulai dari tahap perencanaan, tahap pengadaan, dan tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi khususnya di Kementerian PUPR.

Dalam hal pembangunan IKN Tahap I, Kementerian PUPR sampai saat ini belum memiliki sistem pengelolaan rantai pasok MPK di SIMPK yang secara khusus untuk mendukung seluruh tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi IKN. Ketersediaan data sebaran pasokan (supply) MPK tiap wilayah di SIMPK saat ini untuk MPK Utama belum lengkap dan data kebutuhan (demand) MPK Kementerian PUPR belum secara rinci untuk tiap paket pekerjaan terkontrak berdasarkan dokumen RAB dan AHSP. Sehingga, penerapan dan pemanfaatan SIMPK sebagai sistem pengelolaan rantai pasok MPK untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN tahap I belum secara optimal dimanfaatkan.

- f. Kementerian PUPR belum memiliki analisis kebutuhan MPK berdasarkan kondisi lapangan.

Kementerian PUPR telah memiliki analisis kebutuhan MPK berdasarkan kondisi lapangan yang sifatnya uji petik terhadap beberapa paket pekerjaan konstruksi. Selain itu untuk mengetahui estimasi kebutuhan (demand) MPK di Kementerian PUPR dilakukan melalui perhitungan koefisien kebutuhan MPK per Rp. 1 Triliun terhadap data anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR (level meso).

Untuk menghitung kebutuhan MPK secara lebih rinci tiap paket pekerjaan konstruksi (level mikro) telah dikembangkan fitur perhitungan kebutuhan MPK dan TKDN di SIMPK. Pelaksanaan uji petik perhitungan kebutuhan MPK terhadap beberapa paket pekerjaan konstruksi terkontrak telah dilakukan. Namun untuk pelaksanaan perhitungan kebutuhan secara lebih rinci perlu dilakukan pengisian data-data dari dokumen RAB dan AHSP tiap paket pekerjaan, baik dari dokumen HPS yang disusun oleh PPK maupun dokumen penawaran Penyedia Jasa terkontrak. Hal ini belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan dikarenakan jumlah paket pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR rata-rata berjumlah 7.000-10.000 paket per tahun. Oleh karena itu sampai saat ini perhitungan kebutuhan MPK secara keseluruhan melalui pendekatan anggaran belum dapat mencerminkan data kebutuhan MPK yang sebenarnya.

- g. Belum optimalnya koordinasi antara Kementerian PUPR dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan terkait jalur logistik terutama untuk pembangunan infrastruktur IKN.

Kami telah dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi di TA 2023 dan 2024 yang meliputi melaksanakan rapat-rapat koordinasi secara berkala sesuai kebutuhan dengan seluruh stakeholder yang memiliki kewenangan terkait jalur logistik terutama untuk pembangunan infrastruktur IKN antara lain OIKN, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan, Dinas Provinsi, Kota/Kabupaten terkait.

- h. Intervensi pemerintah dalam menahan laju kenaikan harga material belum optimal.

Kenaikan harga material yang disebabkan adanya lonjakan permintaan dan kurangnya pasokan dalam periode tertentu merupakan suatu hukum pasar yang selalu berlaku. Namun demikian, pemerintah harus hadir melalui instrumen regulasi untuk tetap menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan dengan harga yang wajar. Adanya pembangunan IKN yang secara masif dan bersamaan mulai dilaksanakan pada pertengahan Tahun 2022 sampai sepanjang Tahun 2023 menyebabkan lonjakan permintaan dan harga material konstruksi khususnya yang akan memasok ke wilayah Kalimantan Timur. Hal ini tidak serta merta akibat lonjakan permintaan saja tetapi juga disebabkan beberapa isu strategis yang ada antara lain kepastian/jaminan pembayaran,

ketersediaan jalur logistik dan kapal tongkang untuk mengangkut material konstruksi yang harus berkompetisi dengan komoditas strategis dan bernilai tinggi lainnya seperti bahan pokok, batu bara, nikel, bauxite, pasokan bahan bakar solar, ketersediaan fasilitas pelabuhan atau dermaga di Kalimantan, akses dari pelabuhan atau dermaga di Kalimantan ke stockyard lokasi proyek IKN.

- i. Pemerintah belum menyusun peraturan khusus pemanfaatan garis pantai untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN.
- j. Pemerintah belum optimal dalam merencanakan kebutuhan air untuk industri yang mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN Tahap I.
- k. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi belum optimal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja rantai pasok dalam Pembangunan infrastruktur IKN Tahap I.
- l. Belum Optimalnya dukungan Asosiasi dalam penginputan data Supply-Demand pada Sistem Informasi Material Peralatan Konstruksi
- m. Belum Optimalnya Pelaksanaan Penilaian Kinerja Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi di Tingkat Proyek dan Badan Usaha (level mikro)
- n. Belum Tersedianya Data Material dan Peralatan Konstruksi yang Cukup untuk Mendukung Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian PUPR

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian PUPR menyadari bahwa penggunaan big data dalam pemerintahan adalah sangat penting, terutama untuk penyediaan informasi real-time, pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan acuan monitoring dan evaluasi aktivitas. Big data yang didapatkan dari SIMPK terdapat data, indikator, serta variabel secara time series yang selanjutnya akan dilakukan pengolahan untuk menganalisis data keseimbangan supply-demand SDMPK. Realisasinya pelaksanaan pencatatan SDMPK masih sangat rendah dengan di lingkungan badan usaha jasa konstruksi.

Sangat rendahnya pencatatan di SIMPK disebabkan Balai Teknis di Kementerian PUPR belum melakukan pencatatan peralatan konstruksi yang dimiliki ke dalam SIMPK. Oleh karena itu, Para satker/PPK dan penyedia jasa konstruksi (kontraktor, subkontraktor, produsen material) belum terinformasi mengenai regulasi terkait pencatatan SDMPK sebagaimana terdapat pada Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa material dan peralatan konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi harus telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri serta tercatat dalam SIMPK.

Produsen material dan pemilik peralatan di daerah yang digunakan pada paket-paket pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR belum banyak tercatat di SIMPK. Hal ini dikarenakan banyak material konstruksi dipasok dari tingkat distributor/supplier

setempat, sementara Pemohon Pencatatan Material Konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2021 yaitu produsen material. Begitu juga untuk peralatan konstruksi banyak dipasok dari Badan Usaha/Perusahaan Rental/Kepemilikan Perseorangan setempat yang belum mengetahui regulasi terkait Pencatatan Peralatan Konstruksi.

- o. Belum optimalnya penerapan teknologi *Building Information Modelling* (BIM) pada proyek konstruksi di Kementerian PUPR
- p. Belum Optimalnya Pemetaan Penerapan Teknologi Konstruksi Secara Rutin dan Berkala
- q. Belum Optimalnya Pembinaan Usaha Kecil Mikro dan Koperasi di Daerah
- r. Belum ditetapkan nya Konsep Peraturan Menteri PUPR tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
- s. Rendahnya Capaian TKDN PUPR

Pada tahun 2023 Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi bersama dengan 7 (tujuh) Balai Jasa Konstruksi Wilayah telah melakukan verifikasi capaian TKDN terhadap 57 paket pekerjaan konstruksi uji petik, dengan hasil verifikasi didapatkan bahwa capaian nilai TKDN sebesar 62,69% dan nilai PDN sebesar 90,29% serta nilai Impornya sebesar 9,71%, Masih rendahnya capaian TKDN tersebut dikarenakan Tim verifikator menemukan kesulitan dalam memperoleh data *invoice* dan terdapat pekerjaan yang tidak dapat dirinci sehingga tidak dapat dinilai TKDN nya, selain itu dikarenakan masih banyak ditemukan penggunaan produk dalam negeri/UMKM yang belum memiliki sertifikat TKDN dan/atau memiliki sertifikat TKDN yang telah kadaluarsa (nilai TKDN produk = 0%), sehingga sangat mengurangi nilai capaian TKDN pada paket pekerjaan konstruksi. Para produsen material dan peralatan konstruksi serta UMKM bidang konstruksi harus segera mensertifikasi TKDN-kan produknya karena masih terdapat material dan peralatan konstruksi serta UMKM bidang konstruksi yang digunakan pada paket pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR belum memiliki sertifikat TKDN belum memiliki sertifikat TKDN belum maksimalnya koordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk melakukan upaya percepatan sertifikasi TKDN produk melalui Balai-balai Kementerian Perindustrian dan Dinas Perindustrian.

- t. Pengawasan pemenuhan komitmen dan kegiatan usaha BUJKA

Pengajuan SBU telah dapat dilaksanakan dengan baik melalui PB-UMKU pada sistem OSS. Namun terdapat hal yang perlu diakomodir kemudian yaitu perubahan data pada SBU. Hingga saat ini masih belum tersedia tombol perubahan pada sistem OSS yang dapat digunakan oleh BUJK untuk mengajukan perubahan data, baik data administrasi maupun data yang membutuhkan asesmen seperti perubahan TTK (PJB),

PJTBU, PJSKBU). Jika dibuka kesempatan untuk mengajukan perubahan secara manual diluar sistem OSS pun tidak menyelesaikan masalah karena tetap diperlukan penerbitan kembali SBU yang mana penerbitan SBU harus melalui sistem OSS.

#### 5. Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi

Masih rendahnya jumlah tenaga kerja konstruksi yang Kompeten yang bersertifikat menjadi salah satu isu strategis Kementerian PUPR Khususnya Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Untuk menjawab permasalahan yang menjadi Isu strategis tersebut, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi telah melaksanakan beberapa kegiatan yang bertujuan menyelesaikan isu strategis tersebut sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh Direktur Kompetensi dengan Direktur Jenderal Bina Konstruksi di tahun 2023 ini. Diantaranya adalah :

1. Percepatan Sertifikasi TKK oleh BJKW I-VII yang melibatkan BUJK, khususnya BUMN Karya;
2. Percepatan Sertifikasi secara ON-SITE bagi 8.235 TKK yang saat ini sedang bekerja di IKN, oleh BJKW & BUJK/BUMN;
3. Pemanfaatan Aplikasi SIM-KOMPETENSI melalui feature *Link & Match* khusus Lowongan Pekerjaan di IKN & Alumni Pelatihan Program IKN;
4. Penyusunan SKKNI dan Modul yang menunjang pelatihan.

#### 6. Kegiatan Konstruksi Indonesia

Perkembangan industri konstruksi Indonesia bergerak sangat cepat pada masa sepuluh tahun terakhir ini. Pembangunan infrastruktur dilakukan di berbagai bidang baik transportasi, sumber daya air, bangunan gedung, perumahan, maupun fasilitas lainnya. Pembangunan infrastruktur pendukung kemudahan konektivitas antar wilayah di Indonesia menjadi salah satu fokus utamanya. Pertumbuhan jalan tol di Pulau Jawa, salah satunya, tercatat naik sebesar 1.019,03 km dari 784,06 km di tahun 2014 menjadi 2.652,72 km di tahun 2019. Hampir seluruh ibukota provinsi di Pulau Jawa yaitu Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, dan Surabaya, kecuali Yogyakarta, saat ini sudah terhubung dengan infrastruktur jalan tol.

Seperti halnya sektor industri lain di dunia, industri konstruksi secara global pada saat ini juga sedang menghadapi dua tantangan besar, yaitu isu digitalisasi dan keberlanjutan. Khususnya isu keberlanjutan sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau (SDG), industri konstruksi yang dikenal sebagai industri yang memiliki dampak sangat besar terhadap lingkungan, baik dari sisi proses perubahan lingkungan alam menjadi lingkungan terbangun, maupun dari sisi proses transformasi bahan mentah yang berasal dari sumber daya alam menjadi produk-produk konstruksi. Industri konstruksi juga membutuhkan energi yang sangat besar dalam proses-proses konstruksi, menggunakan bahan-bakar fosil dan menghasilkan emisi karbon yang berperan besar dalam perubahan iklim global.

Di Indonesia, sektor konstruksi merupakan sektor yang sangat penting dan strategis serta berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional, melalui kontribusinya terhadap PDB yang pada bulan Juni 2023 mencapai 9,1%. Industri konstruksi di Indonesia memegang peranan penting dalam penyediaan infrastruktur nasional serta berbagai aset property serta perumahan. Pasar konstruksi di Indonesia tetap menarik bagi para pelaku industri konstruksi nasional dan internasional.

Pemikiran digital telah menjadi kunci utama inovasi dan kemajuan bidang pendidikan dan praktik arsitektur. Arsitek yang menerima perubahan paradigma ini tidak hanya sekedar mendesain bangunan. Arsitek bertugas untuk membentuk masa depan lingkungan binaan. Pemikiran digital memungkinkan arsitek untuk mendorong batas-batas desain yang ada saat ini, mengoptimalkan keberlanjutan, meningkatkan presisi, dan menyederhanakan proses konstruksi. Penggunaan berbagai perangkat digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan praktik arsitektur di era modern. Kehadiran teknologi pada perangkat digital menawarkan peluang aksesibilitas, interaktivitas, personalisasi, dan jangkauan global. Transformasi digital telah mengubah cara kita memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi, sangatlah penting bagi para pendidik, pengambil kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan untuk memanfaatkan potensi dari alat-alat tersebut. Meskipun kehadiran teknologi pada perangkat digital menawarkan potensi yang sangat besar, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya termasuk masalah kesetaraan penguasaan/keahlian penggunaan perangkat digital, karena tidak semua memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan perangkat digital. Oleh karena itu proses kalibrasi menjadi salah satu hal penting yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan berbagai perangkat digital agar selaras dengan persyaratan proyek dan tujuan arsitektur tertentu, sehingga efisiensi kerja perangkat sebagai sistem kolaboratif dapat tercapai dengan optimal. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi digital, para arsitek harus mengembangkan kemampuan berpikir digital yang dimiliki agar tetap menjadi yang terdepan di bidangnya. Dengan memanfaatkan potensi perangkat dan metodologi digital, arsitek tidak hanya merancang struktur namun juga menciptakan ruang yang dinamis, berkelanjutan, dan visioner yang menentukan bentang arsitektur masa depan. Di era perubahan yang cepat dan tidak terbatas, pemikiran digital menjadi arahan utama untuk memandu para arsitek menuju penciptaan lingkungan binaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

## **1.5 SISTEMATIKA LAPORAN**

Setelah pembahasan Bab I “Pendahuluan” yang meliputi penjelasan umum organisasi, aspek strategis dan isu/permasalahan utama yang sedang dihadapi Direktorat Jenderal Bina

Konstruksi, sistematika selanjutnya dari penyajian laporan kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut.

### ***Bab II Perencanaan Kinerja***

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar perjanjian kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Renstra Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2020—2024, PK Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2023, dan target 2023 menurut renstra.

### ***Bab III Kapasitas Organisasi***

Pada bab ini diuraikan mengenai pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang dimiliki, mencakup SDM, sarana dan prasarana, dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Pada bab ini juga dijelaskan mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi karena faktor sumber daya yang dimiliki.

### ***Bab IV Akuntabilitas Kinerja***

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2023, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran, pemanfaatan laporan kinerja, penghargaan, dan hasil survey kepuasan masyarakat.

### ***Bab V Penutup***

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

### ***Lampiran***

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Rencana Aksi Kinerja Per Program 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, Daftar Pertanyaan Kuesioner Pemanfaatan laporan kinerja, Daftar Penghargaan yang Diperoleh, Dokumentasi Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2023.

## BAB 2

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini merupakan amanat Reformasi Birokrasi yang mengacu pada sejumlah produk kebijakan dan produk perencanaan jangka panjang, baik nasional, sektor PUPR, pembinaan Jasa Konstruksi, dan didasarkan pada hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2020-2024 disusun sebagai dokumen perencanaan dan pedoman acuan penganggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk periode lima tahun mendatang yang berisi tujuan, strategi, program, dan kegiatan strategis yang perlu dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dalam jangka waktu 5 tahun. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi saat ini, dimana terdapat kekuatan dan kelemahan, serta kondisi eksternal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang ditandai berbagai isu penting yang dapat menjadi peluang maupun ancaman bagi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ke depannya.

Adapun sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis berpedoman kepada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Dalam implementasinya melalui jbaran program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Renstra Direktorat Jenderal Bina Konstruksi harus memiliki kemampuan untuk merespon pada perkembangan terkini yang terjadi, baik pada lingkungan internal dan lingkungan eksternal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi agar terciptanya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Kementerian PUPR.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melaksanakan berbagai program melalui unit kerjanya untuk mencapai sasaran serta mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang telah dituangkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Konstruksi periode 2020-2024. Adapun visi dan misi tersebut yaitu: (1) Mempercepat dan Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, (2) Pembangunan Sumber daya Manusia (SDM), (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Reformasi Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga turut mendukung

pelaksanaan salah satu misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu misi nomor 4 (empat): “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.”

Beberapa hal yang dapat disampaikan terkait misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didukung oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah sebagai berikut:

#### A. Tujuan dan Sasaran

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendukung 2 (dua) sasaran strategis pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu SS.4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan SS.5 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya. Kedua indikator dari masing-masing sasaran strategis diatas yaitu IKSS.4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan IKSS.5 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi. Dalam mendukung sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi dengan menyelenggarakan 2 (dua) program yaitu: (1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan (2) Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program yang hendak dicapai. Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai sebagai output dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai selama periode 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.

Indikator Kinerja Program yang menjadi dasar pencapaian Sasaran Program di atas yaitu:

1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
2. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi; dan
3. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR.

Program ini merupakan gambaran umum kondisi yang akan dicapai di akhir perencanaan pada tahun 2024, dimana seluruh infrastruktur yang terbangun memiliki kualitas konstruksi yang tinggi dengan dukungan kualitas sumber daya konstruksi sehingga infrastruktur terbangun memiliki kehandalan sebagai sarana bagi berlangsungnya berbagai aktivitas seluruh sendi kehidupan, terutama aktivitas ekonomi dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan produktivitas masyarakat dan bangsa. Untuk mewujudkan Program

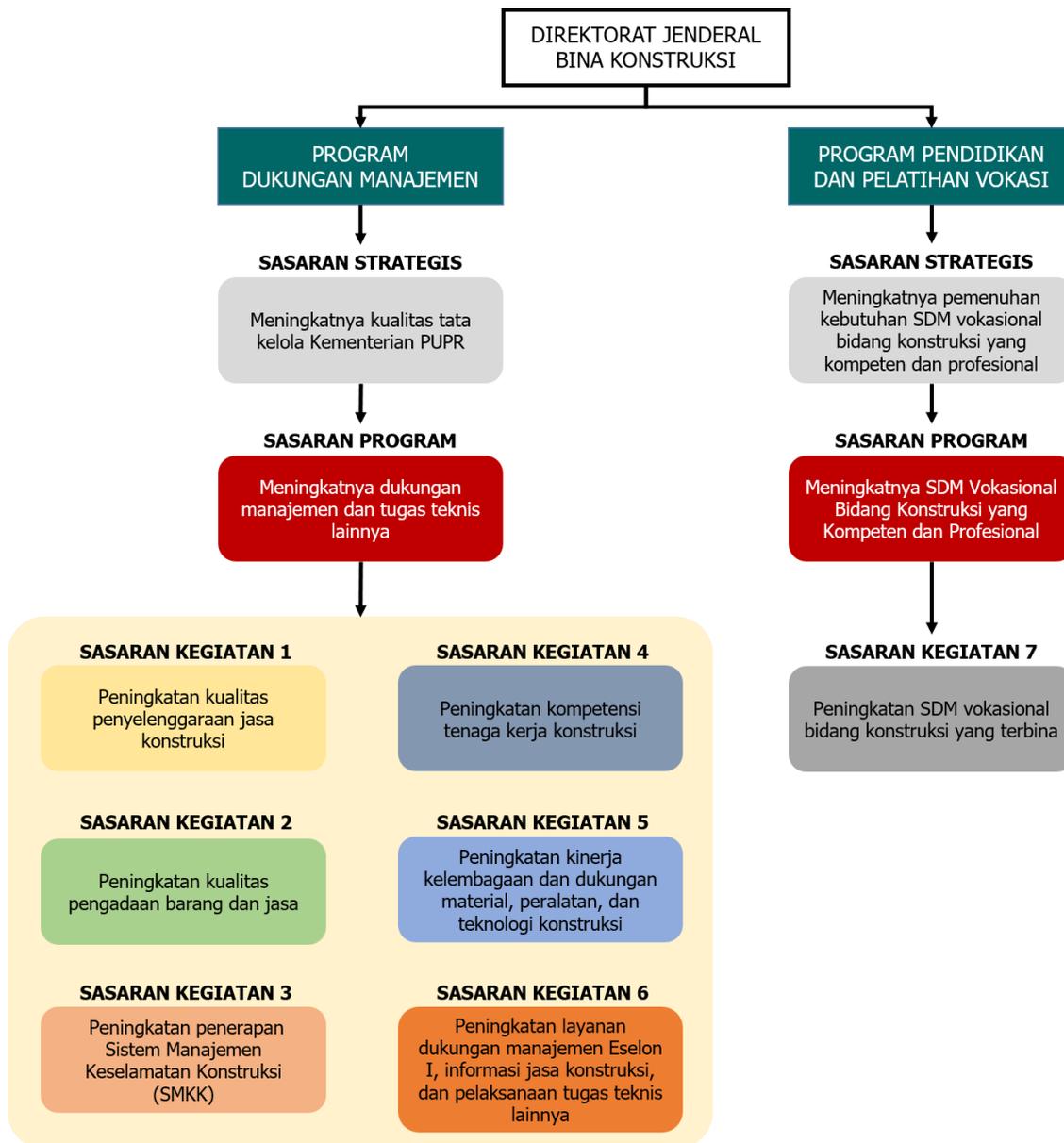
tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7 (tujuh) sasaran kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
3. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa;
4. Meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
5. Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;
6. Meningkatkan kinerja kelembagaan, dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi; serta
7. Meningkatkan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

#### B. Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran program yang telah disebutkan diatas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didukung dengan pencapaian 7 (tujuh) sasaran kegiatan yaitu, yaitu:

1. Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
3. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa;
4. Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
5. Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;
6. Peningkatan kinerja kelembagaan dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi; dan
7. Peningkatan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.



**Gambar 2. 1 Peta Strategis DJBK**  
 Sumber: Dokumen Rencana Strategis DJBK Tahun 2020-2024

### 2.1.1 VISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 untuk menjadikan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian PUPR menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam sasaran Kementerian PUPR sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang PUPR periode tahun 2020-2024, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024.

### 2.1.2 MISI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai Unit Organisasi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
6. Pelaksanaan dan pelayanan pengadaan barang/jasa Kementerian;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

### 2.1.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi pembinaan konstruksi ditujukan untuk mendukung percepatan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi (1) meningkatnya pengelolaan sumber daya air, (2) meningkatnya konektivitas jalan nasional, dan (3) meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi. Arah kebijakan dan strategi digunakan sebagai landasan bagi arahan kegiatan pembinaan jasa konstruksi, khususnya untuk pembangunan bidang konstruksi yang merupakan prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan maka diperlukan upaya terintegrasi dalam fokus dan lokus yang menjamin terlaksananya kegiatan pembinaan yang lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung percepatan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis tersebut, maka disusun 7 (tujuh) arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi

Arah kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi diarahkan pada upaya peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Pengelolaan NSPK sistem penyelenggaraan konstruksi yang meliputi penyiapan bahan penyusunan, pembinaan serta pemantauan dan evaluasi penerapan NSPK sistem penyelenggaraan konstruksi; dan
  - b. Pembinaan penerapan standar kontrak kerja konstruksi.
2. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa

Kebijakan pembinaan kualitas pengadaan jasa konstruksi diarahkan pada upaya peningkatan jumlah tender/seleksi tepat waktu, penurunan jumlah sanggah dan sanggah banding, penurunan jumlah pengaduan, penurunan jumlah penetapan pemenang lelang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar, peningkatan kematangan kelembagaan UKPBJ serta peningkatan kualitas penyediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi. Strategi yang dilaksanakan meliputi:

- a. Pengelolaan dan sosialisasi NSPK terkait pengadaan jasa konstruksi;
  - b. Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan jasa konstruksi;
  - c. Perkuatan UKPBJ dan UPTPBJ/Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yang bertugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya dibidang pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
  - d. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi;
  - e. Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI);
  - f. Pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi;
  - g. Penyediaan sistem informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR; dan
  - h. Penyediaan sistem SIKAP dan E-Pengalaman.
3. Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Kebijakan pembinaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) diarahkan pada upaya penurunan tingkat kecelakaan konstruksi pada proyek-proyek strategis. Strategi yang dilaksanakan meliputi:

- a. Penerbitan permen tentang penyelenggaraan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum;
- b. Memastikan komponen biaya/item pekerjaan penyelenggaraan k3 dan keselamatan konstruksi dalam daftar kualitas dan harga (bill of quantity);
- c. Memastikan peralatan pekerjaan telah memenuhi standar kelayakan alat;
- d. Pembentukan Komite keselamatan konstruksi (K2K);

- e. Pelaksanaan investigasi kecelakaan konstruksi;
  - f. Memastikan penggunaan material yang memenuhi standar mutu yang telah disyaratkan;
  - g. Memastikan setiap pekerjaan konstruksi telah memenuhi metode kerja yang telah teruji; dan
  - h. Peningkatan kapasitas manusia dengan melaksanakan bimbingan Teknis SMK3 konstruksi dan pelatihan yang terkait pekerjaan konstruksi.
4. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi
- Kebijakan pembinaan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi diarahkan pada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui strategi berikut:
- a. Peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dengan meningkatkan dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi;
  - b. Peningkatan kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi;
  - c. Peningkatan kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi;
  - d. Peningkatan kecukupan asesor kompetensi konstruksi; dan
  - e. Peningkatan kecukupan instruktur bidang konstruksi.
5. Peningkatan kinerja kelembagaan, dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi
- Arah kebijakan Peningkatan kinerja kelembagaan, dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi diarahkan pada upaya peningkatan kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat urusan jasa konstruksi serta penyediaan data rantai pasok MPK, teknologi dan TKDN melalui strategi sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan akreditasi asosiasi perusahaan, pelaksanaan lisensi lembaga sertifikasi BUJK, pelaksanaan akreditasi asosiasi profesi, pelaksanaan registrasi LPPK, pelaksanaan evaluasi kinerja lembaga, dan pengembangan kerjasama antar lembaga; dan
  - b. Pelaksanaan registrasi dan publikasi material dan peralatan konstruksi, pelaksanaan pembinaan penerapan standar mutu material dan peralatan konstruksi, pelaksanaan pembinaan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi dalam negeri, dan pelaksanaan pembinaan penerapan inovasi teknologi konstruksi.
6. Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
- Arah kebijakan peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dilakukan dengan strategi sebagai berikut:
- a. Pelayanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; dan

- b. Penyediaan informasi jasa konstruksi.
7. Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional

Arah kebijakan peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional yang dilakukan dengan strategi yaitu penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan terhadap SDM vokasional.

#### **2.1.4 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN**

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendukung 2 (dua) sasaran strategis pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu SS.4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan SS.5 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya. Kedua indikator dari masing-masing sasaran strategis diatas yaitu IKSS.4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan IKSS.5 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi. Dalam mendukung sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi dengan menyelenggarakan 2 (dua) program yaitu: (1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan (2) Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program yang hendak dicapai. Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai sebagai output dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai selama periode 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan
2. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.

Indikator Kinerja Program yang menjadi dasar pencapaian Sasaran Program di atas yaitu:

1. Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
2. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi; dan
3. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR.

Program ini merupakan gambaran umum kondisi yang akan dicapai di akhir perencanaan pada tahun 2024, dimana seluruh infrastruktur yang terbangun memiliki kualitas konstruksi yang tinggi dengan dukungan kualitas sumber daya konstruksi sehingga infrastruktur terbangun memiliki kehandalan sebagai sarana bagi berlangsungnya berbagai aktivitas seluruh sendi kehidupan, terutama aktivitas ekonomi dalam rangka peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan produktivitas masyarakat dan bangsa. Untuk mewujudkan Program

tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 7 (tujuh) sasaran kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
3. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa;
4. Meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
5. Meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;
6. Meningkatkan kinerja kelembagaan, dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi; serta
7. Meningkatkan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program yang telah disebutkan diatas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didukung dengan pencapaian 7 (tujuh) sasaran kegiatan yaitu, yaitu:

1. Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
3. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa;
4. Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK);
5. Peningkatan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;
6. Peningkatan kinerja kelembagaan dan dukungan material, peralatan dan teknologi konstruksi; dan
7. Peningkatan layanan dukungan manajemen Eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

## **2.2 PERJANJIAN KINERJA**

### **2.2.1 PERJANJIAN KINERJA (PK) AWAL**

Perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah rencana kinerja unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun bersangkutan yang berasal dari Dokumen DIPA (Dokumen Anggaran) dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang memuat sasaran program, sasaran kegiatan, dan indikator kerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang selaras dengan sasaran strategis Kementerian PUPR dan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Awal TA 2023 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi beserta Unit Kerja di bawahnya:



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yudha Mediawan  
 Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono  
 Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

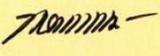
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2023

Pihak Kedua



**M. BASUKI HADIMULJONO**

Pihak Pertama



**YUDHA MEDIAWAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM (1)	TARGET (2)
<b>PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI</b>	
<b>SASARAN STRATEGIS:</b> Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	
<b>IKSS:</b> Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	6,40%
<b>SP:</b> Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional	
1 Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	85,00%
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>	
<b>SASARAN STRATEGIS:</b> Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	
<b>IKSS:</b> Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	63,00%
<b>SP:</b> Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
1 Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	63,00%
a Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	89,00%
b Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	35,00%
c Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	66,00%
2 Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	79,26%
<b>Program:</b>	<b>ANGGARAN</b>
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp 54.340.000.000,00
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 513.296.233.000,00
	<b>Rp 567.636.233.000,00</b>

**Gambar 2. 2 Perjanjian Kinerja Awal TA 2023 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi**  
 Sumber: [sakup.pu.go.id](http://sakup.pu.go.id), 2023

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
<i>Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</i>		
<i>Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya</i>	<i>Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</i>	100%
	<i>Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi</i>	92%

Kegiatan  
1. Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

ANGGARAN  
Rp. 183.742.970.000  
Rp. 183.742.970.000

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

  
YUDHA MEDIAWAN

JAKARTA, 8 FEBRUARI 2023  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

  
DEWI CHOMISTRIANA

Gambar 2. 3 Perjanjian Kinerja Awal TA 2023 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi  
Sumber: [sakup.pu.go.id](http://sakup.pu.go.id), 2023

2. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
<i>Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</i>		
<i>Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi</i>	<i>Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi</i>	75%

Kegiatan  
1. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi  
2. Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

ANGGARAN  
Rp. 7.500.000.000  
Rp. 7.612.973.000  
Rp. 15.112.973.000

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

  
YUDHA MEDIAWAN

JAKARTA, 8 FEBRUARI 2023  
DIREKTUR PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

  
INDRO PANTJA PRAMODO

Gambar 2. 4 Perjanjian Kinerja Awal TA 2023 Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi  
Sumber: [sakup.pu.go.id](http://sakup.pu.go.id), 2023

3. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
<i>Kegiatan Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi</i>		
Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa	Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa	91%

Kegiatan

- Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi
- Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

**ANGGARAN**  
Rp. 52.500.000.000  
Rp. 11.469.093.000  
Rp. 63.969.093.000

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

YUDHA MEDIAWAN

JAKARTA, 8 FEBRUARI 2023  
DIREKTUR PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

ABDUL MUIS

**Gambar 2. 5 Perjanjian Kinerja Awal TA 2023 Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi**  
Sumber: [sakup.pu.go.id](http://sakup.pu.go.id), 2023

4. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
<i>Kegiatan Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi</i>		
Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	100%

Kegiatan

- Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

**ANGGARAN**  
Rp. 6.000.000.000  
Rp. 7.700.467.000  
Rp. 13.700.467.000

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

YUDHA MEDIAWAN

JAKARTA, 8 FEBRUARI 2023  
DIREKTUR KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

KIMRON MANIK

**Gambar 2. 6 Perjanjian Kinerja Awal TA 2023 Direktorat Keberlanjutan Konstruksi**  
Sumber: [sakup.pu.go.id](http://sakup.pu.go.id), 2023

5. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI</b>		
<i>Kegiatan Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi</i>		
<i>Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi</i>	<i>Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat</i>	13%
	<i>Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi</i>	57%
Kegiatan 1. Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi 2. Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		<b>ANGGARAN</b> Rp. 6.000.000.000 Rp. 11.438.297.000 Rp. 17.438.297.000
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI  YUDHA MEDIAWAN		JAKARTA, 8 FEBRUARI 2023 DIREKTUR KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI  DEDY NATRIFAHRIZAL DEDISZY NAZAROEDDIN

Gambar 2. 7 Perjanjian Kinerja Awal TA 2023 Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Sumber: [sakup.pu.go.id](http://sakup.pu.go.id), 2023

6. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
<i>Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi</i>		
<i>Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi</i>	<i>Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi</i>	31%
	<i>Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi</i>	40%
	<i>Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TRDN</i>	98%
Kegiatan 1. Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi 2. Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		<b>ANGGARAN</b> Rp. 7.500.000.000 Rp. 8.558.685.000 Rp. 16.058.685.000
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI  YUDHA MEDIAWAN		JAKARTA, 8 FEBRUARI 2023 DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI  NICODEMUS DAUD

Gambar 2. 8 Perjanjian Kinerja Awal TA 2023 Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Sumber: [sakup.pu.go.id](http://sakup.pu.go.id), 2023

## 7. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023		
SEKRETARIAT LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI		
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
PK AWAL		
PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT (2)	TARGET (3)
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
<i>Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</i>		
<i>Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi</i>	<i>Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi</i>	31%*
	<i>Output:</i> <i>Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)</i>	67%
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		ANGGARAN Rp. 21.729.602.000 Rp. 21.729.602.000
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI	JAKARTA, 8 FEBRUARI 2023 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
 YUDHA MEDIAWAN	 AHMAD AGUS FITRAH AKBAR	
*) Target substantif Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi		

**Gambar 2. 9 Perjanjian Kinerja Awal TA 2023 Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**

Sumber: [sakup.pu.go.id](http://sakup.pu.go.id), 2023

### 2.2.2 PERJANJIAN KINERJA (PK) AKHIR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pasal 16 ayat 1 bahwa Perjanjian Kinerja dapat diubah atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi tertentu. Terkait hal tersebut, terjadi kondisi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2023 yang mengakibatkan unit organisasi harus melakukan perubahan/revisi PK TA 2023 yaitu adanya revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 akibat tambahan pagu untuk honor pokja sebesar 20,1 milyar rupiah yang mengakibatkan terjadi perubahan alokasi anggaran tiap satuan kerja. Revisi ini merujuk pada surat Menteri PUPR Nomor KU 0201-Mn/705 tanggal 30 Maret. Selain terjadi perubahan pagu, PK revisi akhir juga disebabkan karena terdapat perubahan target *output* menyesuaikan dengan adanya *Midterm Review* Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Revisi Akhir TA 2023 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi beserta Unit Kerja di bawahnya:

REVISI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rachman Arief Dienaputra  
 Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono  
 Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 September 2023

Pihak Kedua



**M. BASUKI HADIMULJONO**

Pihak Pertama



**RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA**

REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM (1)	TARGET (2)
<b>PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI</b>	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	5,10%
SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional	
1 Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	85,00%
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	69,00%
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
1 Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	69,00%
a Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	89,00%
b Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	36,00%
c Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	82,00%
2 Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	87,81%

Program:	ANGGARAN
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp 54.340.000.000,00
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 534.377.233.000,00
	<b>Rp 588.717.233.000,00</b>

**Gambar 2. 10 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2023 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi**  
 Sumber: [sakup.pu.go.id](http://sakup.pu.go.id), 2023

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023		
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>		
Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	94%
	Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	92%
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		<b>ANGGARAN</b> Rp. 180.663.028.000
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI   RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA	JAKARTA, 11 NOVEMBER 2023 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI   DEWI CHOMISTRIANA	

Gambar 2. 11 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2023 Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi  
Sumber: [sakup.pu.go.id](http://sakup.pu.go.id), 2023

2. Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023		
DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
<b>Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>		
Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	75%
Kegiatan 1. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 2. Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		<b>ANGGARAN</b> Rp. 6.686.790.000 Rp. 7.612.973.000 Rp. 14.299.763.000
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI   RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA	JAKARTA, 11 NOVEMBER 2023 DIREKTUR PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI   INDRU PANTJA PRAMODO	

Gambar 2. 12 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2023 Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi  
Sumber: [sakup.pu.go.id](http://sakup.pu.go.id), 2023

3. Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

PK REVISI-1

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
<b>Kegiatan Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi</b>		
Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa	Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa	92,50%

Kegiatan

1. Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi 2. Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	<b>ANGGARAN</b> Rp. 72.033.119.000 Rp. 11.619.093.000 <b>Rp. 83.652.212.000</b>
---	--

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

JAKARTA, 11 NOVEMBER 2023

DIREKTUR PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

ABDUL MUIS

**Gambar 2. 13 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2023 Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi**  
 Sumber: sakip.pu.go.id, 2023

4. Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

PK REVISI-1

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
<b>Kegiatan Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi</b>		
Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	100,00%

Kegiatan

1. Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi 2. Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 3. Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi	<b>ANGGARAN</b> Rp. 6.250.000.000 Rp. 8.571.502.000 Rp. 200.000.000 <b>Rp. 15.021.502.000</b>
---	---

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA

JAKARTA, 11 NOVEMBER 2023

DIREKTUR KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

KIMRON MANIK

**Gambar 2. 14 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2023 Direktorat Keberlanjutan Konstruksi**  
 Sumber: sakip.pu.go.id, 2023

5. Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023		
DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
<i>Kegiatan Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi</i>		
<i>Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi</i>	<i>Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat</i>	9,76%
	<i>Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi</i>	63%
Kegiatan 1. Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi 2. Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		<b>ANGGARAN</b> Rp. 6.000.000.000 Rp. 11.652.063.000 Rp. 17.652.063.000
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI   RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA	JAKARTA, 11 NOVEMBER 2023 DIREKTUR KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI   DEDY NATRIFAHRIZAL DEDISNY NAZAROEDDIN	

Gambar 2. 15 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2023 Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Sumber: [sakup.pu.go.id](http://sakup.pu.go.id), 2023

6. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023		
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
<i>Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi</i>		
<i>Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi</i>	<i>Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi</i>	61%
	<i>Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi</i>	40%
	<i>Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, BUJK, Peningkatan produk dalam negeri dan TKDN</i>	43%
Kegiatan 1. Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi 2. Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		<b>ANGGARAN</b> Rp. 7.173.985.000 Rp. 9.184.463.000 Rp. 16.358.448.000
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI   RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA	JAKARTA, 11 NOVEMBER 2023 DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI   NICODEMUS DAUD	

Gambar 2. 16 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2023 Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

Sumber: [sakup.pu.go.id](http://sakup.pu.go.id), 2023

## 7. Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 SEKRETARIAT LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT (2)	TARGET (3)
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
<i>Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi</i>		
<i>Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi</i>	<i>Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi</i>	61%*)
	<i>Output: Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)</i>	54%
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		<b>ANGGARAN</b> Rp. 22.412.779.000
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI    RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA	JAKARTA, 11 NOVEMBER 2023 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI    AHMAD AGUS FITRAH AKBAR	
*) Target substantif Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi		

**Gambar 2. 17 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2023 Sekretariat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**

Sumber: [sakip.pu.go.id](http://sakip.pu.go.id), 2023

### 2.2.3 KRONOLOGI PERUBAHAN PK

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pasal 16 ayat 1 bahwa Perjanjian Kinerja dapat diubah atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi tertentu. Terkait hal tersebut, terjadi kondisi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2023 yang mengakibatkan unit organisasi harus melakukan perubahan/revisi PK TA 2023. Selain itu, pada TA 2023, sesuai dengan hasil *Midterm Review* Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, terdapat beberapa perubahan target dari Renstra Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyesuaikan dengan usulan dari masing-masing unit kerja di bawahnya.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengalami perubahan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan perubahan anggaran dan pergantian pimpinan yang terjadi pada tahun 2023 serta adanya penyesuaian target tahun 2023. PK awal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2023 program pendidikan dan pelatihan vokasi memiliki target indikator kinerja sasaran (IKSS) sebesar 6,4% dan program dukungan manajemen dengan target indikator kinerja sasaran program (IKSP1) sebesar 63% dan IKSP2 sebesar 79,26% dengan total anggaran Rp 567.636.233.000,- ditetapkan pada bulan Januari

2023. PK Revisi pertama ditetapkan pada bulan Mei 2023 dikarenakan terjadi pergantian Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Kemudian PK Revisi kedua (akhir) ditetapkan pada bulan September 2023 dikarenakan adanya perubahan anggaran dan penyesuaian target tahun 2023 yaitu untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi memiliki target indikator kinerja sasaran sebesar 5,1%, sementara dari program dukungan manajemen memiliki target IKSP1 menjadi 69% dan IKSP2 sebesar 87,81% dengan total anggaran Rp 588.717.233.000,-.

Revisi pada target IKSP1 disebabkan karena adanya perubahan target pada sasaran kegiatan maupun indikator kinerja kegiatan dibawahnya mengakibatkan perubahan terhadap angka persentase target. Sementara perubahan target pada IKSP2 disebabkan karena adanya perubahan target dan perhitungan pada beberapa indikator kinerja kegiatan yang dijalankan oleh seluruh sekretariat unit eselon 1 di Kementerian PUPR yang mengakibatkan perubahan terhadap angka persentase target pada level Sekretariat Jenderal.

## 2.3 TARGET KINERJA TAHUN 2023 MENURUT RENSTRA

### 2.3.1 TARGET KINERJA BERDASARKAN RENSTRA

Berdasarkan dengan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan dua (2) program yang mendukung pemenuhan Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sasaran Programnya. Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan kondisi yang diinginkan dan dapat dicapai dengan output dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai selama periode 2020 - 2024, yaitu:

1. Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya; dan
2. Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.

Sasaran Program yang pertama adalah Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional yang memiliki satu (1) indikator kinerja program yaitu: **IKP 1. Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional**, dengan metode pengukuran sebagai berikut:

#### **IKP 1. Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional**

$$IKP 1 = \frac{\text{Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang tersertifikasi per tahun}}{\text{Potensi lulusan vokasi per tahun **}} \times 100\%$$

\*\* potensi lulusan vokasional bidang konstruksi sebanyak 37.000 per tahun

Berdasarkan rumus dari metode perhitungan di atas, pemenuhan indikator dari Sasaran Program tersebut didukung oleh Sasaran Kegiatan (SK) yang kegiatannya dilaksanakan oleh Direktorat dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Diketahui bahwa Tingkat SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional dihitung dari persentase perbandingan jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang bersertifikat pada tahun berjalan dengan jumlah potensi lulusan vokasional per tahun (pada tahun berjalan). Terdapat 1 IKK yang digunakan sebagai masukan untuk pengisian metode pengukuran pada Sasaran Program di atas yaitu:

**SK Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina**

$$IKK = \frac{\text{target pelatihan vokasional bidang konstruksi per tahun}}{\text{potensi lulusan vokasi per tahun}} \times 100\%$$

Sasaran Program yang kedua adalah “Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya” yang memiliki dua (2) indikator kinerja program yaitu: **IKP 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi** yang dan **IKP 2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR**, dengan metode pengukuran sebagai berikut:

**IKP 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi**

$$IKP 1 = \frac{\% IKP 1.1 + \% IKP 1.2 + \% IKP 1.3}{3}$$

$$IKP 1.1 = \frac{\% IKK 1 + \% IKK 2 + \% IKK 3}{3}$$

$$IKP 1.2 = \% IKK 4$$

$$IKP 1.3 = \% IKK 5$$

**Keterangan:**

IKP 1.1 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi

IKP 1.2 Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi

IKP 1.3 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi

**IKP 2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR**

$$IKP 2 = \% IKK 6$$

Berdasarkan rumus dari metode perhitungan di atas, pemenuhan indikator dari Sasaran Program tersebut didukung oleh Sasaran Kegiatan (SK) yang kegiatannya dilaksanakan oleh Direktorat dan Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Terdapat 6 IKK yang digunakan sebagai masukan untuk pengisian metode pengukuran pada Sasaran Program di atas yaitu:

### **SK 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi**

- Nilai rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi

$$IKK 1 = \frac{\text{Jumlah total nilai proyek}}{\text{Jumlah proyek yang disampling}} \times 100\%$$

$$* \text{Nilai Proyek} = \frac{\text{jumlah indikator penerapan NSPK yang diterapkan}}{\text{jumlah indikator dalam NSPK}} \times 100\%$$

#### **Keterangan:**

IKK 1. Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi

### **SK 2. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa**

$$IKK 2 = \frac{\% IKK 2.1 + \% IKK 2.2 + \% IKK 2.3 + \% IKK 2.4 + \% IKK 2.5 + \% IKK 2.6}{6}$$

$$\% IKK 2.1 = \frac{\text{Total paket} - \text{Total paket terlambat}}{\text{Total paket}} \times 100\%$$

$$\% IKK 2.2 = \frac{\text{Total sanggah dan sanggah banding} - \text{Total sanggah dan sanggah banding benar}}{\text{Total sanggah dan sanggah banding}} \times 100\%$$

$$\% IKK 2.3 = \frac{\text{Total pengaduan} - \text{Total pengaduan benar}}{\text{Total pengaduan}} \times 100\%$$

$$\% IKK 2.4 = \frac{\text{Total penetapan pemenang yang ditolak PPK} - \text{Total penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti benar}}{\text{Total penetapan pemenangnya yang ditolak PPK}} \times 100\%$$

$$\% IKK 2.5 = \frac{\text{Jumlah variabel yang dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan*}}{\text{Total variabel yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan*}} \times 100\%$$

$$\% IKK 2.6 = \frac{\text{Realisasi data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR}}{\text{Jumlah BUJK yang berkontrak di PUPR}} \times 100\%$$

#### **Keterangan:**

IKK 2. Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa

Sub Indikator:

IKK 2.1 Persentase tender/seleksi tepat waktu

IKK 2.2 Persentase sanggah/sanggah banding tidak benar

IKK 2.3 Persentase pengaduan tidak benar

IKK 2.4 Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar

IKK 2.5 Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ

IKK 2.6 Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR

### **SK 3. Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi (SMKK)**

- Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi

$$IKK\ 3 = \frac{\text{Jumlah proyek strategis yang tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah proyek strategis}} \times 100\%$$

Keterangan:

IKK 3. Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi

### **SK 4. Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi**

$$IKK\ 4 = \frac{\% IKK\ 4.1 + \% IKK\ 4.2}{2}$$

$$\% IKK\ 4.1 = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat}}{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi (BPS)}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 4.2 = \frac{\% IKK\ 4.2.1 + \% IKK\ 4.2.2 + \% IKK\ 4.2.3 + \% IKK\ 4.2.4}{4} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.1 = \frac{\text{Jumlah SKKNI bidang konstruksi yang terbarukan}}{\text{Jumlah kebutuhan SKKNI bidang konstruksi}} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.2 = \frac{\text{Jumlah modul bidang konstruksi yang terbarukan}}{\text{Jumlah kebutuhan modul bidang konstruksi}} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.3 = \frac{\text{Jumlah asesor bidang konstruksi}}{\text{Jumlah kebutuhan asesor bidang konstruksi}} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.4 = \frac{\text{Jumlah instruktur bidang konstruksi}}{\text{Jumlah kebutuhan instruksi bidang konstruksi}} \times 100\%$$

Keterangan:

IKK 4.1. Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat

IKK 4.2. Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi

Sub Indikator:

IKK 4.2.1. Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi

IKK 4.2.2. Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi

IKK 4.2.3. Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi

IKK 4.2.4. Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi

**SK 5. Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi**

$$IKK\ 5 = \% IKK\ 5.1 + e.\% IKK\ 5.2 + f.\% IKK\ 5.3$$

$$\% IKK\ 5.1 = a.\% IKK\ 5.1.1 + b.\% IKK\ 5.1.2 + c.\% IKK\ 5.1.3 + d.\% IKK\ 5.1.4$$

$$\% IKK\ 5.1.1 = \frac{\text{Jumlah OPD terbentuk dan operasional}}{\text{Jumlah OPD di tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.1.2 = \frac{\text{Jumlah Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi di Tahun Berjalan}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.1.3 = \frac{\text{Jumlah Penyedia Jasa yang berkinerja baik}}{\text{Jumlah Penyedia Jasa di tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.1.4 = \frac{\text{Persentase asosiasi yang terakreditasi} + \text{Persentase BUJK dan TKK terintegrasi} + \text{Persentase Penyetaraan BUJK dan TKA} + \text{Persentase LSP dan LSBU Terlisensi}}{4} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.2 = \frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional yang terlibat dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi}}{\text{Jumlah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang terdata di tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 5.3 = \frac{\text{realisasi data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN}}{\text{target data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN yang harus tersedia}} \times 100\%$$

**Bobot:**

$$a = b = c = d = 12,5\%$$

$$e = 25\%$$

$$f = 25\%$$

**Keterangan:**

IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi

IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi

IKK 5.3 Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN

Sub Indikator:

IKK 5.1.1 Persentase OPD terbentuk dan operasional

IKK 5.1.2. Persentase asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi

IKK 5.1.3. Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI

IKK 5.1.4. Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

**SK 6. Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya**

$$IKK 6.1 = \frac{\% \text{ layanan perencanaan, program, dan keuangan} + \% \text{ layanan administrasi kepegawaian dan umum} + \% \text{ layanan hukum informasi jasa konstruksi, dan komunikasi publik}}{3}$$

% layanan = Survei persepsi kepada internal organisasi untuk mengetahui tingkat layanan

$$IKK 6.2 = \frac{\% IKK 6.2.1 + \% IKK 6.2.2 + \% IKK 6.2.3 + \% IKK 6.2.4 + \% IKK 6.2.5}{5}$$

$$\% IKK 6.2.1 = \frac{\text{realisasi informasi kinerja penyedia jasa konstruksi}}{\text{target informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$\% IKK 6.2.2 = \frac{\text{realisasi informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) yang tersedia}}{\text{target informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$\% IKK 6.2.3 = \frac{\text{realisasi informasi penyelenggaraan jasa konstruksi}}{\text{target informasi penyelenggaraan jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$\% IKK 6.2.4 = \frac{\text{realisasi informasi pembinaan jasa konstruksi}}{\text{target informasi pembinaan jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%$$

% IKK 6.2.5 = Survei persepsi kepada stakeholder yang menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi

#### Keterangan:

IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

IKK 6.2. Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi

Sub Indikator:

IKK 6.2.1 Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi

IKK 6.2.2. Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) jasa konstruksi

IKK 6.2.3. Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi

IKK 6.2.4. Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi

IKK 6.2.5. Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi

Target Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tahun 2023 ditetapkan pada Renstra 2020-2024. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki dua program utama yaitu “Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional” dan “Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya”. Target yang ditetapkan untuk dicapai pada Tahun 2023 berdasarkan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Target Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program		Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>							
<b>SS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional</b>							
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Tingkat	%	5,3	5,6	6,0	<b>5,1</b>	3,4
<b>SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional</b>							
IKP: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Tingkat	%	70	75	80	<b>85</b>	89,7
<b>Program Dukungan Manajemen</b>							
<b>SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR</b>							
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	Tingkat	%	43	51	57	<b>69</b>	76
Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	Tingkat	%	43	51	57	<b>69</b>	76
<b>SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya</b>							
IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	Tingkat	%	43	51	57	<b>69</b>	76

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program		Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	76	80	84	<b>89</b>	93
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	14	21	28	<b>36</b>	39
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	40	51	59	<b>82</b>	97
IKP 2: Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR		%	55,92	63,35	71,54	<b>87,81</b>	84,12

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2020-2024, dan PK Revisi TA 2023

Berdasarkan tabel 2.1, terlihat bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendukung sasaran strategis kementerian yaitu (1) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional dengan target 2023 sebesar 5,1%; dan (2) Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dengan target 2023 sebesar 69%. Sementara target sasaran program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di tahun 2023 adalah (1) Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional dengan target IKP sebesar 85% dan (2) Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dengan target IKP 1 sebesar 69% yang berasal dari penghitungan 3 Sub IKP, yaitu (a) Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dengan target 89%, (b) Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi dengan target 36%, dan (c) Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi dengan target 59%, serta target IKP 2 sebesar 82%. Pencapaian dua program tersebut didukung oleh pencapaian sasaran kegiatannya di bawahnya. Berikut merupakan target sasaran kegiatan sebagai pendukung program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi beserta dengan indikator kinerja kegiatan berdasarkan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024:

Tabel 2. 2 Target Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>						
<b>Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi</b>						
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina						
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	%	81	81	81	<b>65</b>	<b>41</b>
<b>Program Dukungan Manajemen</b>						
<b>Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>						
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi						
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	60	65	70	<b>75</b>	80
<b>Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi</b>						
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa						
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	68	75	83	<b>92,5</b>	98,5
<b>Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi</b>						
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)						
IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	<b>100</b>	100
<b>Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi</b>						
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	%	14	21	28	<b>36</b>	39

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	9	10	12	<b>9,76</b>	10	
IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	%	20	32	44	<b>63</b>	67	
<b>Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi</b>							
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	%	40	51	59	<b>82</b>	97	
IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	%	16	23	28	<b>61</b>	70	
IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	%	10	20	30	<b>40</b>	50	
IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	%	85	90	95	<b>43</b>	58	

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>						
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	100	100	<b>93</b>	95
IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	100	100	<b>94</b>	94
IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	68	75	84	<b>92</b>	97

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2020-2024, dan PK Revisi TA 2023

Dalam rangka pemenuhan target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020-2024 yang telah disebutkan di atas, berikut adalah kerangka pendanaan sebagai input pelaksanaan program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2020-2024 sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR TA 2020-2024:

**Tabel 2. 3 Target Anggaran Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun 2020-2024**

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2023	2023	2024
<b>Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>					
<b>Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi</b>					
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina					

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2023	2023	2024
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina		96.000	96.000	96.000	<b>96.000</b>	96.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>						
<b>Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>						
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi						
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi		17.810	22.094	22.254	<b>22.421</b>	22.593
<b>Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi</b>						
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa						
IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi		89.590	111.137	111.944	<b>112.784</b>	113.650
<b>Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi</b>						
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)						
IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi		8.599	10.667	10.744	<b>10.825</b>	10.908
<b>Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi</b>						
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi		138.738	195.194	197.310	<b>199.512</b>	201.780
IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat		102.956	150.806	152.599	<b>154.465</b>	156.387
IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi		35.782	44.388	44.711	<b>45.047</b>	45.392
<b>Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi</b>						
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan		36.914	45.752	46.124	<b>46.471</b>	46.827

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2023	2023	2024
dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi					
IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	18.457	22.896	23.062	<b>23.235</b>	23.414
IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	6.152	7.632	7.687	<b>7.745</b>	7.805
IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	12.305	15.264	15.375	<b>15.490</b>	15.609
<b>Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>					
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	337.860	419.118	422.163	<b>425.332</b>	428.596
IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	330.860	412.118	415.163	<b>418.332</b>	421.596
IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	7.000	7.000	7.000	<b>7.000</b>	7.000

Sumber: Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi 2020-2024

## BAB 3

### KAPASITAS ORGANISASI

#### 3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

##### 3.1.1 ANALISIS JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN DAN KELOMPOK JABATAN

Aspek sumber daya manusia menjadi salah satu bagian penting dalam rangka menghadirkan proses perencanaan ketersediaan sumber daya manusia sampai dengan pengembangan dan terminasinya. Pentingnya peran sumber daya manusia bagi keberhasilan suatu organisasi sehingga dewasa ini setiap organisasi berlomba untuk mengelola dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

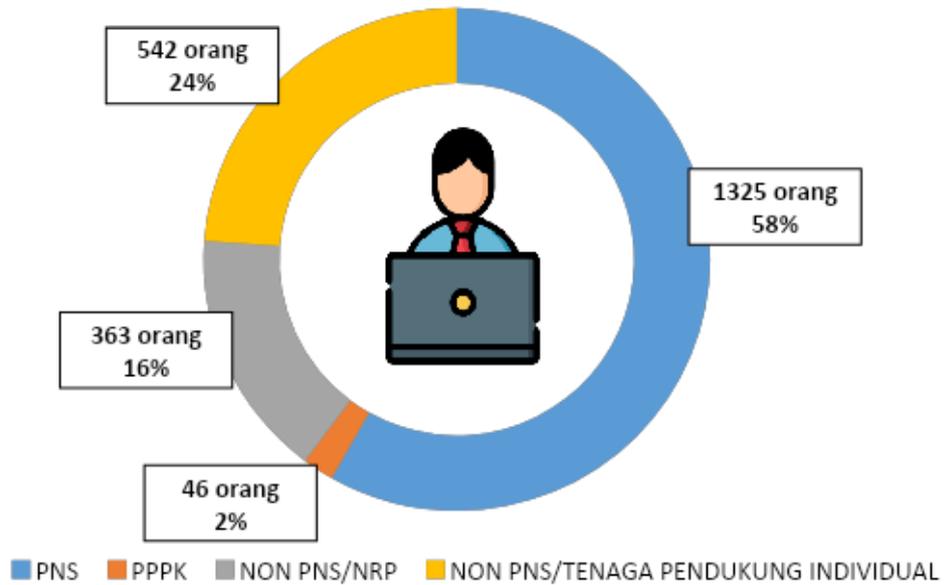
Tidak ketinggalan pula organisasi pemerintahan di Indonesia. Apalagi selama ini sumber daya manusia organisasi pemerintahan di Indonesia dinilai belum banyak yang menggunakan konsep manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi sehingga berujung pada kurang tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas serta mampu melaksanakan perannya melayani masyarakat. Padahal, untuk mewujudkan keberhasilan dalam melaksanakan peran dan fungsinya, organisasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah mutlak harus digerakkan oleh sumber daya manusia yang kompeten, tangguh, profesional, dan adaptif terhadap perubahan.

Sumber daya manusia memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan organisasi dan secara bersama mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Sumber daya manusia merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi yang diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Untuk menjalankan program-programnya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memberikan pelayanan secara terintegrasi, sinergis, dan terkendali, serta didukung oleh manajemen kepemimpinan yang sangat kuat dalam membangun hubungan kerja yang baik antar staf, hubungan atasan-bawahan serta hubungan eksternal seperti persaingan baik antar maupun inter organisasi, keadaan stabilitas politik, sosial serta politik. Hal tersebut tidak luput dari kinerja pimpinan birokrasi sehingga terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan baik, untuk menyelenggarakan produk dan memberikan pelayanan kepada masyarakat konstruksi.

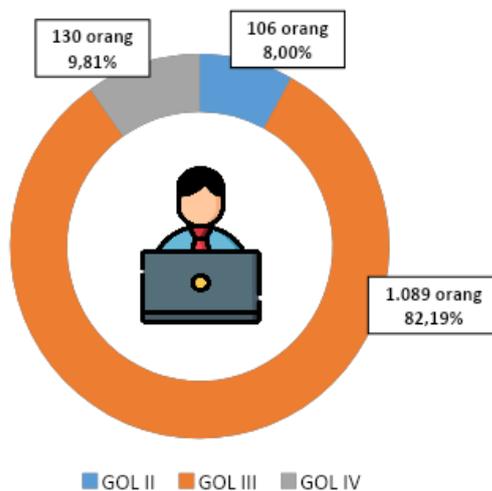
Pegawai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), Non PNS, dan Tenaga Pendukung Individual. Pada tahun 2023, Secara kuantitas, jumlah pegawai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berjumlah 2.276 pegawai didominasi oleh PNS dengan jumlah 1.325 orang atau sekitar 58%. Setelah itu diikuti oleh Tenaga Pendukung Individual dengan jumlah 542 orang atau sekitar 24% lalu pegawai Non PNS/NRP dengan

dengan jumlah 363 orang atau sekitar 16% dan PPPK dengan jumlah 46 orang atau sekitar 2%.



**Gambar 3. 1 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Status**  
 Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2023

Khusus untuk jenis pegawai PNS, pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi didominasi oleh golongan III yaitu 1.089 orang atau sekitar 82,19%, diikuti golongan IV yaitu 130 orang atau sekitar 9,81% dan golongan II yaitu 106 orang atau sekitar 8,00%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mayoritas diisi oleh SDM muda yang berkualitas pendidikan tinggi karena minimal memiliki ijazah S1 untuk mencapai golongan III saat awal perekrutan. Pegawai senior atau yang berada pada golongan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi semakin berkurang jumlahnya karena banyak pegawai yang memasuki usia pensiun.



**Gambar 3. 2 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
 Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2023

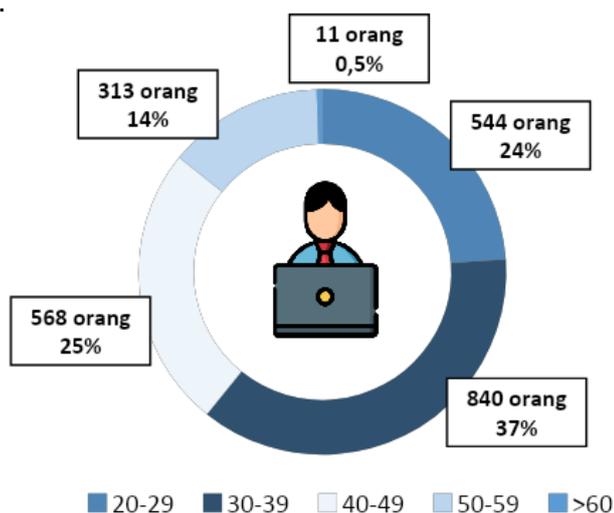
**Tabel 3. 1 Persebaran Pegawai DJBK TA 2023 berdasarkan Golongan**

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
II/a	11	22	33
II/b	1	-	1
II/c	19	7	26
II/d	38	8	46
III/a	210	130	340
III/b	168	105	273
III/c	151	65	216
III/d	168	92	260
IV/a	52	26	78
IV/b	28	7	35
IV/c	8	2	10
IV/d	3	1	4
<b>TOTAL</b>	<b>860</b>	<b>465</b>	<b>1325</b>

Sumber: Bagian KU, 2023

### 3.1.2 ANALISIS JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN USIA

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dikelola oleh SDM yang berada dalam usia produktif dan berpengalaman (usia 30-39 tahun dan 40-49 tahun) dengan total 1.408 orang atau 62%. Sementara usia yang akan memasuki masa pensiun (50-59 tahun dan >60 tahun) yaitu sebanyak 324 orang atau 14%. Adapun pegawai muda (20-29 tahun) sebanyak 544 orang atau 24%, yang tentunya masih membutuhkan banyak pengalaman serta peningkatan kompetensi bidang PUPR.



**Gambar 3. 3 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia**

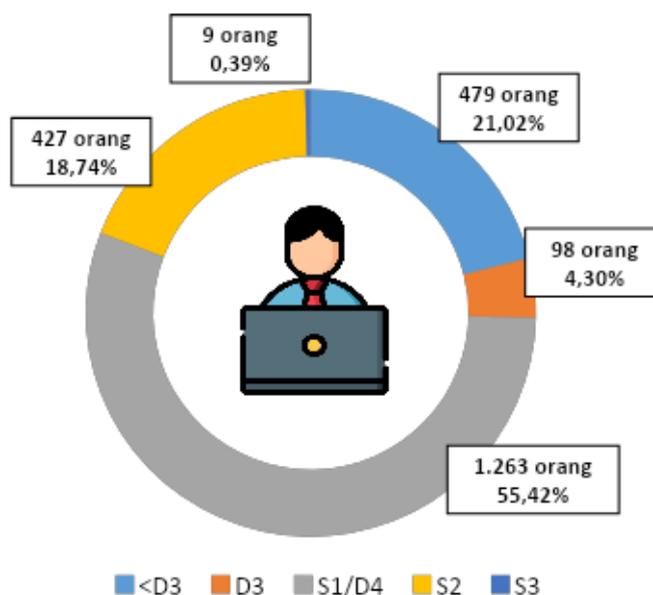
Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2023

**Tabel 3. 2 Persebaran Pegawai DJBK TA 2023 berdasarkan Kelompok Usia**

Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
20-29	303	281	584
30-39	512	296	808
40-49	410	153	563
50-59	261	49	310
>60	10	1	11
<b>TOTAL</b>	<b>1.496</b>	<b>780</b>	<b>2.276</b>

Sumber: Bagian KU, 2023

Proporsi pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan tingkat pendidikan SMA atau di bawahnya masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 479 orang atau sekitar 21,02%. Guna meningkatkan kualitas SDM Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang profesional dan kompeten, pendekatan rekrutmen pegawai telah diubah dengan menetapkan batas latar belakang pendidikan secara umum adalah D3, S1, dan S2. Hal tersebut terbukti dengan jumlah pegawai dengan kategori S1 s.d. S2 mencapai 74,16% atau lebih dari separuh pegawai Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Bahkan terdapat 9 pegawai yang telah bergelar doktor (S3).

**Gambar 3. 4 Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum, 2023

**Tabel 3. 3 Persebaran Pegawai DJBK TA 2023 berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<D3	403	80	483
D3	56	42	98
S1/D4	763	496	1.259
S2	269	158	427
S3	5	4	9
<b>TOTAL</b>	<b>1.496</b>	<b>780</b>	<b>2.276</b>

Sumber: Bagian KU, 2023

### 3.2 SARANA DAN PRASARANA

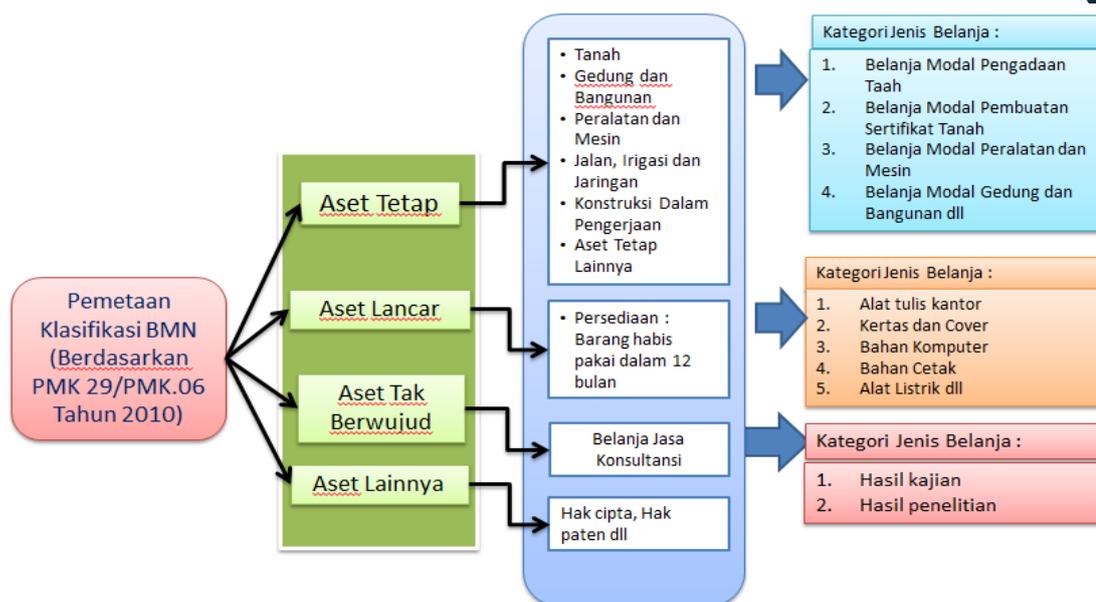
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana dan Prasarana merupakan fasilitasi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di organisasi, Instansi atau perkantoran dalam meningkatkan produktivitas kerja suatu organisasi. Pengertian sarana dan prasarana dalam suatu organisasi dan instansi perkantoran merupakan proses pendukung aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan organisasi dan instansi perkantoran.

Sarana dan prasarana merupakan pendorong untuk meningkatkan kinerja pegawai, agar teroganisir sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan yang baik perlu ditunjang dengan fasilitas yang memadai sebagai bagian dari proses meningkatkan kinerja dan mengerjakan seluruh kegiatan dengan tepat.

Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Bina Konstruksi meliputi semua Barang Milik Negara (BMN) yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah yaitu:

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

Klasifikasi BMN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 532/KM.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 3. 5 Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara**

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2023

Salah satu aset sarana yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah Gedung dan bangunan perkantoran yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja. Adapun luasan bangunan dan tanah keseluruhan aset Direktorat Jenderal Bina Konstruksi tertera pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 4 Luasan Bangunan dan Tanah Keseluruhan Aset DJBK TA 2023**

NO	UNIT KERJA	LUAS TANAH (m <sup>2</sup> )	LUAS BANGUNAN (m <sup>2</sup> )	KETERANGAN
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	-	1.128	Tanah Milik BPSDM dan Bangunan Mess Milik Set-DJBK sebanyak 8 Unit @ 141 m2
2	Dit Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	-	1.640	Tanah milik BPSDM dan Bangunan milik Dit Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
3	Dit. Pengadaan Jasa Konstruksi	-	-	Tanah dan Bangunan milik Sekretariat Jenderal (Gedung Utama Kementerian PUPR_ Tanah seluas 1.428 m2, Luasan Ruang : Set Ditjen Bikon 939,8 m2; Dit Pengadaan 814,7 m2; Dit Pengembangan 814,7 m2; Dit Kelembagaan 675 m2; dan Dit Keberlanjutan 375 m2)
4	Dit. Pengembangan Jasa Konstruksi	-	-	
5	Dit Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	-	-	
6	Dit. Keberlanjutan Konstruksi	-	-	
7	Sekretariat LPJK	-	1.695	Tanah dan Bangunan milik Cipta Karya
8	BJKW I Banda Aceh	-	1.968	Tanah milik Univ. Syiah Kuala seluas 8.000 m2 dan Bangunan milik BJKW I Banda Aceh
9	BJKW II Palembang	-	803	Tanah milik Pemkot Palembang seluas 5.345 m2 dan Bangunan milik BJKW II Palembang

NO	UNIT KERJA	LUAS TANAH (m <sup>2</sup> )	LUAS BANGUNAN (m <sup>2</sup> )	KETERANGAN
10	BJKW III Jakarta	73.345	2.966	Tanah dan Bangunan milik BJKW III Jakarta
11	BJKW IV Surabaya	23.879	2.863	Tanah dan Bangunan milik BJKW IV Surabaya
13	BJKW V Banjarmasin	-	1.233	Tanah milik Direktorat Jenderal SDA (Satker BWS Kalimantan II) seluas 2.100 m <sup>2</sup> dan Bangunan milik BJKW V Banjarmasin
14	BJKW VI Makassar	-	1.520	Tanah milik Pemprov Sulawesi Selatan seluas 15.000 m <sup>2</sup> dan Bangunan milik BJKW VI Makassar
15	BJKW VII Jayapura	-	3.798	Tanah milik Direktorat Jenderal Bina Marga (Satker Balai BPJN X) seluas 6.054 m <sup>2</sup> dan Bangunan milik BJKW VII Jayapura
16	BP2JK DKI Jakarta	2.692	1.700	Tanah dan Bangunan Milik BP2JK DKI Jakarta
17	BP2JK Jawa Barat	4.574	3.653	Tanah dan Bangunan Milik BP2JK Jawa Barat
18	BP2JK D.I.Yogyakarta	-	871	Tanah milik Direktorat Jenderal Perumahan dan Bangunan milik BP2JK D.I.Yogyakarta
19	BP2JK Jambi	-	674	Tanah dan Bangunan milik SDA
20	BP2JK Riau	-	738	Tanah dan Bangunan milik SDA
21	BP2JK Lampung	-	900	Tanah dan Bangunan milik SDA
22	BP2JK Sumatera Barat	-	670	Tanah dan Bangunan milik SDA
23	BP2JK Jawa Tengah	-	815	Tanah dan Bangunan milik SDA
24	BP2JK Bali	-	550	Tanah dan Bangunan milik Cipta Karya
25	BP2JK NTB	-	426,8	Tanah dan Bangunan milik SDA
26	BP2JK Banten	1.640	384	Tanah dan Bangunan milik BP2JK Banten BA No.03/BA/Az.01/2023 tgl. 18/12/2023
27	BP2JK Papua Barat	-	450	Tanah dan Bangunan milik Bina Marga
29	BP2JK NTT	-	280	Pinjam Pakai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
30	BP2JK SUMUT	-	370	Tanah dan Bangunan milik BPSDM
31	BP2JK Aceh	-	678	Tanah milik Univ. Syiah Kuala dan Bangunan milik BJKW I Banda Aceh
32	BP2JK Jatim	-	1.388	Tanah dan Bangunan milik BJKW IV Surabaya
33	BP2JK Kalsel	-	516	Tanah milik Pemprov Sulawesi Selatan dan Bangunan milik BJKW VI Makassar
34	BP2JK Sulsel	-	1.228,38	Tanah milik Pemprov Sulawesi Selatan dan Bangunan milik BJKW VI Makassar
35	BP2JK Papua	-	648	Tanah milik Direktorat Jenderal Bina Marga (Satker Balai BPJN X) dan Bangunan milik BJKW VII Jayapura

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa aset tanah yang merupakan milik Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah yang saat ini ditempati oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat, dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten dengan luas total 106.130 m<sup>2</sup>. Adapun luas bangunan dan tanah milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan diurus oleh Biro Umum dan ditempati oleh Satker Pusat (Set. Ditjen Bikon, Dit 1, Dit 2, Dit 3 dan Dit 5) masing-masing seluas 3.244,2 m<sup>2</sup> dan 5.712 m<sup>2</sup>. Sebagian besar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terutama yang berdomisili di daerah, masih meminjam-pakai tanah dan bangunan milik unit kerja lain seperti milik Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal SDA, Direktorat Jenderal Perumahan, Universitas Syahkuala, Pemkot Palembang dan Pemprov Sulsel dengan total luas bangunan 5.160 m<sup>2</sup> dan luas tanah 36.449 m<sup>2</sup>. Dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% luas bangunan yang ditempati unit kerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi masih dalam status pinjam-pakai.

Adapun secara detail aset-aset Tanah dan Bangunan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang mendukung tugas dan fungsi organisasi sebagai pembina jasa konstruksi khususnya dalam hal pelatihan tenaga kerja konstruksi dan pengadaan jasa konstruksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 5 Detil Aset Tanah dan Bangunan DJBK**

<b>ASET</b>	<b>LUAS (m<sup>2</sup>)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi</b>		
Mess/Wisma	1.128	8 Mess masing-masing seluas 141 m <sup>2</sup>
<b>Dit. Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi</b>		
Penunjang	1.190	Garasi 720 m <sup>2</sup> Garasi 450 m <sup>2</sup> Rumah Genset 20 m <sup>2</sup>
<b>BJKW I Banda Aceh</b>		
Bengkel/Hanggar	1.964	Workshop Carpentry 756 m <sup>2</sup> Workshop Concrete & Plumbing 756 m <sup>2</sup>
Penunjang	715	Penampungan / tower air 9m <sup>2</sup> Tempat Parkir 56m <sup>2</sup> Tempat Parkir 100m <sup>2</sup> Taman 400m <sup>2</sup> Gudang Material 150m <sup>2</sup>
<b>BJKW II Palembang</b>		
Bangunan Gedung Kantor Permanen	682	Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruangan Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Ka Pelaksana, Ruang Rapat, dkk
<b>BJKW III Jakarta</b>		
Bengkel/Hanggar	4.289	Workshop Plumbing 204m <sup>2</sup> Workshop Batu 700m <sup>2</sup> Workshop Plumbing 1.400m <sup>2</sup> Workshop Batu 200m <sup>2</sup>

ASET	LUAS (m <sup>2</sup> )	KETERANGAN
		Workshop Las 985m <sup>2</sup> Workshop Kayu 800m <sup>2</sup>
Penunjang	364	Dapur
Bengkel/Hanggar (eks Balai MPK)	3.264	Workshop Mekanik (1.632m <sup>2</sup> ) Workshop Alat Berat (1.632m <sup>2</sup> )
Gedung Pendidikan & Lab (eks Balai MPK)	2.620	Indor Training Ground 830m <sup>2</sup> Indor Training Ground 830m <sup>2</sup> Workshop AMP/CBP 800m <sup>2</sup> Laboratorium Metalurgi 160m <sup>2</sup>
Mess/Wisma (eks Balai MPK)	218	Mess Peserta 142m <sup>2</sup> Mess Instruktur 76m <sup>2</sup>
Penunjang (eks Balai MPK)	2.064	Gudang Seng 108m <sup>2</sup> Bangunan Genset AMP 90m <sup>2</sup> Stock Pile AMP 40m <sup>2</sup> Masjid 60m <sup>2</sup> Aula 500m <sup>2</sup> Pos Satpam 8m <sup>2</sup> Kolam Penampung 308m <sup>2</sup> Tower Air 50m <sup>2</sup> Lobby Mess 264m <sup>2</sup>
<b>BJKW IV Surabaya</b>		
Gedung Pendidikan & Lab	13.389	Workshop Las (698m <sup>2</sup> ) Workshop Kayu (535m <sup>2</sup> ) Workshop Batu (535m <sup>2</sup> ) Workshop Plumbing (9.858m <sup>2</sup> ) Workshop Rekayasa Gambar (1.763m <sup>2</sup> )
Mess/Wisma	3.161	Mess 1.773m <sup>2</sup> Mess 1.388m <sup>2</sup>
Rumah Negara	2.588	Gol. I Tipe A 669m <sup>2</sup> Gol. I Tipe A 669m <sup>2</sup> Gol. II Tipe B 250m <sup>2</sup>
Penunjang	1.525	Pos Jaga 36m <sup>2</sup> Garasi 36m <sup>2</sup> Tempat Parkir 840m <sup>2</sup> Tempat Kerja Lainnya 43m <sup>2</sup> Tempat Kerja Lainnya 43m <sup>2</sup> Tempat Kerja Lainnya 43m <sup>2</sup> Tempat Kerja Lainnya 43m <sup>2</sup> Tempat Kerja Lainnya 371m <sup>2</sup> Tempat Kerja Lainnya 16m <sup>2</sup> Tempat Kerja Lainnya 54m <sup>2</sup>
<b>BJKW V Banjarmasin</b>		
Bangunan Gedung Kantor Permanen	625	Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruangan Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Ka Pelaksana, Ruang Rapat, dan kantor BP2JK Kalimantan Selatan dkk
<b>BJKW VI Makassar</b>		
Bengkel/Hanggar	1.350	Workshop Batu, Kayu, Las dan Plumbing

ASET	LUAS (m <sup>2</sup> )	KETERANGAN
Mess/Wisma	980	Mess
Penunjang	34	Rumah Genset
<b>BJKW VII Jayapura</b>		
Bengkel/Hanggar	648	Workshop Batu, Kayu, Las dan Plumbing
Mess/Wisma	728	Kantor & Mess
Penunjang	80	Rumah Genset
<b>BP2JK DKI Jakarta</b>		
Gedung Garasi/Pool Permanen	96	Garasi Kendaraan
Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen	1.700	Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruangan Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Pokja, dkk
Pagar Permanen		
<b>BP2JK Jawa Barat</b>		
Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen	3653	Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruangan Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Pokja, dkk
Pagar Permanen		
<b>BP2JK D.I. Yogyakarta</b>		
Bangunan Gedung Kantor Permanen	445	Sudah digabung menjadi tempat kerja untuk ruangan Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Pokja, dkk
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	426	
Rumah Sederhana Sehat	36	
<b>BP2JK Banten</b>		
Bangunan Gedung Kantor Permanen	384	Di atas Tanah seluas 1.640 m <sup>2</sup> BAST : 03/BA/Az.1/2023 tgl. 18 Desember 2023, Bangunan Gedung Kantor tempat kerja untuk ruangan Ka.Balai, Ruang Ka TU, Ruang Pokja, dkk

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2023

### 3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Pagu awal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2023 sesuai dengan yang tercantum pada DIPA Induk yang terbit tanggal 30 November 2022 yaitu sebesar Rp. 567.636.233.000,- . Pagu alokasi tersebut terdiri atas Fungsi Ekonomi sebesar Rp. 513.296.233.000,- dan Fungsi Pendidikan sebesar Rp. 54.340.000.000,-. Kedua fungsi dalam DIPA tersebut dialokasikan untuk melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Program Dukungan Manajemen guna mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR. Rincian anggaran per jenis belanja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan DIPA Awal adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 6 Rincian Anggaran Per Jenis Belanja DJBK Berdasarkan DIPA Awal TA 2023**

Program	Rincian Anggaran Per Jenis Belanja DIPA Awal DJBK TA 2023 (RP Ribu)			
	Pegawai	Barang	Modal	Total
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-	54.340.000	-	54.340.000
Dukungan Manajemen	193.400.482	312.345.751	7.550.000	513.296.233
<b>Total</b>	<b>193.400.482</b>	<b>366.685.751</b>	<b>7.550.000</b>	<b>567.636.233</b>

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2023

Sedangkan rincian anggaran per satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina

**Tabel 3. 7 Rincian Anggaran Per Satuan Kerja di Lingkungan DJBK Berdasarkan DIPA Awal dan Revisi TA 2023**

NO	SATUAN KERJA	PAGU	
		AWAL	REVISI
		Rp (000)	Rp (000)
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	183.742.970	181.810.914
2	DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	15.112.973	14.409.763
3	DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	63.969.093	82.652.212
4	DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI	16.058.685	16.558.448
5	DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI	17.438.297	17.702.063
6	DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI	13.700.467	15.061.502
7	LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	21.729.602	22.412.779
8	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH I BANDA ACEH	13.102.710	13.136.710
9	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH II PALEMBANG	13.050.000	13.166.213
10	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH III JAKARTA	24.456.635	24.757.200
11	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH IV SURABAYA	23.672.440	22.332.658
12	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH V BANJARMASIN	21.278.921	24.558.888
13	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VI MAKASSAR	19.423.047	17.751.926
14	BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH VII JAYAPURA	12.080.215	12.080.215
15	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH ACEH	3.000.000	3.000.000
16	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA UTARA	3.013.893	3.013.893
17	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA BARAT	3.141.012	3.141.012
18	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH RIAU	3.000.000	3.000.000
19	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KEPULAUAN RIAU	3.000.000	2.900.000
20	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SUMATERA SELATAN	3.215.404	3.215.404
21	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANGKA BELITUNG	3.234.565	3.000.000

NO	SATUAN KERJA	PAGU	
		AWAL	REVISI
		Rp (000)	Rp (000)
22	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BENGKULU	3.000.000	3.000.000
23	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH LAMPUNG	3.000.000	3.353.210
24	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAMBI	3.000.000	3.000.000
25	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BANTEN	3.000.000	3.224.087
26	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DKI JAKARTA	3.871.325	4.249.419
27	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA BARAT	4.282.246	4.441.516
28	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH DI YOGYAKARTA	3.096.032	3.096.032
29	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TENGAH	3.000.000	3.000.000
30	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TIMUR	3.137.435	3.011.455
31	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH BALI	3.080.078	3.080.078
32	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTB	3.000.000	3.000.000
33	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH NTT	3.000.000	2.900.000
34	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN BARAT	3.101.505	3.583.538
35	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	3.085.974	3.085.974
36	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH	3.249.402	3.249.402
37	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	3.008.246	3.008.246
38	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH KALIMANTAN UTARA	3.000.000	3.000.000
39	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI SELATAN	3.196.173	3.087.485
40	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI BARAT	3.000.000	3.082.359
41	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGAH	3.150.397	3.150.397
42	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI TENGGARA	3.150.951	3.150.951
43	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI UTARA	3.011.306	3.011.306
44	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH GORONTALO	3.465.782	3.953.566
45	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU	3.485.971	3.602.516
46	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH MALUKU UTARA	3.511.420	3.511.420
47	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA BARAT	3.742.352	3.633.767
48	BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH PAPUA	3.588.709	3.588.709
<b>TOTAL</b>		<b>567.636.233</b>	<b>588.717.233</b>

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2023

Kronologis revisi anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi selama TA 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Kronologis Revisi Anggaran DJBK TA 2023

No	Revisi	Pagu (Rp Ribu)	Satuan Kerja Terlibat	Keterangan
1	<b>DIPA AWAL</b> (30 November 2022)	567.636.233	48 Satker	
2	<b>BLOKIR AA</b> (28 Desember 2022)	567.636.233	7 BJKW	Tambahan blokir pada pagu vokasional dengan total sebesar 10,8 milyar rupiah. Revisi merujuk pada: 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 2. Surat Menteri PUPR Nomor KU.01.01-Mn/2683 tanggal 27 Desember 2022
3	<b>REVISI DJA</b> (15 April 2023)	588.717.233	Setditjen & Dit. Pengadaan	Tambahan pagu untuk honor pokja sebesar 20,1 milyar rupiah. Revisi ini merujuk pada surat Menteri PUPR Nomor KU 0201-Mn/705 tanggal 30 Maret 2023.
4	<b>BUKA BLOKIR AA</b> (28 Agustus 2023)	588.717.233	7 BJKW & 3 BP2JK	Buka blokir sebesar 10,8 milyar pada program vokasi serta pergeseran anggaran untuk pemenuhan pengadaan kendaraan dinas sebesar 1,4 milyar. Revisi merujuk pada Surat Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR No KU.0101-Dk/1078.
5	<b>REVISI ANTAR SATKER DJPB</b> (24 Oktober 2023)	588.717.233	Setditjen, Dit Pengadaan, 4 BJKW, & 9 BP2JK	Pergeseran antar satker untuk pemenuhan belanja operasional dan pemanfaatan sisa anggaran swakelola untuk pemenuhan belanja barang non operasional. Revisi merujuk pada surat Dirjen Bina Konstruksi No PR0201-Dk/1367
6	<b>REVISI DJA</b> (01 November 2023)	588.717.233	Setditjen, 3 BJKW, & 6 BP2JK	Pemanfaatan sisa alokasi anggaran belanja pegawai Rp.3M untuk kebutuhan renovasi gedung kantor dan pengadaan Kendaraan Dinas. Revisi merujuk pada Surat Sekjen Kementerian PUPR No KU.0101-Sj/1211.
7	<b>REVISI ANTAR SATKER DJPB</b>	588.717.233	Setditjen, 3 Direktorat,	Pergeseran antar satker untuk pemenuhan kebutuhan operasional

No	Revisi	Pagu (Rp Ribu)	Satuan Kerja Terlibat	Keterangan
	(20 November 2023)		4 BJKW, dan 3 BP2JK	perkantoran dan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Revisi merujuk pada surat Dirjen Bina Konstruksi No PR0201-Dk/1545

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2023

### 3.4 ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2023, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengalami peningkatan dukungan sumber daya manusia. Jumlah pegawai mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 2.242 orang dengan rincian PNS 1.378 orang, NRP 360 orang, dan TPI 534 orang. Sementara pada tahun 2023 meningkat menjadi 2.276 orang dengan rincian PNS 1.325 orang, NRP 363 orang, TPI 363 orang, dan PPPK 46 orang. Dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2023 DJBK mengalami penurunan sekaligus mendapat tambahan tenaga PPPK. Penurunan disebabkan karena terdapat beberapa PNS yang telah memasuki masa purna tugas, serta berkurangnya beberapa NRP dan TPI yang beralih menjadi tenaga PPPK.

Dari sisi anggaran pada tahun 2023 juga mengalami penurunan dari tahun 2022. Pagu pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 646.449.100.000,-, sementara pagu pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 588.717.233.000,-. Penurunan ini terlihat pada beberapa jenis belanja yaitu pada belanja pegawai, belanja non operasional, dan belanja modal.

## BAB 4

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 4.1 UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan surat hasil evaluasi implementasi SAKIP DJBK TA 2022 dari Inspektur Jenderal Nomor PW0204-lj/1218 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2022, bahwa upaya peningkatan akuntabilitas menunjukkan hasil kategori **A (Memuaskan)** dengan capaian nilai sebesar **80,86%** (dari nilai maksimal 100%). Hal tersebut menunjukkan bahwa DJBK telah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Subkoordinator. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperbaiki, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Telah dilaksanakan konsolidasi penyusunan dokumen perjanjian kinerja TA 2023 yang melibatkan pimpinan;

2. Pengukuran Kinerja

Telah dilaksanakan pengukuran kinerja dengan rapat koordinasi untuk mengukur capaian kinerja. Selain itu, hasil capaian kinerja telah menjadi dasar untuk menentukan capaian organisasi dan individu yang terintegrasi dalam aplikasi E-Kinerja;

3. Pelaporan Kinerja

Telah dilaksanakan tindak lanjut evaluasi SAKIP TA 2022 dalam hal pelaporan kinerja yaitu:

- a. Telah disusun laporan pembahasan *progres* kinerja dengan adanya notulen rapat yang disampaikan kepada pimpinan;
- b. Telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan hasil evaluasi SAKIP TA 2022 sebagai bahan evaluasi untuk persiapan penyusunan Laporan Kinerja SAKIP TA 2023.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal akan disesuaikan dengan rencana pemuktahiran pada aplikasi <https://iemon.pu.go.id/sakip2> oleh Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri sebagai aplikasi yang terintegrasi untuk pelaporan dan penilaian evaluasi pelaksanaan SAKIP di Kementerian PUPR;
- b. Tahun 2023, telah dilaksanakan efisiensi penggunaan anggaran. Pagu dan realisasi pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 namun output dan progres fisik dapat optimal. Pagu TA 2023 sebesar 588,71 miliar rupiah dengan progres keuangan 579,89 miliar rupiah atau 98,5% dan realisasi fisik 100%. Sedangkan pada TA 2022

pagu sebesar 646,67 miliar rupiah dengan realisasi keuangan 622,77 miliar atau 96,34% dan progres fisik 98,96%.

Pada LAKIP TA 2022, terdapat beberapa permasalahan dan rekomendasi. Sebagai bukti dan upaya perbaikan pencapaian kinerja TA 2023, rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di tahun 2023 sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan kegiatan pembinaan sistem manajemen keselamatan konstruksi sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan kegiatan *refreshment* pengawas untuk menjaring pengawas-pengawas dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah;
  - b. Pemantauan dan Evaluasi pada Proyek Konstruksi dengan Potensi Bahaya Tinggi oleh Komite Keselamatan Konstruksi;
  - c. Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) untuk Tingkat General Manajer Kontraktor, Pemimpin Tim, Insinyur Ahli (Konsultan Pengawas), Mahasiswa, dan Tenaga Terampil;
  - d. Sertifikasi K3 Konstruksi dan Petugas Keselamatan Konstruksi;
  - e. Pemberdayaan Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi sebagai *second line defense* terhadap kecelakaan konstruksi, antara lain dengan pengaturan izin bekerja (*permit to work*) dan *checklist* pekerjaan yang harus ditandatangani Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi.
2. Telah dilaksanakan upaya mencapai target tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan penyelenggaraan jasa Konstruksi. Sosialisasi ini membahas kewenangan jasa konstruksi di daerah dan dukungan legalisasi NSPK pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah;
  - b. Penyusunan peraturan kewenangan jasa konstruksi di daerah, penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
3. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan pada TA 2023, telah dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Penguatan Balai Jasa Konstruksi Wilayah dalam rangka verifikasi komitmen dan capaian TKDN dengan terbitnya SK Direktur Keputusan Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nomor 1987/KPTS/Kd/2023 tentang Tim Verifikator Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Kementerian PUPR Tahun 2023 – 2024;
  - b. Penguatan para PPK untuk menyiapkan nilai ambang batas TKDN paket dengan terbitnya Keputusan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 602/KTPS/M/2023 tentang Batas Minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi;

- c. Penyederhanaan proses persetujuan serta rekapitulasi data dan realisasinya terkait penggunaan barang impor dan tenaga kerja asing telah dilaksanakan dengan penyusunan dan terbitnya buku KITA (Kendali Impor dan Tenaga Asing);
- d. Penyusunan pedoman penerapan teknologi BIM dengan penyusunan dan telah terbitnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran, Analisis dan Uji Teknis Bidang *Building Information Modelling*;
- e. Terkait Acuan Pedoman atau Standar Operasional Prosedur Pengaduan dari Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR yang saat ini sedang dalam proses penyusunan, Sekretariat Ditjen Bina Konstruksi akan berkoordinasi secara intensif agar SOP pengaduan dapat segera diterbitkan dan disosialisasikan kepada internal unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

## 4.2 CAPAIAN KINERJA

### 4.2.1 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Sasaran Program

Komponen tingkat akuntabilitas kinerja merupakan komponen proses yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi turut mendukung 2 (dua) sasaran strategis pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu SS.4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan SS.5 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya. Kedua indikator dari masing-masing sasaran strategis diatas yaitu IKSS.4 Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan capaian 2023 sebesar 7,49% dari target 5,1%; dan IKSS.5 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi, dengan capaian sebesar 78,55% dari target 69%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor terlaksananya pengelolaan 12 NSPK terkait tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dukungan rantai pasok konstruksi, kinerja kelembagaan jasa konstruksi, tersusunnya SKKNI baru dan SKKNI terbarukan bidang konstruksi, sinergitas seluruh pihak internal dan eksternal dalam rangka pembinaan sumber daya konstruksi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan secara daring.

Untuk mendukung 2 (dua) Sasaran Strategis Kementerian PUPR tersebut diatas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan Program (1) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan (2) Dukungan Manajemen sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 Sasaran Program sesuai dengan program yang telah

dijelaskan sebelumnya, yaitu: (1) Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional dan (2) Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. Sasaran Program yang pertama memiliki indikator kinerja program yaitu Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional dengan target 80%. Sedangkan, Sasaran Program yang kedua memiliki 2 indikator kinerja program yaitu (1) Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dengan target 69% dan Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dengan target 87,81%. Capaian kinerja Sasaran Program yang didukung oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 1 Capaian Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2023**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SAT	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
<b>UNIT ORGANISASI: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi</b>					
<b>PROGRAM: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI</b>					
<b>SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional</b>					
	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional</b>	%	5,1	7,49	146,90
	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional</b>	%	5,1	7,49	146,90
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional</b>					
	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional</b>	%	85	100,00	117,65
	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional</b>	%	85	100,00	117,65
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>					
<b>SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>					
	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi</b>	%	69	78,55	113,85
	1 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	69	78,55	113,85
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya</b>					
KP1	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi</b>	%	69	78,55	113,85
	1.1 Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	89	94,23	105,88

PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SAT	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
	1.2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	36	<b>69,53</b>	<b>193,15</b>
	1.3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	82	<b>71,90</b>	<b>87,68</b>
	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR</b>		%	<b>79,72</b>	<b>85,37</b>	<b>107,09</b>
<b>KP2</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR</b>		%	<b>87,81</b>	<b>93,67</b>	<b>106,67</b>

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2023

Capaian sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menunjukkan hasil kerja keras seluruh personil di 5 Direktorat, Sekretariat, 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah, Sekretariat LPJK, dan 34 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi. Berdasarkan tabel di atas, Sasaran Program pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi memiliki target IKP sebesar 85% dengan realisasi sebesar 100% yang berarti Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil mencapai target** dengan capaian kinerja sebesar 117,65%. Keberhasilan capaian Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi ini didukung oleh faktor peningkatan kualitas asesor dan instruktur bidang konstruksi, adanya pembaharuan SKKNI, efisiensi kegiatan pembinaan SDM vokasional secara online, serta tingginya sinergitas program dengan lingkungan eksternal, misalnya adanya kerjasama *cost sharing* dengan Kadin. Selanjutnya, Sasaran Program pada Program Dukungan Manajemen untuk IKP 1 Tingkat kualitas sumber daya konstruksi memiliki target sebesar 69% dengan realisasi sebesar 78,55% yang berarti Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil mencapai target** dengan capaian kinerja sebesar 113,85%, dan untuk IKP 2 Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya memiliki target sebesar 87,81% dengan capaian sebesar 93,67% yang berarti Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil mencapai target** dengan capaian kinerja sebesar 106,67%. Keberhasilan capaian Program Dukungan Manajemen ini didukung oleh faktor terlaksananya pengelolaan 12 NSPK terkait tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa, tenaga kerja konstruksi, produk dalam negeri (PDN), pembinaan jafung pembina jasa konstruksi, tersusunnya SKKNI baru dan SKKNI terbarukan bidang konstruksi, sinergitas seluruh pihak internal dan eksternal dalam rangka pembinaan sumber daya konstruksi, efisiensi pelaksanaan kegiatan secara daring, tersedianya informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak, pencapaian tingkat layanan dukungan manajemen

Eselon I, ketersediaan informasi rantai pasok, penyelenggaraan jasa konstruksi, pembinaan jasa konstruksi, serta terlaksananya layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.

Capaian untuk IKP 2 pada Sasaran Program Dukungan Manajemen merupakan capaian bersama yang diselenggarakan oleh seluruh Unit Organisasi yang ada di lingkungan Kementerian PUPR yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.

#### B. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam rangka perhitungan realisasi Sasaran Program yang ada di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, terdapat rumus perhitungan di setiap Sasaran Program sesuai dengan penjelasan sebelumnya pada subbab 2.3. Setiap Sasaran Program dihitung menggunakan indikator kinerja program yang merupakan hasil perhitungan dari beberapa indikator kinerja kegiatan. Nilai dari indikator kinerja kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan bukti hasil kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sesuai dengan Sasaran Kejadiannya.

Hierarki Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan bentuk dukungan dari setiap Direktorat dan Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada dibawahnya, yaitu Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Selain itu, terdapat pula kegiatan-kegiatan yang tersebar di seluruh balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang mendukung pencapaian sasaran program.

Program yang pertama, yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Sasaran Program “Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional”, didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi dengan Sasaran Kegiatan “Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina”. Berikut adalah capaian kinerja Sasaran Kegiatan yang mendukung Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di tahun 2023:

Tabel 4. 2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan di Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi TA 2023

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
<b>UNIT ORGANISASI: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi</b>					
<b>PROGRAM: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI</b>					
<b>SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional</b>		%	5,1	7,49	146,90
1	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional</b>	%	5,1	7,49	146,90
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional</b>		%	85	100,00	117,65
	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional</b>	%	85	100,00	117,65
<b>KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASIONAL BIDANG KONSTRUKSI</b>					
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina</b>		%	65	80,99	124,60
KK1	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina</b>	%	65	80,99	124,60
<b>KOORDINATOR: DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI</b>					
<b>PELAKSANA: BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH</b>					
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>					
1	SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	Orang	24.134	<b>29.967</b>	<b>124,17</b>

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2023

Adapun penjelasan dari perhitungan indikator kinerja kegiatan di setiap Sasaran Kegiatan yang mendukung Sasaran Program Meningkatnya SDM Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional yaitu:

1. SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina

Sasaran Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Sedangkan pada pelaksanaannya, dilakukan oleh 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yaitu: BJKW I Banda Aceh, BJKW II Palembang, BJKW III Jakarta, BJKW IV Surabaya, BJKW V Banjarmasin, BJKW VI Makassar, dan BJKW VII Jayapura. Berdasarkan target PK, output kegiatan yang dihasilkan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah dengan target SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina sebesar 31.830 orang pada tahun 2023 telah tercapai. Berikut adalah capaian output kegiatannya:

**Tabel 4. 3 Capaian Output SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Terbina**

NO	OUTPUT KEGIATAN	TARGET PK (Orang)	REALISASI (Orang)
1	SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	24.134	29.967

Sumber: Balai Jasa Konstruksi Wilayah, 2023

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target DIPA masing-masing Balai Jasa Konstruksi Wilayah yang diturunkan ke dalam Perjanjian Kerja Revisi TA 2023, Balai Jasa Konstruksi Wilayah secara total juga dapat mencapai target, dengan rincian capaian sebagai berikut:

**Tabel 4. 4 Rincian Capaian DIPA/PK SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Terbina**

NO	SATUAN KERJA	TARGET PK (Orang)	REALISASI (Orang)
1	BJKW I ACEH	3.360	3.449
2	BJKW II PALEMBANG	4.000	4.231
3	BJKW III JAKARTA	4.578	5.556
4	BJKW IV SURABAYA	4.089	7.469
5	BJKW V BANJARMASIN	1.410	1.606
6	BJKW VI MAKASSAR	3.421	5.523
7	BJKW VII JAYAPURA	2.576	2.133
	<b>TOTAL</b>	<b>23.434</b>	<b>29.967</b>

Sumber: [dayanaker.binakonstruksi.pu.go.id](http://dayanaker.binakonstruksi.pu.go.id), 2023

Berdasarkan capaian output kegiatan yang dilaksanakan oleh 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah di atas, hasil tersebut digunakan sebagai masukan dalam menghitung Sasaran Kegiatan Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina dengan rincian rumus perhitungan indikator kinerja kegiatannya sebagai berikut:

$$IKK = \frac{\text{target pelatihan vokasional bidang konstruksi per tahun}}{\text{potensi lulusan vokasi per tahun}} \times 100\%$$

Berikut adalah hasil perhitungan dari indikator kinerja kegiatan Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina:

$$IKK = \frac{29.967}{37.000} \times 100\% = 80,99\%$$

Hasil dari perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **telah berhasil** dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina dengan capaian sebesar 80,99% terhadap target Renstra sebesar 65%. Selanjutnya, persentase indikator kinerja kegiatan tersebut digunakan sebagai masukan ke dalam perhitungan indikator kinerja program pada Sasaran Program Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional dengan rincian rumus perhitungan indikator kinerja program sebagai berikut:

$$IKP 1 = \frac{\text{Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang tersertifikasi per tahun}}{\text{Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina}} \times 100\%$$

Berikut adalah hasil perhitungan dari indikator kinerja program tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional:

$$IKP 1 = \frac{29.967}{29.967} \times 100\% = 100\%$$

Hasil dari perhitungan indikator kinerja program tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil** dalam mencapai target Sasaran Program Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional dengan capaian IKP sebesar 100% terhadap targetnya sebesar 85%. Selanjutnya, dari indikator kinerja program di atas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **telah berhasil** memenuhi target Sasaran Strategis Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional dengan capaian IKSS 7,49% terhadap targetnya sebesar 5,1%. Keberhasilan capaian Sasaran Strategis Pendidikan dan Pelatihan Vokasi ini didukung oleh faktor tersusunnya SKKNI baru dan SKKNI terbaru bidang konstruksi, sinergitas berbagai pihak internal dan eksternal dalam rangka pelaksanaan pembinaan SDM vokasional, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan secara daring.

Program yang kedua, yaitu Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat, Sekretariat, Balai Jasa Konstruksi Wilayah, Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, dan Sekretariat LPJK. Berikut adalah capaian kinerja Sasaran Kegiatan yang mendukung Program Dukungan Manajemen di tahun 2023:

Tabel 4. 5 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan yang Mendukung Program Dukungan Manajemen TA 2023

PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
<b>UNIT ORGANISASI: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi</b>						
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						
<b>SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>						
1	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi</b>		%	69	78,55	113,85
	1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	69	78,55	113,85
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya</b>						
IKP1	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi</b>		%	69	78,55	113,85
	1.1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	89	94,23	105,88
	1.2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	36	69,53	193,15
	1.3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	82	71,90	87,68
<b>KEGIATAN 1: PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI</b>						
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi</b>			%	75	88,41	117,88
IKK1	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi</b>		%	75	88,41	117,88
<b>KEGIATAN 2 : PEMBINAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI</b>						
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa</b>			%	92,5	94,28	101,92
IKK2	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa</b>		%	92,5	94,28	101,92
<b>KEGIATAN 3: PEMBINAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI</b>						
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)</b>			%	100	100,00	100,00
IKK3	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi</b>		%	100	100,00	100,00
<b>KEGIATAN 4: PEMBINAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI</b>						
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi</b>			%	36	69,53	193,15
IKK4.1	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat</b>		%	9,76	13,66	139,96

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
IKK4.2	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	%	63	125,41	199,06
<b>KEGIATAN 5: PEMBINAAN KINERJA KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN MATERIAL, PERALATAN, DAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI</b>					
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi		%	82	71,90	87,68
IKK5.1	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	%	61	36,15	59,26
IKK5.2	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	%	40	48,18	120,45
IKK5.3	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase ketersediaan data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN	%	43	95,00	220,93
2	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	79,72	85,37	107,09
IKP2	INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	%	87,81	93,67	106,67
<b>KEGIATAN 6: PENYELENGGARAAN LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON 1, INFORMASI JASA KONSTRUKSI, DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>					
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		%	93	94,14	101,23
IKK6.1	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	94	100,00	106,38
IKK6.2	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	92	88,29	95,97

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2023

Program Dukungan Manajemen memiliki Sasaran Program yang terdiri dari 2 indikator kinerja program, yaitu IKP 1 Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dan IKP 2 Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR. Adapun penjelasan dari perhitungan indikator kinerja kegiatan di setiap **Sasaran Kegiatan yang mendukung Sasaran Program Dukungan Manajemen pada IKP 1 Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dan mendukung Sub indikator pada IKP 1 Tingkat penyelenggaraan jasa konstruksi**, yaitu:

## 1. SK 1: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan didukung dengan 3 output kegiatan, yaitu: (1) Profil pengelolaan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi, (2) Profil penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi, dan (3) Profil kerja sama bidang jasa konstruksi. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 1: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi:

Tabel 4. 6 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
<b>UNIT ORGANISASI: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi</b>						
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						
<b>SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>						
1	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi</b>		%	69	78,55	113,85
	1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	69	78,55	113,85
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya</b>						
IKP1	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi</b>		%	69	78,55	113,85
	1.1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	89	93,77	105,36
	1.2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	36	69,53	193,15
	1.3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	82	71,90	87,68
<b>KEGIATAN 1: PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI</b>						
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi</b>			%	75	88,41	117,88
IKK1	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi</b>		%	75	88,41	117,88
<b>KOORDINATOR: DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>						
<b>PELAKSANA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>						
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
1	Profil pengelolaan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	NSPK	1	13,00	1300,00
2	Profil penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	Laporan	1	1,00	100,00
3	Profil kerja sama bidang jasa konstruksi	Kesepakatan	1	1,00	100,00

Sumber: Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, 2023

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan nilai rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi, dengan rumus sebagai berikut:

- Nilai rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi

$$IKK 1 = \frac{\text{Jumlah total nilai proyek}}{\text{Jumlah proyek yang disampling}} \times 100\%$$

$$* \text{Nilai Proyek} = \frac{\text{jumlah indikator penerapan NSPK yang diterapkan}}{\text{jumlah indikator dalam NSPK}} \times 100\%$$

Sesuai dengan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Unit Kerja Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini, adalah sebagai berikut:

$$IKK 1 = \frac{22.986}{260} \times 100\% = 88,41\%$$

Hasil dari perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **telah berhasil** dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi dengan capaian sebesar 88,41% terhadap targetnya sebesar 75%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor telah terlaksananya realisasi profil pengelolaan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi sebesar 13 NSPK dari target 1 NSPK, realisasi profil penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi sebesar 1 Laporan dari target 1 Laporan, dan realisasi profil kerja sama bidang jasa konstruksi sebesar 1 Kesepakatan dari target 1 Kesepakatan. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi melakukan penilaian terhadap rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi yang sedang dijalankan oleh Kementerian PUPR di tahun

2023. Penilaian tersebut menggunakan metode survey menggunakan Daftar SIMAK 2023 yang memuat 3 indikator kunci, yaitu:

- a. Pemenuhan kelengkapan administrasi kontrak;
- b. Pemenuhan kesesuaian substansi administrasi kontrak; dan
- c. Pemenuhan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan kontrak.

Penerapan NSPK yang dinilai terdiri dari Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Kontrak Konstruksi terhadap paket pekerjaan yang telah di uji petik menggunakan, sebanyak 260 paket pekerjaan. Rangkuman hasil survey Daftar SIMAK 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 7 Rangkuman Hasil Survey Daftar SIMAK 2023**

No	Penerapan NSPK	Nilai Rata-Rata (%)
1	NSPK Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	92,44
2	NSPK Kontrak Konstruksi	84,37
	<b>Total Rata-Rata</b>	<b>88,41</b>

Sumber: Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, 2023

Beberapa temuan permasalahan yang didapatkan dari penilaian penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi yaitu:

- a. Dalam identifikasi kebutuhan tidak mencantumkan cara pengadaan dan waktu pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- b. Satker/PPK dalam menyusun spesifikasi teknis, ditemukan ketidaklengkapan substansi antara lain penjelasan terkait jangka waktu pelaksanaan, ketersediaan pasar, produk ramah lingkungan, spesifikasi peralatan, mekanisme pengujian, dan tata cara pengukuran;
- c. Satker/PPK dalam menyusun rancangan kontrak, tidak memuat Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
- d. Satker/PPK dalam menyusun HPS, tidak memuat persetujuan tanda tangan dari Satker/PPK terkait;
- e. Pada Surat Undangan Evaluasi Kewajaran Harga, pokja pemilihan tidak mencantumkan permintaan kepada penyedia untuk menyiapkan bukti dukung untuk Perhitungan Kuantitas, Koefisien dan informasi Nilai Keuntungan dan Biaya Umum;
- f. Dalam undangan Klarifikasi Kewajaran Harga tidak tercantum/diatur informasi mengenai siapa personel yang berwenang untuk menghadiri Evaluasi Kewajaran Harga;
- g. Pokja Pemilihan tidak mencantumkan keterangan peserta yang ditunjuk sebagai pemenang tender, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai HPS dalam Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga;
- h. Format SPPBJ belum sesuai dengan ketentuan peraturan;

- i. Berita acara rapat persiapan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- j. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dilaksanakan sebelum diterbitkannya SPPBJ;
- k. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak masih ditafsirkan sebagai rapat *Pre Award Meeting*;
- l. SSUK dan SSKK tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
- m. Tidak melengkapi SK Pelaksana;
- n. Waktu penyerahan jaminan pelaksanaan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan;
- o. Format SPMK belum sesuai dengan Model Dokumen Pemilihan ;
- p. Substansi pembahasan PCM belum sesuai dengan ketentuan (terkait lampiran detail berita acara);
- q. Waktu pelaksanaan PCM yang tidak sesuai dengan ketentuan (dilakukan sebelum terbit SPMK; dilakukan lebih dari 7 HK setelah SPMK terbit);
- r. Tidak dilakukan alih pengalaman/keahlian padahal nilai proyek diatas 50M;
- s. Tidak dilakukan alih pengalaman/keahlian padahal nilai proyek diatas 25M bagi subkon/sub penyedia.

Selain itu, Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi juga memiliki capaian output kegiatan yaitu:

**Tabel 4. 8 Capaian Output Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi**

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
1	<p>Profil pengelolaan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi</p> <p>Terdiri dari:</p> <p>a. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/SE/M/2023 tentang Pedoman Pendampingan Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing dengan Mekanisme Katalog</p>	NSPK	1	13

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	<p>Elektronik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>b. Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor Bk01-Dk/224 tentang Penyesuaian Ketentuan Evaluasi terkait Perizinan Berusaha di Bidang Jasa Konstruksi dan Penyesuaian Persyaratan Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk Pekerjaan Spesialis dalam Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR;</p> <p>c. Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor Bk0404-Dk/253 tentang Penerapan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) dalam Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR dan Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor Bk0404-Dk/351 tentang Tindak Lanjut Penerapan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN) dalam Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian PUPR;</p> <p>d. Surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor Bk0301-Dk/942 tentang Percepatan</p>			

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	<p>Proses Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>e. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/SE/M/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembahasan Usulan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konstruksi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;</p> <p>f. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2023 Tahun 2023 tentang Proses Penetapan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Build) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>g. Konsep Revisi Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan</p>			

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	<p>Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>h. Masukan Revisi Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;</p> <p>i. Konsep Instruksi Menteri PUPR tentang Mekanisme Kaji Cepat dan Reviu atas Rencana Penggunaan Metode Pemilihan Penunjukan Langsung di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;</p> <p>j. Penyusunan Surat Edaran Menteri tentang Standar Susunan Tenaga Ahli Layanan Usaha Jasa Konsultasi Perancangan Melalui Penyedia Jasa Perancangan;</p> <p>k. Penyusunan Surat Edaran Menteri tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi;</p> <p>l. Penyusunan Modul Sharing Knowledge Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Design and Build untuk Tahap Perencanaan dan Persiapan Pengadaan;</p>			

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	<p>m. Penyusunan Modul Bimbingan Teknis Pra Konstruksi untuk Kegiatan Perancangan dan Pengawasan Konstruksi;</p> <p>n. Penyusunan Pedoman Implementasi Kontrak Lumsum Jasa Konsultansi Konstruksi.</p>			
2	<p>Profil penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi</p> <p>Bentuk pelaksanaan:</p> <p>a. Pemantauan dan Evaluasi Tingkat Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi TA 2023</p>	Laporan	1	1
3	<p>Profil kerja sama bidang jasa konstruksi</p> <p>Bentuk pelaksanaan:</p> <p><u>Kerja Sama Dalam Negeri</u></p> <p>a. Kegiatan Bimbingan Teknis Pra Konstruksi</p> <p>b. Penyusunan Surat Edaran Menteri PUPR Tentang Standar Susunan Tenaga Ahli Layanan Usaha Jasa Konsultansi Perancangan Melalui Penyedia Jasa Perancangan Konstruksi;</p>	Kesepakatan	1	1

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	<p>c. Kegiatan Pelaporan Rencana Aksi Program Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK);</p> <p>d. MoU dengan Asosiasi Semen Indonesia (ASI);</p> <p>e. MoU dengan Asosiasi Semen Indonesia (ASI)</p> <p><u>Kerja Sama Luar Negeri</u></p> <p>a. Kerjasama Luar Negeri (PKS Program Specified Skilled-Workers (SSW));</p> <p>b. Perundingan Internasional (Indonesia – Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC CEPA));</p> <p>c. Indonesia– European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA);</p> <p>d. Indonesia– Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK CEPA);</p> <p>e. Indonesia- United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE CEPA);</p>			

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	f. Joint Initiative on Services Domestic Regulation (JISDR) WTO.			
	<u>Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</u>			
	a. Status dan Progres Kegiatan Kerja Sama 2023			
	b. Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama PKS Aktif			

Sumber: Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, 2023

## 2. SK 2: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di 34 wilayah/provinsi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan didukung dengan 4 output kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, yaitu: (1) Profil pengelolaan NSPK pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi, (2) Profil kinerja UKPBJ dan UPTPBJ (kelembagaan, kinerja layanan, penerapan NSPK, penerapan SIPBJ), (3) Profil kinerja penyedia jasa konstruksi, dan (4) Profil kepatuhan internal Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Selain itu, terdapat 1 output kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi yaitu Layanan pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 2: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa:

**Tabel 4. 9 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa**

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
<b>UNIT ORGANISASI: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi</b>					
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>					
<b>SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>					
1	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi</b>	%	69	<b>78,55</b>	<b>113,85</b>

PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
	1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	69	78,55	113,85
		<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya</b>				
<b>IKP1</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi</b>		%	69	78,55	113,85
	1.1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	89	93,77	105,88
	1.2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	36	69,53	193,15
	1.3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	82	71,90	87,68
		<b>KEGIATAN 2 : PEMBINAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI</b>				
		<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa</b>	%	92,5	94,28	101,92
<b>IKK2</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa</b>		%	92,5	94,28	101,92
	2.1	Persentase tender/seleksi tepat waktu	%	95	85,71	90,22
	2.2	Persentase sanggah dan sanggah banding tidak benar	%	98	91,99	93,87
	2.3	Persentase pengaduan tidak benar	%	98	90,54	92,39
	2.4	Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar	%	93	99,62	107,12
	2.5	Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ	%	91	100,00	109,89
	2.6	Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang Berkontrak di PUPR	%	80	97,81	122,26
		<b>KOORDINATOR: DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI</b>				
		<b>PELAKSANA: DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI</b>				
		<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>				
	1	Profil pengelolaan NSPK pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi	NSPK	1	2,00	200,00
	2	Profil kinerja UKPBJ dan UPTPBJ (kelembagaan, kinerja layanan, penerapan NSPK, penerapan SIPBJ)	Laporan	1	8,00	800,00

PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
	3	Profil kinerja penyedia jasa konstruksi	Layanan	1	11,00	1100,00
	4	Profil Kepatuhan Intern Ditjen Bina Konstruksi	Laporan	1	3,00	300,00
<b>PELAKSANA: BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI</b>						
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>						
	1	Layanan pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi	Layanan	1	1,00	100,00

Sumber: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, 2023

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan sub indikator yang mendukung indikator kinerja kegiatan IKK 2: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 2 = \frac{\% IKK\ 2.1 + \% IKK\ 2.2 + \% IKK\ 2.3 + \% IKK\ 2.4 + \% IKK\ 2.5 + \% IKK\ 2.6}{6}$$

$$\% IKK\ 2.1 = \frac{\text{Total paket} - \text{Total paket terlambat}}{\text{Total paket}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 2.2 = \frac{\text{Total sanggah dan sanggah banding} - \text{Total sanggah dan sanggah banding benar}}{\text{Total sanggah dan sanggah banding}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 2.3 = \frac{\text{Total pengaduan} - \text{Total pengaduan benar}}{\text{Total pengaduan}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 2.4 = \frac{\text{Total penetapan pemenang yang ditolak PPK} - \text{Total penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti benar}}{\text{Total penetapan pemenang yang ditolak PPK}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 2.5 = \frac{\text{Jumlah variabel yang dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan}^*}{\text{Total variabel yang harus dipenuhi untuk mencapai tingkat kematangan yang ditetapkan}^*} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 2.6 = \frac{\text{Realisasi data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR}}{\text{Jumlah BUJK yang berkontrak di PUPR}} \times 100\%$$

Keterangan:

IKK 2. Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa

Sub Indikator:

IKK 2.1 Persentase tender/seleksi tepat waktu

IKK 2.2 Persentase sanggah/sanggah banding tidak benar

IKK 2.3 Persentase pengaduan tidak benar

IKK 2.4 Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar

IKK 2.5 Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ

IKK 2.6 Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR

Sesuai dengan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Unit Kerja Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini, adalah sebagai berikut:

$$IKK 2 = \frac{85,71\% + 91,99\% + 90,54\% + 99,62\% + 100\% + 97,81\%}{6} = 94,28\%$$

Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 2: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa, yaitu:

**Tabel 4. 10 Rincian Hasil Perhitungan Sub indikator yang Mendukung IKK 2**

Sub Indikator	Nilai (%)
IKK 2.1 Persentase tender/seleksi tepat waktu	85,71
IKK 2.2 Persentase sanggah/sanggah banding tidak benar	91,99
IKK 2.3 Persentase pengaduan tidak benar	90,54
IKK 2.4 Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar	99,62
IKK 2.5 Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ	100,00
IKK 2.6 Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR	97,81

Sumber: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, 2023

Hasil dari perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **telah berhasil** dalam mencapai target Sasaran Kegiatan “Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa” dengan capaian sebesar 94,28% terhadap targetnya sebesar 92,5%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor telah terlaksananya 3.339 paket tender/seleksi selesai tepat waktu, terpenuhinya 9 variabel dari 9 variabel kematangan UKPBJ Kementerian PUPR dan terdapat 2.770 penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi melakukan analisis kinerja berdasarkan kegagalan pencapaian target, yaitu sebagai berikut:

- a. Kendala yang cukup berpengaruh adalah belum dianggarkannya honorarium kelompok kerja pemilihan di Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi. Pagu masih dianggarkan di masing-masing Unit Organisasi sesuai dengan rencana pelaksanaan pada tahun 2023, namun kemudian dikembalikan ke Direktorat pengadaan Jasa Konstruksi;

- b. Anggaran pembayaran honorarium pokja yang belum termasuk ke dalam pagu Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi ini mengakibatkan terhambatnya penyerapan anggaran pada awal tahun. Adapun honor pokja masuk ke DIPA Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi pada revisi DIPA pada tanggal 15 April 2023;
- c. Terjadi perubahan organisasi yang mengakibatkan hilangnya tingkat eselon IV. Hal ini berpengaruh kepada berubahnya alur garis komando dalam unit kerja. Sehingga perlu adanya adaptasi kembali dengan adanya garis komando baru yang disebut “Ketua Tim” di masing-masing subdirektorat.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, sebagai koordinator dari pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa, memiliki capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi itu sendiri dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di 34 Provinsi, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4. 11 Capaian Output Kegiatan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan BP2JK**

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
<b>Pelaksana: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi</b>				
1	Profil pengelolaan NSPK pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi  <u>Dengan bentuk:</u> 1. Laporan Hasil Penyusunan Rekomendasi Tim Teknis atas Penolakan Hasil Pemilihan oleh PPK; 2. SOP Tata Cara Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	NSPK	1	2
2	Profil Kinerja UKPBJ dan UPTPBJ (kelembagaan, kinerja layanan, penerapan NSPK, penerapan SIPBJ)  <u>Dengan bentuk:</u> 1. Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Kelompok Kerja	Laporan	1	8

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	<p>Pemilihan dalam Pengadaan Jasa Konstruksi</p> <p>2. Laporan Hasil Penyusunan Rekomendasi Penetapan Pemenang pada Paket Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 100 M dan Paket Jasa Konsultansi di atas Rp 10 M</p> <p>3. Laporan Penerapan SIKOMPAK pada Pembangunan Infrastruktur IKN</p> <p>4. Laporan Hasil Penyusunan Rekomendasi Tim Teknis atas Penolakan Hasil Pemilihan Oleh PPK</p> <p>5. Laporan Pemenuhan 9 Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan PBJ Kementerian PUPR Tahun 2022-2024 pada Strategi 1 (Penguatan UKPBJ)</p> <p>6. Laporan Capaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level III Proaktif</p> <p>7. Buku Profil Kinerja UKPBJ dan UPTPBJ Tahun Anggaran 2023 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)</p>			
3	<p>Profil Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi</p> <p><u>Dengan bentuk:</u></p> <p>1. Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (SIPBJ)</p> <p>2. Sistem Informasi Kontrak dan Manajemen Pengendalian</p>	Layanan	1	11

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	<p>Pelaksanaan Kontrak (SIKOMPAK)</p> <p>3. SE Menteri PUPR No. 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendampingan Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing Dengan Mekanisme Katalog Elektronik di PUPR</p> <p>4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Market Sounding Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR Etalase Produk Rumah Susun</p> <p>5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tata Cara Pelaksanaan E-Purchasing dan Mekanisme Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR</p> <p>6. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi SE Menteri PUPR Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendampingan Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing dengan Mekanisme Katalog Elektronik di Kementerian PUPR</p>			

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	7. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Katalog Elektronik Sektoral Kementerian PUPR			
	8. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Workshop Implementasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik di Kementerian PUPR			
	9. Laporan Capaian Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik Kementerian PUPR			
	10. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Baik dan Tata Cara Pengusulan Pelabelan Produk dan Penyedia Pada Katalog Elektronik;			
	11. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Workshop Peningkatan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan			
4	<p>Profil Kepatuhan Intern</p> <p><u>Dengan bentuk:</u></p> <p>1. Laporan Pelaksanaan Audit Internal Surveillance</p>	Laporan	1	3

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	Penerapan ISO 37001:2016 SMAP 2. Laporan Pelaksanaan Audit Internal Penerapan ISO 37001:2016 SMAP di 6 Balai Pilot Project Batch III 3. Laporan Pengelolaan Aduan pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian PUPR TA 2023			
<b>Pelaksana: Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi</b>				
1	Layanan pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi	Layanan	1	1

Sumber: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, 2023

### 3. SK 3: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi (SMKK) yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Keberlanjutan Konstruksi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan didukung dengan 2 output kegiatan, yaitu: (1) Profil pengelolaan NSPK sistem manajemen keselamatan konstruksi dan (2) Profil penerapan NSPK sistem manajemen keselamatan konstruksi. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 2: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK):

**Tabel 4. 12 Capaian Kinerja SK Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi**

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
<b>UNIT ORGANISASI: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi</b>					
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>					
<b>SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>					
1	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi</b>	%	69	<b>78,55</b>	<b>113,85</b>

PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
	1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	69	<b>78,55</b>	<b>113,85</b>
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya</b>						
<b>KPI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi</b>		%	<b>69</b>	<b>78,55</b>	<b>113,85</b>
	1.1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	89	<b>94,23</b>	<b>105,88</b>
	1.2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	36	<b>69,53</b>	<b>193,15</b>
	1.3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	82	<b>71,90</b>	<b>87,68</b>
<b>KEGIATAN 3: PEMBINAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI</b>						
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)</b>			%	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IKK3</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi</b>		%	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>KOORDINATOR: DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI</b>						
<b>PELAKSANA: DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI</b>						
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>						
	1	Profil pengelolaan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	NSPK	1	<b>2,00</b>	<b>200,00</b>
	2	Profil penerapan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Laporan	1	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, 2023

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi, dengan rumus sebagai berikut:

– Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi

$$IKK\ 3 = \frac{\text{Jumlah proyek strategis yang tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah proyek strategis}} \times 100\%$$

Sesuai dengan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Unit Kerja Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini, adalah sebagai berikut:

$$IKK 3 = \frac{126}{126} \times 100\% = 100\%$$

Hasil dari perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil** mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dengan capaian sebesar 100% terhadap targetnya sebesar 100%. Selain itu, Direktorat Keberlanjutan Konstruksi juga memiliki target output kegiatan yaitu:

**Tabel 4. 13 Capaian Output Kegiatan Direktorat Keberlanjutan Konstruksi**

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
1	Profil pengelolaan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi  Terdiri dari: 1. Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum 2. Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi No. 73/SE/Dk/2023 Tentang tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	NSPK	1	2
2	Profil penerapan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi  Dalam bentuk: 1. Profil Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Laporan	1	1

Sumber: Direktorat Keberlanjutan Konstruksi, 2023

## 4. SK 4: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi

Sasaran Kegiatan ini mendukung pemenuhan Sub IKP 1 Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi dengan target sebesar 36%. Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi dan 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah yang melayani seluruh provinsi di Indonesia. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan didukung dengan 2 output kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah, yaitu: (1) Tenaga kerja konstruksi terbina dan (2) Laporan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi. Selain itu, terdapat 6 output kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi yaitu (1) Profil pengelolaan NSPK kompetensi tenaga kerja konstruksi, (2) Dokumen SKKNI dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi, (3) Profil tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor, (4) Profil mutu pelaksanaan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi, (5) Profil pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan, dan (6) Layanan penyetaraan kompetensi (*Mutual Recognition Arrangement*). Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 4: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi:

**Tabel 4. 14 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi**

PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
<b>UNIT ORGANISASI: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi</b>						
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						
<b>SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>						
1	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi</b>		%	69	78,55	113,85
	1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	69	78,55	113,85
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya</b>						
IKP1	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi</b>		%	69	78,55	113,85
	1.1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	89	94,23	105,88
	1.2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	36	69,53	193,15
	1.3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	82	71,90	87,68
<b>KEGIATAN 4: PEMBINAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI</b>						
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi</b>			%	36	69,53	193,15
IKK4.1	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat</b>		%	9,76	13,66	139,96

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
<b>KOORDINATOR: DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI</b>						
<b>PELAKSANA: BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH</b>						
	<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>					
	1	Tenaga kerja konstruksi terbina	Orang	15.022	<b>18.142</b>	<b>120,77</b>
	2	Laporan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi	Laporan	7	<b>7,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IKK4.2</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi</b>		<b>%</b>	<b>63</b>	<b>125,41</b>	<b>199,06</b>
	4.2 .1	Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi	%	41	<b>38,69</b>	<b>94,37</b>
	4.2 .2	Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi	%	24	<b>23,26</b>	<b>96,93</b>
	4.2 .3	Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi	%	94	<b>53,21</b>	<b>56,61</b>
	4.2 .4	Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi	%	92	<b>386,46</b>	<b>420,06</b>
<b>PELAKSANA: DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI</b>						
	<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>					
	1	Profil pengelolaan NSPK kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	1	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>
	2	Dokumen SKKNI dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	15	<b>4,00</b>	<b>26,67</b>
		SKKNI		10	<b>2,00</b>	
		Modul		5	<b>2,00</b>	
	3	Profil tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor	Layanan	1	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>
		Asesor		100	<b>248</b>	
		Instruktur		500	<b>1148</b>	
	4	Profil mutu pelaksanaan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Lembaga	1	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>
	5	Profil pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan	Layanan	1	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>
	6	Layanan penyetaraan kompetensi (Mutual Recognition Arrangement)	Layanan	1	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, 2023

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan 2 indikator kinerja kegiatan, yaitu IKK 4.1 Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dan

IKK 4.2 Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

IKK 4.1. Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat

$$IKK\ 4 = \frac{\% IKK\ 4.1 + \% IKK\ 4.2}{2}$$

$$\% IKK\ 4.1 = \frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat}}{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi (BPS)}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 4.2 = \frac{\% IKK\ 4.2.1 + \% IKK\ 4.2.2 + \% IKK\ 4.2.3 + \% IKK\ 4.2.4}{4} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.1 = \frac{\text{Jumlah SKKNI bidang konstruksi yang terbarukan}}{\text{Jumlah kebutuhan SKKNI bidang konstruksi}} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.2 = \frac{\text{Jumlah modul bidang konstruksi yang terbarukan}}{\text{Jumlah kebutuhan modul bidang konstruksi}} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.3 = \frac{\text{Jumlah asesor bidang konstruksi}}{\text{Jumlah kebutuhan asesor bidang konstruksi}} \times 100\%$$

- Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi

$$\% IKK\ 4.2.4 = \frac{\text{Jumlah instruktur bidang konstruksi}}{\text{Jumlah kebutuhan instruksi bidang konstruksi}} \times 100\%$$

IKK 4.2. Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi

Sub Indikator:

IKK 4.2.1. Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi

IKK 4.2.2. Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi

IKK 4.2.3. Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi

IKK 4.2.4. Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi

a. IKK 4.1 Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat

IKK 4.1 dengan target persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat sebesar 12% di tahun 2023 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari jumlah sertifikat tenaga kerja konstruksi yang terbit pada tahun 2023, baik Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja, yang terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi melalui aplikasi Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI). Hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 4.1 = \frac{598.223 + 283.786 + 89.907 + 58.317 + 11299}{7.624.794} \times 100\% = 13,66\%$$

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat, menunjukkan bahwa Balai Jasa Konstruksi Wilayah **telah berhasil** mendukung pemenuhan target indikator kinerja kegiatan tersebut. Berikut adalah detail capaian indikator kinerja kegiatan yang pertama, yaitu:

**Tabel 4. 15 Detil Capaian IKK 4.1 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikat**

No	Sertifikat Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah Sertifikat
1	Sertifikat Keahlian Kerja	2.331
2	Sertifikat Keterampilan Kerja	8.968
<b>Total</b>		<b>11.299</b>

Sumber: Sekretariat LPJK, 2023

Balai Jasa Konstruksi Wilayah selaku pelaksana kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Indonesia turut andil dalam pelaksanaan pemenuhan sertifikasi tenaga kerja konstruksi pada tahun 2023 dengan hasil output kegiatan berupa Tenaga Kerja Konstruksi Terbina. Berdasarkan target Renstra dan PK Revisi, Balai Jasa Konstruksi Wilayah **berhasil** mencapai target. Serta pada semester TA 2023 ini BJKW masih menjalankan tugas tambahan terkait pelatihan tenaga kerja konstruksi program Ibu Kota Negara (IKN). Hal tersebut ditujukan untuk mendukung persiapan pembangunan IKN, sehingga SDM BJKW yang terbatas harus melaksanakan pelatihan baik itu vokasi, reguler dan juga IKN.

Berikut adalah detail capaian output kegiatan pembinaan tenaga kerja konstruksi yang dilakukan oleh 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah sesuai dengan target Renstra, yaitu:

**Tabel 4. 16 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan Renstra**

NO	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (Orang)	REALISASI (Orang)
1	Tenaga kerja konstruksi terbina	15.022	18.142

Sumber: Balai Jasa Konstruksi Wilayah, 2023

Jik dibandingkan dengan target di dalam Perjanjian Kinerja, Balai Jasa Konstruksi Wilayah juga **telah mencapai target**. Berikut adalah rincian capaian Balai Jasa Konstruksi Wilayah TA 2023 sesuai dengan target PK Revisi TA 2023:

**Tabel 4. 17 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Berdasarkan PK**

NO	SATUAN KERJA	TARGET PK (Orang)	REALISASI (Orang)
1	BJKW I ACEH	1.558	1.743
2	BJKW II PALEMBANG	1.200	1.768
3	BJKW III JAKARTA	1.187	1.348
4	BJKW IV SURABAYA	3.012	4.321
5	BJKW V BANJARMASIN	4.354	5.129
6	BJKW VI MAKASSAR	2.600	2.913
7	BJKW VII JAYAPURA	1.141	920
	<b>TOTAL</b>	<b>1.5052</b>	<b>1.8142</b>

Sumber: [dayanaker.binakonstruksi.pu.go.id](http://dayanaker.binakonstruksi.pu.go.id) 2023

Sementara berikut rincian target dan realisasi pelatihan tenaga kerja konstruksi khusus IKN masing-masing Balai Jasa Konstruksi Wilayah yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja BJKW TA 2023 revisi:

**Tabel 4. 18 Capaian Output Kegiatan Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Khusus IKN Berdasarkan PK**

NO	SATUAN KERJA	TARGET PK (Orang)	REALISASI (Orang)
1	BJKW III JAKARTA	699	725
2	BJKW IV SURABAYA	2.000	2.392
3	BJKW V BANJARMASIN	2.801	4.424
4	BJKW VI MAKASSAR	2.000	2.300
	<b>TOTAL</b>	<b>8.500</b>	<b>9.841</b>

Sumber: [dayanaker.binakonstruksi.pu.go.id](http://dayanaker.binakonstruksi.pu.go.id) 2023

Terlihat dari tabel diatas bahwa Balai Jasa Konstruksi Wilayah **mencapai target** pembinaan tenaga kerja konstruksi khusus IKN dengan capaian orang sebesar 9.841 dari target 8.500 orang. Target pembinaan IKN ini masuk menjadi tambahan output capaian pembinaan tenaga kerja konstruksi terbina dan mempengaruhi capaian kinerja renstra Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada SK.4 yaitu Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi.

Selain itu, Balai Jasa Konstruksi Wilayah juga menghasilkan output kegiatan berupa Laporan fasilitasi pembinaan jasa konstruksi, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4. 19 Capaian Output Kegiatan Laporan Fasilitas Pembinaan Jasa Konstruksi**

NO	SATUAN KERJA	LAPORAN FASILITASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	
		TARGET	REALISASI
1	BJKW I ACEH	1	1
2	BJKW II PALEMBANG	1	1
3	BJKW III JAKARTA	1	1
4	BJKW IV SURABAYA	1	1
5	BJKW V BANJARMASIN	1	1
6	BJKW VI MAKASSAR	1	1
7	BJKW VII JAYAPURA	1	1
	<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Sumber: Balai Jasa Konstruksi Wilayah, 2023

b. IKK 4.2 Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi

IKK 4.2 dengan target persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi sebesar 63% di tahun 2023 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari hasil perhitungan 4 sub indikator yaitu: (1) Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi, (2) Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi, (3) Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi, dan (4) Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi. Hasil tersebut diambil dari laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Unit Kerja Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang kedua, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 4.2 = \frac{38,69\% + 23,26\% + 53,21\% + 386,46\%}{4} \times 100\% = 125,41\%$$

Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 4.2 Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi, yaitu:

**Tabel 4. 20 Hasil Perhitungan Sub Indikator yang Mendukung IKK 4.2 Persentase Tingkat Dukungan Pelatihan/Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi**

Sub Indikator	Nilai (%)
IKK 4.2.1 Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi	38,69

Sub Indikator	Nilai (%)
IKK 4.2.2 Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi	23,26
IKK 4.2.3 Persentase kecukupan asesor kompetensi konstruksi	53,21
IKK 4.2.4 Persentase kecukupan instruktur bidang konstruksi	386,46

Sumber: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, 2023

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang kedua, persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi, menunjukkan bahwa Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi **telah berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor telah tersusunnya SKKNI baru, SKKNI terbaru bidang konstruksi, serta terpenuhinya jumlah instruktur bidang konstruksi. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang kedua berasal dari capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi. Berikut adalah detail capaian output kegiatan pembinaan tenaga kerja konstruksi yang dihasilkan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, yaitu:

**Tabel 4. 21 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi**

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
1	Profil pengelolaan NSPK kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	1	1
2	Dokumen SKKNI dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	15	4
3	Profil tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor	Layanan	1	1
4	Profil mutu pelaksanaan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Lembaga	1	1
5	Profil pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan	Layanan	1	1

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
	<u>Dalam bentuk:</u> Profil Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan			
6	Layanan penyetaraan kompetensi ( <i>Mutual Recognition Arrangement</i> )  <u>Dalam bentuk:</u> Laporan layanan registrasi kesetaraan kompetensi Insinyur dan Arsitek Tingkat ASEAN	Layanan	1	1

Sumber: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, 2023

Beberapa produk yang dihasilkan oleh Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi yang mendukung pencapaian IKK 2 yaitu:

1. Persentase kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi Penyusunan 2 SKKNI Jabatan kerja Bidang pengeboran air tanah dan SKKNI Jabatan Kerja Bidang Ahli Plambing dan Pompa Mekanik;
2. Persentase kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi Jabatan Kerja Bidang Bangunan Gedung Hijau dan Materi Pelatihan Jabatan Kerja Bidang Ahli Plambing dan Pompa Mekanik.

Hasil dari 2 perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **telah berhasil** dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi dengan capaian sebesar 69.53% terhadap targetnya sebesar 36%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor telah terlaksananya target jumlah tenaga kerja konstruksi tersertifikat sejumlah 1.041.532 orang dari jumlah TKK 7.624.794 orang, tersusunnya SKKNI baru, SKKNI terbarukan bidang konstruksi, serta terpenuhinya jumlah asesor dan instruktur bidang konstruksi, serta sinergi berbagai pihak baik internal dan eksternal guna mendukung kegiatan pembinaan tenaga kerja konstruksi.

5. SK 5: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi

Sasaran Kegiatan ini mendukung pemenuhan Sub IKP 1 Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi dengan target sebesar 82%. Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dan didukung dengan beberapa output kegiatan, yaitu: (1) IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi, yang didukung oleh 3 output kegiatan berupa Profil pengelolaan NSPK kelembagaan masyarakat dan pemerintah urusan jasa konstruksi, Profil kinerja OPD sub urusan jasa konstruksi, dan Profil kinerja kelembagaan masyarakat jasa konstruksi, (2) IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang didukung oleh output kegiatan berupa SDM Pejabat Fungsional yang terfasilitasi, dan (3) IKK 5.3 Persentase ketersediaan data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN yang didukung oleh output kegiatan berupa Profil pengelolaan NSPK terkait pemanfaatan MPK, teknologi, dan TKDN dan Profil rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 5: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi:

**Tabel 4. 22 Capaian Kinerja SK Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pembinaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi**

PROGRA/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
<b>UNIT ORGANISASI: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi</b>					
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>					
<b>SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>					
1	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi</b>	%	69	<b>78,55</b>	<b>113,85</b>
	1 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	69	<b>78,55</b>	<b>113,85</b>
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya</b>					
IKP1	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi</b>	%	69	<b>78,55</b>	<b>113,85</b>

PROGRA/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
	1.1	Tingkat penyelenggaraan tertib jasa konstruksi	%	89	<b>94,23</b>	<b>105,88</b>
	1.2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	36	<b>69,53</b>	<b>193,15</b>
	1.3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	82	<b>71,90</b>	<b>87,68</b>
<b>KEGIATAN 5: PEMBINAAN KINERJA KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN MATERIAL, PERALATAN, DAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI</b>						
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi</b>			%	<b>82</b>	<b>71,90</b>	<b>87,68</b>
<b>IKK5.1</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi</b>		%	<b>61</b>	<b>36,15</b>	<b>59,26</b>
	5.1.1	Persentase OPD terbentuk dan operasional	%	80	<b>75,18</b>	<b>93,98</b>
	5.1.2	Persentase Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi	%	86	<b>35,00</b>	<b>40,70</b>
	5.1.3	Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI	%	80	<b>64,00</b>	<b>80,00</b>
	5.1.4	Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	%	54	<b>69,31</b>	<b>128,35</b>
<b>KOORDINATOR: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI</b>						
<b>PELAKSANA: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI</b>						
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>						
	1	Profil pengelolaan NSPK kelembagaan masyarakat dan pemerintah urusan jasa konstruksi	NSPK	1	<b>5,00</b>	<b>500,00</b>
	2	Profil kinerja OPD sub urusan jasa konstruksi	Laporan	1	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>
	3	Profil kinerja kelembagaan masyarakat jasa konstruksi	Lembaga	2	<b>14,00</b>	<b>700,00</b>
<b>IKK5.2</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi</b>		%	<b>40</b>	<b>48,18</b>	<b>120,45</b>

PROGRA/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATO R	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
PELAKSANA: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI					
	OUTPUT KEGIATAN :				
	1	SDM Pejabat Fungsional yang terfasilitasi	Orang	100	660,00
IKK5. 3	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase ketersediaan data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN		%	43	95,00
PELAKSANA: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI					
	OUTPUT KEGIATAN :				
	1	Profil pengelolaan NSPK terkait pemanfaatan MPK, teknologi, dan TKDN	NSPK	1	4,00
	2	Profil rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN	Layanan	1	1,00

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2023

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan 3 indikator kinerja kegiatan, yaitu IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi, IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi, dan IKK 5.3 Persentase ketersediaan data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN, dengan rumus sebagai berikut:

$IKK\ 5 = \% IKK\ 5.1 + e.\% IKK\ 5.2 + f.\% IKK\ 5.3$	<b>Bobot:</b> $a = b = c = d = 12,5\%$ $e = 25\%$ $f = 25\%$
$\% IKK\ 5.1 = a.\% IKK\ 5.1.1 + b.\% IKK\ 5.1.2 + c.\% IKK\ 5.1.3 + d.\% IKK\ 5.1.4$	
$\% IKK\ 5.1.1 = \frac{\text{Jumlah OPD terbentuk dan operasional}}{\text{Jumlah OPD di tahun berjalan}} \times 100\%$	
$\% IKK\ 5.1.2 = \frac{\text{Jumlah Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi di Tahun Berjalan}} \times 100\%$	
$\% IKK\ 5.1.3 = \frac{\text{Jumlah Penyedia Jasa yang berkinerja baik}}{\text{Jumlah Penyedia Jasa di tahun berjalan}} \times 100\%$	
$\% IKK\ 5.1.4 = \frac{\text{Persentase asosiasi yang terakreditasi} + \text{Persentase BUJK dan TKK terintegrasi} + \text{Persentase Penyetaraan BUJK dan TKA} + \text{Persentase LSP dan LSBU Terlisensi}}{4} \times 100\%$	
$\% IKK\ 5.2 = \frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional yang terlibat dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi}}{\text{Jumlah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang terdata di tahun berjalan}} \times 100\%$	
$\% IKK\ 5.3 = \frac{\text{realisasi data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN}}{\text{target data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN yang harus tersedia}} \times 100\%$	

Keterangan:

IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi

IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi

IKK 5.3 Persentase ketersediaan data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN

Sub Indikator:

IKK 5.1.1 Persentase OPD terbentuk dan operasional

IKK 5.1.2. Persentase asosiasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, dan asosiasi terkait rantai pasok konstruksi yang terakreditasi

IKK 5.1.3. Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI

IKK 5.1.4. Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

a. IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi

IKK 5.1 dengan target tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi sebesar 61% di tahun 2023 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari hasil perhitungan 4 sub indikator yaitu: (1) Persentase OPD terbentuk dan operasional, (2) Persentase Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi, (3) Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI, dan (4) Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Hasil tersebut diambil dari laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Unit Kerja Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 5.1 = a. 75,18\% + b. 35\% + c. 64\% + d. 69,31\%$$

$$a + b + c + d = 12,5\%$$

$$IKK\ 5.1 = 12,5\% \times (75,18\% + 35\% + 64\% + 69,31\%) = 36,15\%$$

Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 5.1 Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi, yaitu:

**Tabel 4. 23 Hasil Perhitungan Sub Indikator yang Mendukung IKK 5.1 Tingkat Kinerja Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Bidang Konstruksi**

Sub Indikator	Nilai (%)
IKK 5.1.1 Persentase OPD terbentuk dan operasional	75,18
IKK 5.1.2 Persentase Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi	35,00
IKK 5.1.3 Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI	64,00
IKK 5.1.4 Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	69,31

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2023

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang pertama menunjukkan bahwa Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi **belum berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan masih perlunya sosialisasi menyeluruh tentang kewenangan jasa konstruksi di daerah baik terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah serta perlunya pendampingan pendekatan ke pimpinan daerah untuk penyelenggaraan Sub urusan Jasa Konstruksi. Berikut adalah detil capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.1, yaitu:

**Tabel 4. 24 Capaian Output Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.1**

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
1	Profil pengelolaan NSPK kelembagaan masyarakat dan pemerintah urusan jasa konstruksi	NSPK	1	5
2	Profil kinerja OPD sub urusan jasa konstruksi	Laporan	1	1
3	Profil kinerja kelembagaan masyarakat jasa konstruksi	Lembaga	2	14

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2023

b. IKK 5.2 Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi

IKK 5.2 dengan target persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebesar 40% di tahun 2023 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Unit Kerja Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 5.2 = \frac{\text{Jumlah Jabatan Fungsional yang terlibat dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi}}{\text{Jumlah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang terdata di tahun berjalan}} = 48,18\%$$

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang kedua menunjukkan bahwa Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi **berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor meningkatnya peran pejabat fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebanyak 660 orang. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang kedua berasal dari capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Berikut adalah detail capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.2, yaitu:

**Tabel 4. 25 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.2**

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
1	SDM Pejabat Fungsional yang terfasilitasi	Orang	100	660

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2023

c. IKK 5.3 Persentase ketersediaan data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN

IKK 5.3 dengan target persentase ketersediaan data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN sebesar 43% di tahun 2023 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Unit Kerja Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang ketiga, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 5.3 = \frac{\text{Realisasi data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN}}{\text{Target data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN yang harus tersedia}} = 95\%$$

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang ketiga menunjukkan bahwa Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi **berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor telah tersusunnya 4 NSPK terkait pemanfaatan MPK, teknologi, dan TKDN, serta telah terselenggaranya layanan terkait data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN di DJBK. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang ketiga berasal dari capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Direktorat

Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Berikut adalah detil capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.3, yaitu:

**Tabel 4. 26 Capaian Output Kegiatan Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi pada IKK 5.3**

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
1	Profil pengelolaan NSPK terkait pemanfaatan MPK, teknologi, dan TKDN	NSPK	1	4
2	Profil rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN	Layanan	1	1

Sumber: Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, 2023

Hasil dari 3 perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **belum berhasil** dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi dengan capaian sebesar 71,90% terhadap targetnya sebesar 82%. Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan salah satu sub indikator kinerja kegiatan yaitu tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi tidak tercapai, yang disebabkan masih perlunya sosialisasi menyeluruh tentang kewenangan jasa konstruksi di daerah baik terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah serta perlunya pendampingan pendekatan ke pimpinan daerah untuk penyelenggaraan Sub urusan Jasa Konstruksi.

Selanjutnya, persentase IKK.1 hingga IKK.5 tersebut digunakan sebagai masukan ke dalam perhitungan **IKP 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi** pada Sasaran Program Meningkatnya Dukungan manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dengan rincian rumus perhitungan indikator kinerja program sebagai berikut:

**IKP 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi**

$$IKP\ 1 = \frac{\% IKP\ 1.1 + \% IKP\ 1.2 + \% IKP\ 1.3}{3}$$

$$IKP\ 1 = \frac{94,23\% + 69,53\% + 71,90\%}{3} = 78,55\%$$

Dengan rincian perhitungan subindikator kinerja program sebagai berikut:

$$IKP\ 1.1 = \frac{\% IKK\ 1 + \% IKK\ 2 + \% IKK\ 3}{3}$$

$$IKP\ 1.1 = \frac{88,41\% + 94,28\% + 100\%}{3} = 94,23\%$$

$$IKP\ 1.2 = \% IKK\ 4 = 69,53\%$$

$$IKP\ 1.3 = \% IKK\ 5 = 71,90\%$$

Dari hasil perhitungan di atas, **Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berhasil mencapai target Sasaran Program Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dalam Program Dukungan Manajemen, dengan Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi yang mencapai 78,55% dari targetnya sebesar 69%**. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor terlaksananya pengelolaan dan penerapan 12 NSPK terkait tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dukungan rantai pasok konstruksi, dan kinerja kelembagaan. Selain itu faktor pendukung lain adalah dengan tersusunnya SKKNI bidang konstruksi, sinergitas berbagai pihak internal dan eksternal dalam rangka pembinaan sumber daya konstruksi, serta efisiensi pelaksanaan kegiatan secara daring. **Capaian tersebut digunakan sebagai masukan dalam pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi dengan capaian sebesar 78,55% dari targetnya sebesar 69%**.

Selanjutnya, berikut penjelasan dari perhitungan indikator kinerja kegiatan di setiap Sasaran Kegiatan yang mendukung Sasaran Program Dukungan Manajemen pada IKP 2 Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR, yaitu:

1. SK 6: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Sasaran Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Konstruksi. Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini memiliki 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dihitung melalui metode perhitungan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dan didukung dengan beberapa output kegiatan, yaitu: (1) IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, yang didukung oleh 4 output kegiatan berupa Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Layanan Sarana Prasarana Internal, Layanan Dukungan Manajemen Satker, dan Layanan Perkantoran, dan (2) IKK 6.2 Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi yang didukung oleh output kegiatan berupa Layanan data dan informasi. Berikut adalah rincian capaian kinerja dari SK 6: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya:

Tabel 4. 27 Capaian Kinerja SK Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
<b>UNIT ORGANISASI: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi</b>					
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>					
<b>SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>					
2	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	79,72	85,37	107,09
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya</b>					
IKP2	INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	%	87,81	93,67	106,67
<b>KEGIATAN 6: PENYELENGGARAAN LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON 1, INFORMASI JASA KONSTRUKSI, DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>					
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya</b>					
IKK6.1	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	94	100,00	106,38
<b>KOORDINATOR: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSTRUKSI</b>					
<b>PELAKSANA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSTRUKSI</b>					
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>					
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1,00	100,00
2	Layanan Sarana Prasarana Internal	Layanan	1	1,00	100,00
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1,00	100,00
4	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1,00	100,00
IKK6.2	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	92	88,29	95,97
6.2.1	Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR	%	80	97,81	122,26
6.2.2	Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi	%	98	95,00	96,94
6.2.3	Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi	%	100	100,00	100,00

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
6.2.4	Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi	%	80	75,18	93,98
6.2.5	Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi	%	100	73,45	73,45
<b>PELAKSANA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSTRUKSI</b>					
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>					
1	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1,00	100,00

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2023

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan ini merupakan hasil dari perhitungan 2 indikator kinerja kegiatan, yaitu IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan IKK 6.2 Tingkat ketersediaan informasi jasa

$$IKK\ 6.1 = \frac{\% \text{ layanan perencanaan, program, dan keuangan} + \% \text{ layanan administrasi kepegawaian dan umum} + \% \text{ layanan hukum informasi jasa konstruksi, dan komunikasi publik}}{3}$$

% layanan = Survei persepsi kepada internal organisasi untuk mengetahui tingkat layanan

$$IKK\ 6.2 = \frac{\% IKK\ 6.2.1 + \% IKK\ 6.2.2 + \% IKK\ 6.2.3 + \% IKK\ 6.2.4 + \% IKK\ 6.2.5}{5}$$

$$\% IKK\ 6.2.1 = \frac{\text{realisasi informasi kinerja penyedia jasa konstruksi}}{\text{target informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 6.2.2 = \frac{\text{realisasi informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) yang tersedia}}{\text{target informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 6.2.3 = \frac{\text{realisasi informasi penyelenggaraan jasa konstruksi}}{\text{target informasi penyelenggaraan jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 6.2.4 = \frac{\text{realisasi informasi pembinaan jasa konstruksi}}{\text{target informasi pembinaan jasa konstruksi yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$\% IKK\ 6.2.5 = \text{Survei persepsi kepada stakeholder yang menggunakan Sistem informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi}$$

konstruksi, dengan rumus sebagai berikut:

#### Keterangan:

IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

IKK 6.2. Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi

Sub Indikator:

IKK 6.2.1 Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi

IKK 6.2.2. Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) jasa konstruksi

IKK 6.2.3. Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi

IKK 6.2.4. Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi

IKK 6.2.5. Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi

a. IKK 6.1 Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

IKK 6.1 dengan target tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 100% di tahun 2023 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari laporan pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang pertama, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 6.1 = \frac{100\% + 100\% + 100\%}{3} = 100\%$$

Capaian kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada indikator kinerja kegiatan yang pertama menunjukkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor terselenggaranya layanan dukungan manajemen Eselon I. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang ketiga berasal dari capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Perhitungan capaian IKK menghitung jumlah konfirmasi pelayanan dari 4 layanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Persentase dari masing masing layanan yang diselenggarakan didapat dari kegiatan Survei Persepsi kepada internal organisasi yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Berikut adalah detail capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.1, yaitu:

**Tabel 4. 28 Capaian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.1**

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
2	Layanan Sarana Prasarana Internal	Layanan	1	1
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1
4	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2023

b. IKK 6.2 Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi

IKK 6.1 dengan target tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi sebesar 92% di tahun 2023 dicapai melalui perhitungan yang berasal dari hasil perhitungan 5 sub indikator yaitu: (1) Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR, (2) Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi, (3) Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi, (4) Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi, dan (5) Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Hasil tersebut diambil dari laporan pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, hasil perhitungan yang diperoleh sebagai bukti capaian kinerja dari Sasaran Kegiatan ini pada indikator kinerja kegiatan yang kedua, adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 6.2 = \frac{97,81\% + 95\% + 100\% + 75,18\% + 73,45\%}{5} = 88,29\%$$

Rincian hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 6.2 Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi, yaitu:

**Tabel 4. 29 Hasil Perhitungan Sub Indikator IKK 6.2 Tingkat Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi**

Sub Indikator	Nilai (%)
6.2.1 Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR	97,81
6.2.2 Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi	95

Sub Indikator	Nilai (%)
6.2.3 Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi	100
6.2.4 Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi	75,18
6.2.5 Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi	73,45

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2023

Penjelasan dari hasil perhitungan sub indikator yang mendukung IKK 6.2 yaitu:

1. Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR

Capaian sub indikator kinerja ini mengambil dari capaian sub indikator Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR pada IKK Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dengan nomenklatur sub indikator yang sama, target yang sama, dan capaian yang sama.

2. Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi

Capaian sub indikator kinerja ini mengambil dari capaian IKK Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dengan nomenklatur sub indikator yang sama, target yang sama, dan capaian yang sama.

3. Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi

Capaian sub indikator kinerja dibuktikan melalui tersedianya informasi capaian IKK Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi dan informasi capaian IKK Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Keberlanjutan Konstruksi pada halaman web Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dengan alamat web: <http://binakonstruksi.pu.go.id/>.

4. Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi

Capaian sub indikator kinerja ini mengambil dari sub indikator Persentase OPD terbentuk dan operasional pada IKK Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi dengan target yang sama dan capaian yang sama.

## 5. Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi

Capaian sub indikator kinerja ini dibuktikan melalui hasil Survei Persepsi Layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi. Survey ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan para *stakeholder* terhadap penggunaan aplikasi-aplikasi di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi. Hasil dari survei tersebut menunjukkan bahwa aplikasi SIJKT belum berhasil memberikan pelayanan secara maksimal, terlihat dari hasil nilai survei persepsi sebesar 73,45%.

Sehingga secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan yang kedua menunjukkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **belum berhasil** memenuhi target indikator kinerja kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya ketersediaan ketersediaan informasi rantai pasok, pembinaan jasa konstruksi, serta tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. Dasar perhitungan pada indikator kinerja kegiatan yang kedua berasal dari penjumlahan sub indikator kinerja kegiatan yang telah disampaikan pada rumus sebelumnya serta didukung oleh capaian output kegiatan yang telah dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Berikut adalah detail capaian output kegiatan yang dihasilkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.2, yaitu:

**Tabel 4. 30 Capaian Output Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada IKK 6.2**

No	Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Capaian 2023
1	Layanan data dan informasi	Layanan	1	1

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 2023

Hasil dari 2 perhitungan indikator kinerja kegiatan tersebut membuktikan bahwa **Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah berhasil dalam mencapai target Sasaran Kegiatan Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan capaian sebesar 94,14% terhadap targetnya sebesar 93%**. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh faktor tersedianya informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak, penyelenggaraan jasa konstruksi, serta terpenuhinya layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya secara maksimal.

### 4.3 PERBANDINGAN KINERJA

#### 4.3.1 ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Secara umum, capaian sasaran strategis Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Professional tahun 2023 sebesar 7,49%

turun 33,83% dari tahun sebelumnya sebesar 11,32%. Sedangkan capaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dari indikator Tingkat keandalan sumber daya konstruksi sebesar 78,55% naik 11,69% dari tahun sebelumnya sebesar 70,33%.

Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki 2 Sasaran Program sesuai dengan program yang telah dijelaskan pada LAKIP TA 2023 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, yaitu: (1) Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional; dan (2) Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya dengan target yang merupakan kompilasi dari Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Sasaran Program yang pertama dihitung dengan indikator kinerja program yaitu Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional dengan target 85% (Capaian 100% sehingga kinerja 117,65%). Sedangkan, Sasaran Program yang kedua dihitung melalui 2 indikator kinerja program yaitu (1) Tingkat kualitas sumber daya konstruksi dengan target 69% (Capaian 78,55% sehingga kinerja 113,85%) dan Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dengan target 87,81% (Capaian 93,67% sehingga kinerja 106,67%).

Secara detail, Capaian kinerja Sasaran Program yang didukung oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2023 dibandingkan dengan capaian TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

A. Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

**Tabel 4. 31 Capaian Sasaran Program DJBK TA 2023 terhadap TA 2022**

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan Capaian TA 2023 terhadap TA 2022
			2022	2023	
<b>SS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional</b>					
	<b>IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional</b>	%	<b>11,32</b>	<b>7,49</b>	<b>-33,83</b>
<b>Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>					
<b>SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional</b>					

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan Capaian TA 2023 terhadap TA 2022
		2022	2023	
<b>IKP: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional</b>	%	100	100	0
<b>Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi</b>				
<b>SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina</b>				
<b>IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina</b>	%	122,35	80,99	-33,80
<b>Koordinator: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi</b>				
<b>Pelaksana: Balai Jasa Konstruksi Wilayah</b>				
Output Kegiatan:				
1. SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	Orang	45.268	29.967	-33,80

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2023

#### B. Program: Dukungan Manajemen

**Tabel 4. 32 Capaian Sasaran Kegiatan Program Dukungan Manajemen DJBK TA 2023 terhadap TA 2022**

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan Capaian TA 2023 terhadap TA 2022
		2022	2023	
<b>SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya</b>				
<b>IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi</b>	%	70,33	86,81	23,43
1 Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	70,33	86,81	23,43
<b>Program Dukungan Manajemen</b>				
<b>SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya</b>				
<b>IKP 1: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi</b>	%	70,33	78,55	11,69

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan Capaian TA 2023 terhadap TA 2022
			2022	2023	
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	90,64	94,23	3,96
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	59,5	69,53	16,86
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	60,86	71,90	18,14
<b>Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>					
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi					
	IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	87,39	88,41	1,17
<b>Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi</b>					
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa					
	IKK: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa	%	87,42	94,28	7,85
<b>Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi</b>					
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)					
	IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	%	97,10	100,00	2,99
<b>Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi</b>					
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi		%	59,5	69,53	16,86
	IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	13,51	13,66	1,11
	IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	%	105,49	125,41	18,88
<b>Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi</b>					
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi		%	60,86	71,90	18,14
	IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	%	23,74	36,15	52,27

Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Realisasi		Kenaikan/ Penurunan Capaian TA 2023 terhadap TA 2022
			2022	2023	
	IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	%	53,48	48,18	-9,91
	IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	%	95	95	0,00
<b>SS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya</b>					
	IKSS: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	80,66	85,37	5,84
<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
<b>SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya</b>					
	<b>IKP 2: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR</b>	<b>%</b>	<b>87,55</b>	<b>93,67</b>	<b>6,99</b>
<b>Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>					
	SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	102,36	94,14	-8,03
	IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100,00	100,00	0
	IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	87,96	88,29	0,37

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2023



C. Perbandingan Capaian Sasaran Program (Renstra 2020-2023)

Tabel 4. 33 Perbandingan Capaian Sasaran Program (Renstra 2020-2023)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET				REALISASI				CAPAIAN (%)			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
<b>PROGRAM: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI</b>														
	<b>SASARAN STRATEGIS:</b> Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	5,3	5,6	6	5,1	8,56	10,26	11,32	7,49	163,03	182,41	188,62	146,90
	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN:</b> Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	5,3	5,6	6	5,1	8,56	10,26	11,32	7,49	163,03	182,41	188,62	146,90
	<b>SASARAN PROGRAM:</b> Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional	%	70	75	80	85	73	100	100	100	104,72	133,33	125	117,65
	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM:</b> Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	70	75	80	85	73	100	100	100	104,72	133,33	125	117,65
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>														
	<b>SASARAN STRATEGIS:</b> Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PUPR													
	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN:</b> Tingkat kualitas	%	43	51	57	69	47,25	59,78	70,33	78,55	108,96	117,91	123,39	113,85

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET				REALISASI				CAPAIAN (%)			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	tata kelola Kementerian PUPR													
1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	43	51	57	69	47,25	59,78	70,33	78,55	108,96	117,91	123,39	113,85
<b>SASARAN PROGRAM:</b> Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya														
	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM:</b> Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	%	43	51	57	69	47,25	59,78	70,33	78,55	108,96	117,91	123,39	113,85
1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	76	80	84	89	85,09	91,74	90,64	94,23	111,8	114,76	107,9	105,88
2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	14	21	28	36	20,28	30,19	59,5	69,53	140,5	142,19	212,5	193,15
3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	40	51	59	82	36,36	57,41	60,86	71,90	91,96	112,74	103,16	87,68
	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM:</b> Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	%	56	63	72	87,81	67,98	63,35	87,55	93,67	121,57	100	122,38	106,67

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2023



D. Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan (Renstra 2020-2023)

**Tabel 4. 34 Perbandingan Capaian Sasaran Kegiatan (Renstra 2020-2023)**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET				REALISASI				CAPAIAN (%)			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
<b>KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASIONAL BIDANG KONSTRUKSI</b>														
<b>SASARAN KEGIATAN:</b> Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina		%	81	81	81	65	126	111	122	80,99	155,67	136,81	150,89	124,60
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:</b> Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	%	81	81	81	65	126	111	122	80,99	155,67	136,81	150,89	124,60
<b>KEGIATAN: PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI</b>														
<b>SASARAN KEGIATAN:</b> Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi		%	60	65	70	75	87,06	89,3	87,39	88,41	145,1	137,38	124,84	117,88
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:</b> Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	%	60	65	70	75	87,06	89,3	87,39	88,41	145,1	137,38	124,84	117,88
<b>KEGIATAN: PEMBINAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI</b>														
<b>SASARAN KEGIATAN:</b> Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa		%	68	75	83	92,5	72,02	87,23	87,42	94,28	105,4	116,56	105,33	101,92
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:</b> Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa	%	68	75	83	92,5	72,02	87,23	87,42	94,28	105,4	116,56	105,33	101,92
<b>KEGIATAN: PEMBINAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI</b>														
<b>SASARAN KEGIATAN:</b> Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)		%	100	100	100	100	96,2	98,7	97,1	100	96,2	98,7	97,1	100

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET				REALISASI				CAPAIAN (%)			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:</b> Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	96,2	98,7	97,1	100	96,2	98,7	97,1	100
<b>KEGIATAN: PEMBINAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI</b>														
	<b>SASARAN KEGIATAN:</b> Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	%	14	21	28	36	20,28	30,19	59,5	69,53	140,5	142,19	212,5	193,15
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:</b> Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	9	10	12	9,76	11,57	12,75	13,51	13,66	127,23	123,3	112,6	139,96
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:</b> Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	%	20	32	44	63	29	47,64	105,49	125,41	146,59	148,27	239,74	199,06
<b>KEGIATAN: PEMBINAAN KINERJA KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN MATERIAL, PERALATAN, DAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI</b>														
	<b>SASARAN KEGIATAN:</b> Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	%	40	51	59	82	36,36	57,41	60,86	71,90	91,96	112,74	103,16	87,68
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:</b> Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	%	16	23	28	61	10,89	20,88	23,74	36,15	68,97	89,16	84,79	59,26
	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:</b> Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	%	10	20	30	40	15,89	53,61	53,484	48,18	158,9	268,05	178,28	120,45

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET				REALISASI				CAPAIAN (%)			
			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	<b>INDIKATOR KINERJA</b> <b>PROGRAM:</b> Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	%	56	63	72	43	67,98	63,35	87,55	95	121,57	100	122,38	220,93
<b>KEGIATAN: PENYELENGGARAAN LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON 1, INFORMASI JASA KONSTRUKSI, DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>														
	<b>SASARAN KEGIATAN:</b> Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	100	100	93	<b>97,61</b>	103,82	102,36	94,14	<b>97,61</b>	103,82	102,36	101,23
	<b>INDIKATOR KINERJA</b> <b>KEGIATAN:</b> Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	100	100	100	94	<b>94</b>	100	100	100,00	<b>94</b>	100	100	106,38
	<b>INDIKATOR KINERJA</b> <b>KEGIATAN:</b> Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	68	75	84	92	68,83	80,73	87,96	88,29	101,23	107,64	104,71	95,97

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2023

#### **4.3.2 ANALISIS PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH**

Maksud dari Rencana Pemerintah Lainnya adalah Dokumen Perencanaan dengan skala nasional yang menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Berdasarkan hierarkinya, Rencana Strategis Kementerian PUPR akan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Perpres Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2023 yang sudah dijelaskan pada Sub Bab sebelumnya tidak tercantum pada target RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2023, capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di tahun ini tidak dapat disandingkan dengan dokumen perencanaan pemerintah lainnya.

#### **4.3.3 ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL (BENCHMARKING)**

Dalam rangka mengetahui efektifitas pencapaian tujuan organisasi perlu dilakukan benchmarking. Benchmarking bertujuan untuk mengukur dan membandingkan kinerjanya dengan unit organisasi lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi sejenis. Benchmarking dilakukan dengan BPSDM dimana terdapat salah satu indikator kinerja yang sama terkait vokasi. Hal ini terkait dengan sasaran strategis meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional. Pada TA 2023, capaian sasaran strategis meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional DJBK sebesar 146,90%, nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan BPSDM yaitu 123,11%. Hal ini didukung dengan capaian IKK Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina tercapai 124,60% dengan target 65% dan realisasi 80,99%, serta capaian output SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina tercapai 124,17% dimana target 24.134 dengan realisasinya 29.967 orang. Berikut adalah perbandingan kinerja 2023 antara DJBK dengan BPSDM Kementerian PUPR.

Tabel 4. 35 Tabel Perbandingan Kinerja Dengan Unit Organisasi Terkait

DJBK TA 2023				BPSDM TA 2023			
Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/	2023		Capaian Kinerja Program	Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/	2023		Capaian Kinerja Program
Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kegiatan DJBK TA 2023	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kegiatan BPSDM TA 2023
<b>SS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional</b>				<b>SS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional</b>			
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	5,1%	7,49%	146,90%	IKSS: Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Kompeten dan Siap Kerja	80%	98,49%	123,11%
<b>Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>				<b>Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>			
<b>SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional</b>				<b>SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang PUPR yang Bersertifikat</b>			
IKP: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	85%	100,00%	117,65%	IKP: Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan Vokasi Bidang PUPR	80%	98,49%	123,11%
<b>Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi</b>				<b>Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum</b>			
<b>SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina</b>				<b>SK: Meningkatnya mutu kuantitas dan kualitas SDM pendidikan vokasi bidang PUPR yang kompeten</b>			
IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	65%	80,99%	124,60%	IKK: Jumlah peserta didik dan kualitas SDM pendidikan vokasi bidang PUPR yang kompeten	714	767	107,42%
				1.1 Jumlah mahasiswa program studi vokasional	582	635	109,11%
				1.2 Jumlah mahasiswa tersertifikasi kompetensi	132	132	100,00%
<b>Koordinator: Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi</b>				<b>Pelaksana: Politeknik Pekerjaan Umum</b>			
<b>Pelaksana: Balai Jasa Konstruksi Wilayah</b>							
Output Kegiatan:				Output Kegiatan:			
1	SDM vokasiona	24.134	29.967	124,17%	1	Pendidik Politeknik Pekerjaan Umum	

DJBK TA 2023				BPSDM TA 2023					
Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/		2023		Capaian Kinerja Program	Program/Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/Kegiatan/		2023		Capaian Kinerja Program
Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Kegiatan DJBK TA 2023	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Kegiatan BPSDM TA 2023
I bidang konstruksi yang terbina					1.1	Jumlah mahasiswa program studi pendidikan vokasi bidang PUPR	582	635	109,11%

Sumber: Aplikasi e-Sakip Kementerian PUPR, 2023

#### 4.4 REALISASI ANGGARAN

##### 4.4.1 ANALISIS PENYERAPAN ANGGARAN TA 2023

Penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2023 menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu sebesar 98,50% dengan total realisasi keuangan sekitar Rp. 579,8 Miliar dari pagu anggaran sebesar Rp. 588,7 Miliar. Nilai tersebut berada diatas nilai rata-rata kementerian sebesar 95,6%. Berikut adalah realisasi anggaran per Unit Organisasi Kementerian PUPR di tahun 2023:

**Tabel 4. 36 Realisasi Anggaran Per Unit Organisasi Kementerian PUPR TA 2023**

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU	REALISASI		FISIK
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	%	%
1	DITJEN BK	588.717.233	579.893.874	98,50	100
2	BPIW	172.325.983	169.108.613	98,13	100
3	BPSDM	393.738.585	385.035.624	97,79	99,75
4	DITJEN BM	80.040.177.898	77.968.335.450	97,41	97,13
5	DITJEN CK	29.290.778.627	28.268.114.133	96,51	97,87
6	DITJEN PR	11.462.018.170	11.045.558.259	96,37	97,23
7	DITJEN PI	243.192.037	234.351.034	96,36	96,80
8	SETJEN	595.881.124	572.457.597	96,07	99,97
9	DITJEN SDA	48.894.273.731	45.016.609.750	92,07	93,79
10	ITJEN	90.265.143	83.017.862	91,97	99,39
<b>TOTAL</b>		<b>171.771.368.531</b>	<b>164.322.482.196</b>	<b>95,66</b>	<b>96,34</b>

Sumber: *emonitoring.pu.go.id*, 2023

Berdasarkan rincian penyerapan di atas, Direktorat Jenderal Sebagai tambahan informasi, berikut adalah rincian penyerapan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2023:

**Tabel 4. 37 Rincian Penyerapan Satuan Kerja di Lingkungan DJBK TA 2023**

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI		FISIK
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	(%)	(%)
1	BP2JK WILAYAH KALIMANTAN TIMUR	3.008.246	3.008.157	100	100
2	BP2JK WILAYAH KALIMANTAN SELATAN	3.085.974	3.085.713	99,99	100
3	BP2JK WILAYAH DKI JAKARTA	4.249.419	4.248.770	99,98	100
4	BP2JK WILAYAH JAWA TENGAH	3.000.000	2.999.233	99,97	100
5	BJKW III JAKARTA	24.757.200	24.741.257	99,94	100
6	BP2JK WILAYAH JAWA BARAT	4.441.516	4.438.554	99,93	100
7	BP2JK WILAYAH KALIMANTAN BARAT	3.583.538	3.579.224	99,88	100
8	BJKW I BANDA ACEH	13.136.710	13.119.334	99,87	100
9	BP2JK WILAYAH MALUKU UTARA	3.511.420	3.506.259	99,85	100
10	BP2JK WILAYAH BANTEN	3.224.087	3.219.178	99,85	100
11	BP2JK WILAYAH JAMBI	3.000.000	2.995.510	99,85	100
12	BP2JK WILAYAH SULAWESI TENGAH	3.150.397	3.143.003	99,77	100
13	BJKW VI MAKASSAR	17.751.926	17.710.081	99,76	100
14	BP2JK WILAYAH LAMPUNG	3.353.210	3.344.893	99,75	100
15	BP2JK WILAYAH ACEH	3.000.000	2.992.318	99,74	100
16	BJKW II PALEMBANG	13.166.213	13.128.786	99,72	100
17	BP2JK WILAYAH GORONTALO	3.953.566	3.942.617	99,72	100
18	BP2JK WILAYAH SUMATERA UTARA	3.013.893	3.005.486	99,72	100
19	BP2JK WILAYAH PAPUA BARAT	3.633.767	3.622.886	99,70	100
20	DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI	17.702.063	17.642.414	99,66	100
21	DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI	15.061.502	14.988.550	99,52	100
22	BP2JK WILAYAH MALUKU	3.602.516	3.584.001	99,49	100

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI		FISIK
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	(%)	(%)
23	LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	22.412.779	22.292.479	99,46	100
24	DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI	16.558.448	16.424.111	99,19	100
25	BP2JK WILAYAH BANGKA BELITUNG	3.000.000	2.975.116	99,17	100
26	BP2JK WILAYAH KALIMANTAN TENGAH	3.249.402	3.220.834	99,12	100
27	BP2JK WILAYAH KALIMANTAN UTARA	3.000.000	2.973.080	99,10	100
28	BP2JK WILAYAH SULAWESI UTARA	3.011.306	2.983.541	99,08	100
29	BP2JK WILAYAH RIAU	3.000.000	2.970.466	99,02	100
30	BP2JK WILAYAH NTB	3.000.000	2.969.205	98,97	100
31	BP2JK WILAYAH BALI	3.080.078	3.047.917	98,96	100
32	BP2JK WILAYAH DI YOGYAKARTA	3.096.032	3.055.568	98,69	100
33	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI	181.810.914	179.329.665	98,64	100
34	DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	82.652.212	81.427.754	98,52	100
35	BP2JK WILAYAH SUMATERA BARAT	3.141.012	3.093.609	98,49	100
36	BP2JK WILAYAH SULAWESI TENGGARA	3.150.951	3.097.707	98,31	100
37	BP2JK WILAYAH BENGKULU	3.000.000	2.942.220	98,07	100
38	BP2JK WILAYAH KEPULAUAN RIAU	2.900.000	2.838.957	97,90	100
39	DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	14.409.763	14.086.320	97,76	100
40	BP2JK WILAYAH JAWA TIMUR	3.011.455	2.943.823	97,75	100
41	BP2JK WILAYAH SULAWESI SELATAN	3.087.485	3.016.228	97,69	100
42	BP2JK WILAYAH PAPUA	3.588.709	3.492.912	97,33	100
43	BP2JK WILAYAH SULAWESI BARAT	3.082.359	2.994.410	97,15	100
44	BP2JK WILAYAH NTT	2.900.000	2.810.309	96,91	100
45	BJKW VII JAYAPURA	12.080.215	11.618.065	96,17	100

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI		FISIK
		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	(%)	(%)
46	BJKW IV SURABAYA	22.332.658	21.335.747	95,54	100
47	BP2JK WILAYAH SUMATERA SELATAN	3.215.404	3.071.381	95,52	100
48	BJKW V BANJARMASIN	24.558.888	22.836.228	92,99	100
<b>TOTAL</b>		<b>588.717.233</b>	<b>579.893.874</b>	<b>98,50</b>	<b>100</b>

Sumber: *emonitoring.pu.go.id*, 2023

Secara umum, Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang memiliki realisasi anggaran yang baik adalah Satuan Kerja Direktorat (rata-rata 99,02%), Satuan Kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah (rata-rata 97,71%) dan Satuan Kerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (rata-rata 98,95%).

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengapresiasi seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang tetap berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2023 ini dengan susah payah dan tidak pernah luput dalam melaksanakan protokol kesehatan.

#### 4.4.2 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi sumber daya yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang sudah ditargetkan pada tahun 2023 dilakukan melalui efisiensi sumber daya manusia serta anggaran. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi masih dapat mencapai seluruh target terhadap kegiatan yang telah ditargetkan sesuai Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Berikut adalah rincian penyerapan anggaran terhadap program dan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2023 sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR dan DIPA TA 2023 revisi terakhir:

**Tabel 4. 38 Rincian Penyerapan Anggaran Terhadap Program dan Kegiatan DJBK TA 2023**

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>				
<b>Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi</b>				
SK: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina				
	IKK: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	54.340	53.276	98,04
<b>Program Dukungan Manajemen</b>				
<b>Kegiatan 1: Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>				
SK: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi				
	IKK: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	6.796	6.796	100,00
<b>Kegiatan 2: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi</b>				

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)
SK: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa				
	IKK: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa	82.652	81.427	98,52
<b>Kegiatan 3: Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi</b>				
SK: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
	IKK: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	6.250	6.227	99,63
<b>Kegiatan 4: Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi</b>				
SK: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi		60.493	58.418	96,57
	IKK: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	17.702	17.642	99,66
	IKK: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	42.791	40.776	95,29
<b>Kegiatan 5: Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi</b>				
SK: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi		3.025	3.019	99,80
	IKK: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	706	704	99,72
	IKK: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	1.053	1.052	99,91
	IKK: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN	1.266	1.263	99,76
<b>Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>				
SK: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon 1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		178.571	176.051	98,59
	IKK: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon 1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	173.369	170.918	98,59
	IKK: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	5.202	5.133	98,67

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2023

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melakukan efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Selain itu pada tahun 2023 juga telah dilakukan beberapa kali perpindahan pegawai antar satuan kerja demi memaksimalkan penggunaan SDM dalam mencapai kinerja yang telah ditargetkan.

Sementara itu, Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran tahun 2023 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melakukan beberapa kali revisi anggaran demi terpenuhinya anggaran dalam pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi serta beberapa kali revisi antar satker untuk menunjang operasional perkantoran dan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pada satker terkait.

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada tahun 2023 sebesar 98,5% dari pagu akhir Rp 579,89 Miliar untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian output selama tahun anggaran 2023. Efisiensi anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel perbandingan realisasi anggaran sebagai berikut:

**Tabel 4. 39 Perbandingan Realisasi Anggaran DJBK TA 2022-2023**

NO	KOMPONEN PEMBANDING	2022	2023
1	Pagu (Rp Ribu)	646.449.100	588.717.233
2	Realisasi (Rp Ribu)	622.526.477	579.893.874
3	Progres Keuangan (%)	96,3	98,5
4	Progres Fisik (%)	98,81	100

Sumber: *emonitoring.pu.go.id*, 2023

Pada tabel di atas terlihat bahwa telah dilaksanakan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran selama tahun 2023. Dengan pagu anggaran 2023 lebih kecil dibandingkan dengan pagu 2022, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mampu mencapai realisasi maksimal serta pelaksanaan seluruh progress fisik hingga 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan anggaran yang lebih kecil pada tahun 2023, namun Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui seluruh satuan kerjanya tetap mampu meccapai seluruh target yang telah ditetapkan.

#### 4.5 ANALISIS PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Pemanfaatan Laporan Kinerja diukur melalui penyebaran kuesinoner kepada seluruh pejabat dan pegawai di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Berdasarkan kuesioner yang diisi oleh 1.269 orang responden terdiri atas:

- Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya sebanyak 1 orang;
- Pejabat Eselon II/Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 5 orang;
- Pejabat administrator sebanyak 62 orang;
- Pejabat pengawas sebanyak 50 orang;
- Pejabat fungsional terdiri dari 43 orang pejabat fungsional ahli madya, 208 pejabat fungsional ahli muda, 470 orang pejabat fungsional ahli pertama, 9 orang pejabat fungsional penyelia 6 orang, pejabat fungsional mahir 6 orang, pejabat fungsional terampil 5 orang;
- Pelaksana sebanyak 412 orang

Secara umum pemanfaatan Laporan Kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan serta menjadi kepedulian seluruh pegawai. Selain itu, Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan, baik dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja, serta telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Informasi dalam laporan kinerja tahun 2022 juga dinilai telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2023. Informasi dalam laporan kinerja juga dinilai selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Berikut merupakan rekapitulasi hasil survey pemanfaatan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Muatan kuesioner diantaranya mencakup:

- A. Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan;
  - a. Informasi isu strategis dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja;
  - b. Informasi rencana kerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja;
  - c. Informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja;
  - d. Informasi realisasi anggaran dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja;
  - e. Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja.
- B. Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai;
  - a. Saya mengetahui informasi isu strategis unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja;
  - b. Saya mengetahui informasi rencana kerja unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja;
  - c. Saya mengetahui informasi capaian kinerja unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja;
  - d. Saya mengetahui informasi realisasi anggaran unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja;
  - e. Saya mengetahui informasi permasalahan dan rekomendasi unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja;
  - f. Saya mengetahui informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam laporan kinerja;
  - g. Saya mengetahui informasi deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja.
- C. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;

- a. Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
  - b. Informasi deviasi antara rencana dengan realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
  - c. Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
  - d. Laporan kinerja periode sebelumnya menjadi acuan untuk penyusunan laporan kinerja periode berikutnya.
- D. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja;
- a. Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja;
  - b. Informasi deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja;
  - c. Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja.
- E. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
- b. Informasi isu strategis dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
  - c. Informasi rencana kerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
  - d. Informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
  - e. Informasi realisasi anggaran dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
  - f. Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
  - g. Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
  - h. Informasi deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
  - i. Laporan kinerja periode sebelumnya dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- F. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya

- a. Informasi isu strategis dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
  - b. Informasi rencana kerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
  - c. Informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
  - d. Informasi realisasi anggaran dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
  - e. Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
  - f. Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
  - g. Informasi deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
  - h. Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
  - i. Laporan kinerja periode sebelumnya telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- G. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi
- a. Informasi permasalahan dan laporan kinerja menjadi pertimbangan dalam meningkatkan budaya kinerja organisasi;
  - b. Informasi rekomendasi dalam laporan kinerja menjadi pertimbangan dalam meningkatkan budaya kinerja organisasi.

#### **4.6 PENGHARGAAN ATAS KINERJA**

Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendapat penghargaan sebagai wujud apresiasi atas tercapainya kinerja yang baik, yaitu sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui 2 (dua) pegawainya mendapatkan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya pada bulan November 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 119/TK/Tahun 2023;
2. Beberapa satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah berhasil mendapatkan sertifikasi SMAP pada tahun 2023 dari Lembaga Mutu Internasional yaitu:
  - a. BP2JK Wilayah Nusa Tenggara Barat;
  - b. BP2JK Wilayah Lampung;

- c. BP2JK Wilayah Maluku Utara;
  - d. BP2JK Wilayah DI Yogyakarta;
  - e. BJKW V Banjarmasin;
  - f. BJKW VII Jayapura.
3. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Keberlanjutan Konstruksi memenangkan Juara Terbaik Kedua sebagai satker pengelola keuangan terbaik;
  4. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Keberlanjutan Konstruksi memenangkan predikat Bendahara Terbaik Kedua.

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 SIMPULAN UMUM

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, secara umum telah melaksanakan dan memenuhi target sasaran strategis tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dan Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya yang ditetapkan pada tahun 2023. DJBK **berhasil mencapai target** sasaran strategis dengan capaian tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional 2023 sebesar 7,49% dengan kinerja 146,90% dari target yang ditetapkan sebesar 5,1%. Sasaran strategis tersebut didukung dengan pelaksanaan Sasaran Program pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang memiliki target IKP sebesar 85% dengan realisasi sebesar 100% yang berarti Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah **berhasil mencapai target** dengan capaian kinerja sebesar 117,65%.

Sementara itu dari program dukungan manajemen, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **berhasil mencapai target** sasaran strategis dengan capaian tingkat keandalan sumber daya konstruksi 2023 sebesar 78,55% dengan kinerja 113,85% dari target yang ditetapkan sebesar 69%. Sasaran strategis tersebut didukung dengan pelaksanaan sasaran program pada program dukungan manajemen yang memiliki target IKP1 Tingkat kualitas sumber daya konstruksi sebesar 69% dengan capaian 78,55% dan IKP2 Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dengan capaian 93,67% dari targetnya 87,81%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga **berhasil mencapai target** 2023 pada program dukungan manajemen.

### 5.2 FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Seperti yang telah dijelaskan pada sub-Bab sebelumnya bahwa secara umum Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah berhasil mencapai seluruh target sasaran strategis yang ditetapkan di tahun 2023. Tentunya keberhasilan tersebut berkat dukungan dari seluruh unit kerja yang berada di bawah DJBK. Capaian sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menunjukkan hasil kerja keras seluruh personil di 5 Direktorat, Sekretariat, 7 Balai Jasa Konstruksi Wilayah, Sekretariat LPJK, dan 34 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi. Keberhasilan capaian program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 100% didukung oleh faktor peningkatan kualitas asesor dan instruktur bidang konstruksi, adanya pembaharuan SKKNI, efisiensi kegiatan pembinaan SDM vokasional secara online, serta

tingginya sinergitas program dengan lingkungan eksternal, misalnya adanya kerjasama *cost sharing* dengan Kadin ataupun instansi lainnya.

Selanjutnya, Keberhasilan capaian program dukungan manajemen sebesar 78,55% didukung oleh faktor terlaksananya pengelolaan 12 NSPK terkait tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa, tenaga kerja konstruksi, produk dalam negeri (PDN), pembinaan jafung pembina jasa konstruksi, tersusunnya SKKNI baru dan SKKNI terbarukan bidang konstruksi, sinergitas seluruh pihak internal dan eksternal dalam rangka pembinaan sumber daya konstruksi, efisiensi pelaksanaan kegiatan secara daring, tersedianya informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak, pencapaian tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I, ketersediaan informasi rantai pasok, penyelenggaraan jasa konstruksi, pembinaan jasa konstruksi, serta terlaksananya layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.

### 5.3 PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kurang memadainya kuantitas SDM Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
2. Perencanaan kegiatan kurang optimal;
3. Tingkat pemahaman pegawai terhadap substansi jasa konstruksi masih perlu ditingkatkan.
4. Kurangnya fasilitas untuk penyimpanan dokumen serta integrasi masih lemah (tidak adanya server per eselon 3);
5. Sistem informasi yang ada, database, perekaman data hasil kinerja pusat, dan konsistensi pemutakhiran data perlu ditingkatkan;
6. Kurangnya prasarana ruang penyimpanan barang milik negara;
7. Belum optimalnya Jafung dalam pelaksanaan kegiatan Penerapan NSPK Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
8. Rendahnya komitmen dan keseriusan Satker mengisi dan melengkapi seluruh data Pemantauan dan Evaluasi penerapan NSPK; (Kegiatan hanya dianggap sebagai kegiatan pelengkap, bukan sebagai kegiatan pokok);
9. Masih adanya perbedaan pemahaman antara penyedia dan pengguna jasa konstruksi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) seperti pembayaran penanganan darurat, penyiapan dokumen pemilihan tender, pelaksanaan evaluasi kewajaran dan harga, serta metode *repeat order*;
10. Adanya perubahan kebijakan di level yang lebih tinggi dan pengalihan pengaturan pengadaan dari Kementerian PUPR ke LKPP;

11. Kurangnya sumber daya manusia dengan anggaran yang terbilang besar, hal ini menyebabkan tingginya beban kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dan dikhawatirkan dapat membuat kualitas hasil pekerjaan masing-masing pegawai menjadi kurang maksimal;
12. SIPASTI direncanakan bekerja sama dengan beberapa unit kerja, tidak semua unit;
13. kerja berperan aktif dalam pengembangan penerapan SIPASTI;
14. Perencanaan anggaran tidak tersedia dari awal sehingga banyak kegiatan dilakukan berdasarkan skala prioritas;
15. Penyusunan SHDP belum menjadi prioritas pada unor teknis sehingga penyampaian substansi lampiran melebihi target waktu;
16. *Stakeholder* belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan SMKK;
17. Anggaran yang ada membatasi kegiatan pemantauan evaluasi aktif Komite Keselamatan Konstruksi;
18. Keterbatasan praktisi mengenai bidang konstruksi berkelanjutan;
19. Keterbatasan pemahaman Unit Organisasi teknis terkait Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan SMKK;
20. Penyusunan contoh IBPRP perlu Studi Literatur dan Keahlian metode pekerjaan tiap bidang ABCP.

#### 5.4 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan kendala dan permasalahan yang dihadapi, berikut adalah beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai langkah perbaikan pada tahun anggaran berikutnya:

1. Di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi akan dilaksanakan Monev kualitas paket pekerjaan dengan penawaran <80% dan Bimtek Pra Konstruksi;
2. Di bidang kinerja kelembagaan & dukungan MPK dan teknologi konstruksi akan dilaksanakan Monev capaian sasaran nilai TKDN dan peningkatan registrasi MPK melalui Sistem Informasi Material Peralatan Konstruksi (SIMPK);
3. Di bidang pembinaan kompetensi TKK akan dilaksanakan pembaruan SKKNI dan modul, pemenuhan skema sertifikasi, dan pelatihan & sertifikasi 45.190 TKK;
4. Di bidang pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan implementasi e-Katalog PUPR, penerapan SIPBJ; penerapan SIMPAN, peningkatan nilai ITKP, dan operasionalisasi e-HPS/SIPASTI;
5. Monev penerapan SMKK paket risiko besar;
6. Interoperabilitas SIJKT-SPSE LKPP;
7. Penyusunan Renstra 2025-2029;
8. Revisi SOTK dan reposisi kelembagaan.

LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM		TARGET
(1)		(2)
<b>PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI</b>		
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		6,40%
SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional		
1	Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	85,00%
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya		
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi		63,00%
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya		
1	Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	63,00%
a	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	89,00%
b	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	35,00%
c	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	66,00%
2	Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	79,26%
<b>Program:</b>		<b>ANGGARAN</b>
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		Rp 54.340.000.000,00
2. Program Dukungan Manajemen		Rp 513.296.233.000,00
		Rp 567.636.233.000,00

Gambar 6. 1 Perjanjian Kinerja Awal TA 2023 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi  
 Sumber: sakip.pu.go.id, 2023

REVISI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rachman Arief Dienaputra  
 Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono  
 Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
- Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



**M. BASUKI HADIMULJONO**

Jakarta, 29 September 2023

Pihak Pertama



**RACHMAN ARIEF DIENAPUTRA**

REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM (1)	TARGET (2)
<b>PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI</b>	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	
IKSS: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	5,10%
SP: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional	
1 Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	85,00%
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSS: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	69,00%
SP: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
1 Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	69,00%
a Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	89,00%
b Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	36,00%
c Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	82,00%
2 Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	87,81%

Program:	ANGGARAN
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp 54.340.000.000,00
2. Program Dukungan Manajemen	Rp 534.377.233.000,00
	<b>Rp 588.717.233.000,00</b>

**Gambar 6. 2 Perjanjian Kinerja Revisi TA 2023 Direktorat Jenderal Bina Konstruksi**  
 Sumber: *sakip.pu.go.id*, 2023

## 2. PENGHARGAAN

Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendapat penghargaan sebagai wujud apresiasi atas tercapainya kinerja yang baik, yaitu sebagai berikut:



**Gambar 6. 3 Penghargaan Penilaian Kinerja Pokja Terbaik dalam rangka Hari Bakti PUPR ke-77**  
 Sumber: Bagian Hukum, Informas Jasa Konstruksii, dan Komunikasi Publik, 2023



**Gambar 6. 4 Penghargaan Penerapan ISO 37001:2016 SMAP dalam rangka Hari Bakti PUPR ke-77**  
 Sumber: Bagian Hukum, Informas Jasa Konstruksii, dan Komunikasi Publik, 2023



**Gambar 6. 5 Penghargaan PPK Terbaik Kategori Administrasi Kontrak dalam rangka Hari Bakti PUPR ke-77**

*Sumber: Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik, 2023*



**Gambar 6. 6 Penyerahan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 SMAP kepada BP2JK Wilayah Lampung**

*Sumber: Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik, 2023*

## 3. PENGUKURAN KINERJA

## A. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

Tabel 6. 1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan yang Mendukung Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi TA 2023

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
UNIT ORGANISASI: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi					
PROGRAM: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI					
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		%	5,1	7,49	146,90
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	5,1	7,49	146,90
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional		%	85	100,00	117,65
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	85	100,00	117,65
KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASIONAL BIDANG KONSTRUKSI					
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina		%	65	80,99	124,60
KK1	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	%	65	80,99	124,60
KOORDINATOR: DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI					
PELAKSANA: BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH					
OUTPUT KEGIATAN :					
1	SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	Orang	24.134	29.967	124,17

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2023

$$IKK = \frac{\text{target pelatihan vokasional bidang konstruksi per tahun}}{\text{potensi lulusan vokasi per tahun **}} \times 100\%$$

$$IKP 1 = \frac{\text{Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang tersertifikasi per tahun}}{\text{Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina}} \times 100\%$$

## B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Tabel 6. 2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan yang Mendukung Program Dukungan Manajemen TA 2023

PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
<b>UNIT ORGANISASI: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi</b>						
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						
<b>SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>						
1	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat keandalan sumber daya konstruksi</b>		%	69	86,81	125,81
	1	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	69	86,81	125,81
<b>SASARAN PROGRAM: Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya</b>						
IKP1	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi</b>		%	69	86,81	125,81
	1.1	Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	89	94,23	105,88
	1.2	Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi	%	36	69,53	193,15
	1.3	Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	%	82	96,67	117,89
<b>KEGIATAN 1: PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI</b>						
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi</b>			%	75	88,41	117,88
IKK1	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi</b>		%	75	88,41	117,88
<b>KEGIATAN 2 : PEMBINAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI</b>						
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa</b>			%	92,5	94,28	101,92
IKK2	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa</b>		%	92,5	94,28	101,92
<b>KEGIATAN 3: PEMBINAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI</b>						
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)</b>			%	100	100,00	100,00
IKK3	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi</b>		%	100	100,00	100,00
<b>KEGIATAN 4: PEMBINAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI</b>						
<b>SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi</b>			%	36	69,53	193,15
IKK4.1	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat</b>		%	9,76	13,66	139,96

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
IKK4.2	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	%	63	125,41	199,06
<b>KEGIATAN 5: PEMBINAAN KINERJA KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN MATERIAL, PERALATAN, DAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI</b>					
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi		%	82	96,67	117,89
IKK5.1	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi	%	61	60,87	99,79
IKK5.2	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peran jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi	%	40	48,18	120,45
IKK5.3	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase ketersediaan data rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN	%	43	95,00	220,93
2	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	%	79,72	85,37	107,09
IKP2	INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR	%	87,81	93,67	106,67
<b>KEGIATAN 6: PENYELENGGARAAN LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON 1, INFORMASI JASA KONSTRUKSI, DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA</b>					
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		%	93	93,32	100,35
IKK6.1	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	%	94	100,00	106,38
IKK6.2	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	%	92	86,64	94,18

Sumber: Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, 2023

**IKP 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi**

$$IKP 1 = \frac{\% IKP 1.1 + \% IKP 1.2 + \% IKP 1.3}{3}$$

$$IKP 1 = \frac{94,23\% + 69,53\% + 71,90\%}{3} = 78,55\%$$

Dengan rincian perhitungan subindikator kinerja program sebagai berikut:

$$IKP 1.1 = \frac{\% IKK 1 + \% IKK 2 + \% IKK 3}{3}$$

$$IKP 1.1 = \frac{88,41\% + 94,28\% + 100\%}{3} = 94,23\%$$

$$IKP 1.2 = \% IKK 4 = 69,53\%$$

$$IKP 1.3 = \% IKK 5 = 71,90\%$$

4. BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA (BA SETELAH KONSOLIDASI DENGAN BPIW)

**BERITA ACARA KESEPAKATAN  
LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2023  
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023, sebagai bagian dari perwujudan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, disepakati capaian kinerja unit organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)	Catatan Faktor Pendukung Keberhasilan/ Penyebab Kegagalan
<b>SS-4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional</b>					
<b>IKSS</b> Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	%	5,1	7,49	146,90	1. Telah terpenuhinya kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional pada TA 2023 sebanyak 29.967 orang 2. Sinergi berbagai pihak internal dan eksternal dalam rangka pelaksanaan pembinaan SDM vokasional bidang konstruksi;
<b>SS-5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>					
<b>IKSS</b> Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	%	69	78,55	113,85	1. Capaian indikator kinerja program Tingkat kualitas sumber daya konstruksi didukung oleh capaian Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi 105,88%, Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi 193,15%, Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi 87,68%. 2. Terlaksananya pengelolaan NSPK terkait penyelenggaraan jasa konstruksi, pengadaan jasa konstruksi, keberlanjutan konstruksi, kompetensi dan produktivitas konstruksi, dan kelembagaan dan sumber daya konstruksi; 3. Tersusunnya SKKNI baru dan SKKNI terbarukan bidang konstruksi; 4. Sinergi berbagai pihak internal dan eksternal dalam rangka pembinaan jasa konstruksi;

Penetapan berita acara ini bersifat mengikat sebagai acuan data pencapaian kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023.

Mengetahui,  
**Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah**

Jakarta, 5 Januari 2024

**Direktur Jenderal Bina Konstruksi**

Yudha Mediawan  
Rachman Alief Dienaputra

5. DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 6. 7 Kegiatan Konstruksi Indonesia 2023  
Sumber: Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik, 2023



**Gambar 6. 8 Rapat Koordinasi PBJ TA 2023**

*Sumber: Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik, 2023*



**Gambar 6. 9 Gernas Reaktivasi BBI dan BBWI Jogjakarta 2023**

*Sumber: Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik, 2023*



**Gambar 6. 10 Kunjungan Kerja Dirjen ke BJKW II Palembang 2023**

*Sumber: Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik, 2023*